

**Lampiran 1 :**  
**Pedoman Wawancara**

1. Apakah informan pernah mendengar istilah ancaman non militer dan pertahanan nirmiliter?
2. Dari mana informan mengetahui tentang kedua istilah tersebut?
3. Bagaimana pemahaman informan tentang kedua istilah tersebut?
4. (a) Bagaimana informan melihat ancaman nonmiliter saat ini?  
(b) Apakah menurut informan ancaman nonmiliter itu sudah nyata atau benar-benar terjadi saat ini?
5. Menurut informan ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia?
6. (a) Menurut informan bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi ancaman nonmiliter, apakah diserahkan kepada TNI, atau ada kemungkinan lain ditangani oleh K/L dan Pemda atau masyarakat sipil?  
(b) Mohon Bapak jelaskan pendapat Bapak.
7. Menurut pendapat informan, apakah penempatan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah tepat?
8. Bagaimana pendapat informan tentang kesiapan K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dalam menghadapi ancaman nonmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan?
9. Apa upaya yang tepat menurut informan yang harus dilakukan oleh K/L (BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dll.) dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan?
10. Dengan K/L atau instansi mana sajakah informan paling sering berkoordinasi terkait tugas yang ada di wilayah perbatasan? Contoh: BPPD, TNI, Polri dll.

11. Menurut informan, apakah K/L yang informan sebutkan tadi sudah melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing?
12. Apakah informan merasakan manfaat dari keberadaan K/L tersebut di wilayah perbatasan?
13. Bagaimana informan bersinergi dengan K/L tersebut? Contoh: rapat koordinasi, briefing dll.
14. Apa saja hambatan yang informan hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda terkait tugas di wilayah perbatasan?
15. Apa upaya yang informan lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
16. Apa saran informan untuk meningkatkan kinerja BNPP hingga PLBN dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan?  
Misal: perubahan organisasi, penambahan personil, infrastruktur
17. Menurut informan, berapa kekuatan ideal organisasi vertikal BNPP di daerah agar dapat melaksanakan tugas secara optimal? Apakah kondisi sekarang sudah memadai?
18. Bagaimana pendapat informan tentang banyaknya pelanggaran lintas batas di wilayah perbatasan, baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA?
19. Apakah TNI selama ini melaksanakan tugas sesuai tupoksi atau mengambil alih tugas K/L atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh BNPP?
20. Pelanggaran apa saja yang terjadi di perbatasan yang ditangani oleh BNPP melalui PLBN?
21. Dalam hal mengatasi pelanggaran terkait tugas BNPP, apakah petugas dan institusi vertikal yang ada saat ini sudah mampu mengatasi masalah?
22. Apa saja faktor pemicu banyaknya pelanggaran di wilayah perbatasan? Contoh: faktor ekonomi, dll.

23. Apakah BNPP melakukan evaluasi secara rutin terhadap hal tersebut?  
Contoh, pengawasan jalur tikus?
24. Apa saja yang dilakukan untuk perbaikan ke depan terkait pelanggaran lintas batas, patok batas dan pelanggaran lain yang menjadi tanggung jawab BNPP?
25. Apa saran Bapak untuk pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan?

**Lampiran 2 :**  
**Transkrip Wawancara**

**Daftar Narasumber**

Narasumber yang telah diwawancarai peneliti adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Instansi	Tanggal	Metode
1.	Drs. Edy Supriyanta, M.Si	BNPP	3-Ags-2020	Korespondensi
2.	Dr. Miftahuddin, M.Si	BNPP	5-Ags-2020	Tatap muka
3.	Lettu Chb Agus	Kodam XII/Tpr	21-Des-2020	Via whatsapp dan telepon
4.	Kol Laut Dr. Sugeng Suryanto, S.AP., M.A.P	Ditjen Strahan, Kemhan	6-Jan-2021	Tatap muka
5.	Lettu Inf Henry	Satgas Pamtas Yonif 642/Kps	17-Jan-2021	Via whatsapp dan telepon
6.	Viktorius Dunand, SE, M.Si	PLBN Entikong	18-Jan-2021	Via whatsapp dan telepon
7.	Dra. Endang Purwaningsih, M.Si.	Ditjen Pothan, Kemhan	19-Jan-2021	Tatap muka
8.	Edison Silaen, S.Sos	BNPP	21-Jan-2021	Via telepon
9.	Lettu Chb Agus	Satgas Pamtas Yonif 642/Kps	29-Jan-2021	Via whatsapp dan telepon
10.	Indah Permata	Ditbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan	1-Feb-2021	Tatap muka
11.	Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto, S.Sos., M.M.	Ditbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan	1-Feb-2021	Tatap muka
12.	Priskah, S.H., M.H.	BNPB	8-Feb-2021	Via zoom

## Narasumber 1

Narasumber : Drs. Edy Supriyanta, M.Si

Jabatan : Asisten Deputi Pengelolaan Batas Darat,  
BNPP

Pelaksanaan : Senin, 3 Agustus 2020

Metode : Korespondensi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak pernah mendengar istilah ancaman non militer dan pertahanan nirmiliter?	<p>Ancaman non militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik dan ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum yang akhirnya bermuara pada ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah dalam segala tingkatan.</p> <p>Pertahanan nonmiliter atau nirmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata, tetapi melalui pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan nasional.</p>
2	Dari mana Bapak mengetahui tentang kedua istilah tersebut?	Kedua istilah ancaman nonmiliter dan pertahanan nonmiliter diketahui dari buku bacaan, makalah, media elektronik dan media cetak termasuk medsos, dan dari rapat-rapat khususnya rapat dengan institusi yang menangani pertahanan keamanan seperti Kementerian Pertahanan, TNI.
3	Bagaimana pemahaman Bapak tentang kedua istilah tersebut?	Dari kedua pengertian di atas jelas dilihat bahwa bangsa dan negara harus siap senantiasa untuk menghadapi ancaman-ancaman nonmiliter dengan pertahanan nonmiliter. Kecuali ancaman yang timbul karena adanya bencana alam, secara umum ancaman nonmiliter terjadi dalam tenggang waktu yang tidak singkat.
4	Bagaimana Bapak melihat ancaman nonmiliter saat ini?	Kalau melihat situasi saat ini, bahwa ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Apakah menurut Bapak ancaman nonmiliter itu sudah nyata atau benar-benar terjadi saat ini?	diantaranya covid-19 yang masih berlangsung, kelompok intoleran, bencana alam, ketimpangan pembangunan fisik khususnya di pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah perbatasan negara. Jadi ancaman yang terjadi dengan Malaysia adalah ancaman berdimensi ekonomi dan kedaulatan negara dan akhirnya dapat berdampak pada ancaman ideologi.
5	Menurut Bapak ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia?	Semua bentuk pelanggaran hukum merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Pelanggaran yang sering terjadi di titik-titik perlintasan tidak resmi antar-negara antara lain berupa: pelintas orang dan perdagangan ilegal termasuk perdagangan Narkoba. Tetapi semua permasalahan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh, karena hal ini terkait satu dengan lainnya.
6	Menurut Bapak bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi ancaman nonmiliter, apakah diserahkan kepada TNI, atau ada kemungkinan lain ditangani oleh K/L dan Pemda atau masyarakat sipil?  Mohon Bapak jelaskan pendapat Bapak.	Pemerintah seharusnya juga mempersiapkan pertahanan nonmiliter karena memang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Kemhan perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang bagaimana menghadapi ancaman nonmiliter  Salah satu wujud dari ancaman nonmiliter adalah kesenjangan pembangunan, maka Pemda seharusnya lebih sensitif dalam hal merespon hal ini. Selain itu masyarakat desa terdepan perlu diberdayakan untuk dapat berpartisipasi dalam hal menjaga hal-hal yang dianggap dapat membahayakan negara.
7	Menurut pendapat Bapak, apakah penempatan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah tepat?	Menurut saya sudah tepat. Namun yang perlu ditingkatkan adalah pemahaman K/L terhadap tugasnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
8	Bagaimana pendapat Bapak tentang kesiapan K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dalam menghadapi ancaman nonmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan?	Menurut hemat saya, kami telah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud untuk menghadapi ancaman nonmiliter, namun kami tidak menggunakan istilah tersebut karena tugas di perbatasan merupakan tugas pokok kami dalam meningkatkan taraf

No.	Pertanyaan	Jawaban
		hidup masyarakat di perbatasan melalui program pembangunan infrastruktur, sekolah, pasar, dan pos pamtas maupun PLBN.
9	Apa upaya yang tepat menurut Bapak yang harus dilakukan oleh K/L (BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dll.) dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan?	<p>Kita harus sadari bahwa salah satu penyebab terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan adalah ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan dibanding wilayah-wilayah lainnya. Maka perlu perencanaan jangka panjang dan Oleh sebab itu perlu perencanaan yang terpadu antar K/L. Pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan tugas fungsinya yaitu melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) Penetapan kebijakan program,</li> <li>6) Penetapan rencana kebutuhan anggaran,</li> <li>7) Pengkoordinasian pelaksanaan, dan</li> <li>8) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan. Seluruh K/L yang terlibat dalam pengelolaan kawasan baik di pusat maupun daerah dikoordinasikan oleh BNPP.</li> </ol> <p>Selain keempat hal di atas juga diperlukan koordinasi.</p>
10	Dengan K/L atau instansi mana sajakah Bapak paling sering berkoordinasi terkait tugas yang ada di wilayah perbatasan? Contoh: BPPD, TNI, Polri dll.	Dengan TNI, Polri, Imigrasi, Dinas Pertanian, Bea Cukai, dan Pemda.
11	Menurut Bapak, apakah K/L yang Bapak sebutkan tadi sudah melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing?	Ya. Menurut saya mereka sudah melaksanakan tugas sesuai bidang masing-masing.
12	Apakah Bapak merasakan manfaat dari keberadaan K/L tersebut di wilayah perbatasan?	Sangat merasakan. Contohnya kegiatan CIQS ( <i>Customs, Immigration, Quarantine, and Security</i> ) yang ada di PLBN.
13	Bagaimana Bapak bersinergi dengan K/L tersebut? Contoh: rapat koordinasi, briefing dll.	Sinergi dilakukan melalui Rapat Koordinasi, Pelaksanaan Survei Bersama, melaksanakan Pendidikan dan pelatihan (diklat peningkatan kapasitas), dan sosialisasi.
14	Apa saja hambatan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain,	Sejauh ini tidak ada hambatan signifikan dalam hal koordinasi dengan K/L lain. Persoalannya hanya masalah jarak yang

No.	Pertanyaan	Jawaban
	termasuk Pemda terkait tugas di wilayah perbatasan?	cukup jauh dengan kantor induk di Kabupaten maupun Provinsi.
15	Apa upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Upaya yang dilakukan BNPP terhadap kedua hal : a dan b adalah dengan meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi kepada seluruh K/L. Sedangkan untuk hal ketiga yaitu pergantian personil Pejabat adalah urusan Pimpinan.
16	<p>Apa saran Bapak untuk meningkatkan kinerja BNPP hingga PLBN dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan?</p> <p>Misal: perubahan organisasi, penambahan personil, infrastruktur</p>	<p>Kita tahu bahwa pembangunan PLBN baru dilaksanakan tahun 2016 dan peresmian pertama PLBN pada tanggal 16 Maret 2017 yaitu PLBN Entikong. Hingga saat ini sudah ada 7 (tujuh) PLBN yang sudah perasional. Ke-7 PLBN tersebut adalah : PLBN Entikong, PLBN Badau dan PLBN Aruk di Kalimantan, PLBN Motaain dan PLBN Motamasin dan PLBN Wini di NTT, PLBN Skow dan Sota di Papua.</p> <p>Saat ini, PLBN ini dilengkapi dengan staf instansi: Imigrasi, Beacukai, Kekarantinaan (karantina ikan, karantina hewan, karantina tumbuhan dan karantina kesehatan). Disamping kelengkapan institusi, PLBN juga menyediakan tempat kepada perwakilan TNI dan Kepolisian.</p> <p>Kelengkapan data keimigrasian ini salah satu kinerja yang dihasilkan oleh PLBN yang dapat diakses dengan mudah. Sebagai unit kerja yang relative baru, tentu ada hal-hal yang harus ditingkatkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengoptimalkan sumberdaya yang ada,</li> <li>5. Peningkatan kapasitas personil dan lembaga,</li> <li>6. Peningkatan dan penambahan infrastruktur pendukung,</li> <li>7. Penyiapan pedoman standar (SOP) dalam seluruh pelaksanaan tugas.</li> </ol>
17	Menurut Bapak, berapa kekuatan ideal organisasi vertikal BNPP di daerah agar dapat melaksanakan tugas secara optimal? Apakah	Dalam hal ini sangat diperlukan kajian/analisis mengenai kebutuhan pegawai di daerah (vertikal) terutama di PLBN, yang mana untuk tahun-tahun ke

No.	Pertanyaan	Jawaban
	kondisi sekarang sudah memadai?	depan akan dibangun PLBN yang baru sehingga diperlukan perhitungan secara matang oleh Karo Hukum dan Organisasi BNPP.
18	Bagaimana pendapat Bapak tentang banyaknya pelanggaran lintas batas di wilayah perbatasan, baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA?	<p>Secara umum pelanggaran lintas batas terjadi karena faktor kurangnya pengawasan dari pihak aparat seperti terbatasnya jumlah pos resmi sehingga memberikan peluang bagi pelintas batas untuk menempuh jalur di luar jalur resmi yang sering disebut dengan jalur tikus. Di samping itu jumlah PLBN sangat terbatas sehingga pelintas enggan menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk kegiatan yang sifatnya berulang-ulang sebagai kebiasaan. Contohnya belanja kebutuhan sehari-hari.</p> <p>Untuk masalah WNA, pada kenyataannya juga masih ada yang masuk ke wilayah Kalbar tanpa dokumen resmi ataupun berpotensi membawa narkoba.</p>
19	Apakah TNI selama ini melaksanakan tugas sesuai tupoksi atau mengambil alih tugas K/L atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh BNPP?	Menurut pendapat saya, TNI sudah melaksanakan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara. Untuk wilayah perbatasan, tugas TNI adalah sebagai bagian dari OMSP.
20	Pelanggaran apa saja yang terjadi di perbatasan yang ditangani oleh BNPP melalui PLBN?	Kebanyakan pelanggaran adalah terkait ketidaklengkapan dari segi administrasi berupa dokumen.
21	Dalam hal mengatasi pelanggaran terkait tugas BNPP, apakah petugas dan institusi vertikal yang ada saat ini sudah mampu mengatasi masalah?	Untuk di PLBN saat ini petugas dari berbagai instansi dapat melaksanakan tugas sesuai tugas masing-masing. Namun demikian pelaksanaan tugas di luar PLBN tidak dapat ditangani oleh petugas masing-masing K/L dikarenakan keterbatasan jumlah personil.
22	Apa saja faktor pemicu banyaknya pelanggaran di wilayah perbatasan? Contoh: faktor ekonomi, dll.	Secara umum pemicu terjadinya pelanggaran di wilayah perbatasan adalah faktor kesejahteraan. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia lebih besar daripada di dalam negeri sehingga masyarakat berbondong-bondong mencari pekerjaan di Malaysia tanpa mengindahkan peraturan. Untuk mengurus dokumen secara resmi

No.	Pertanyaan	Jawaban
		masyarakat sangat kesulitan biaya sehingga mereka dengan nekat menerobos jalur lintas.
23	Apakah BNPP melakukan evaluasi secara rutin terhadap hal tersebut? Contoh, pengawasan jalur tikus?	Keterbatasan anggaran dalam hal pembangunan PLBN memang menjadi salah satu kendala di lapangan. Untuk membangun pos di seluruh cakupan wilayah perbatasan dibutuhkan biaya yang sangat besar, disamping jumlah personil yang banyak juga. Sehingga upaya yang dilaksanakan saat ini adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan TNI dalam melaksanakan patrol perbatasan.
24	Apa saja yang dilakukan untuk perbaikan ke depan terkait pelanggaran lintas batas, patok batas dan pelanggaran lain yang menjadi tanggung jawab BNPP?	BNPP sudah melaksanakan pengawasan bekerja sama dengan TNI terkait patok batas. Perbaikan patok batas yang rusak sudah dilakukan di berbagai tempat namun masih terdapat beberapa lokasi yang belum diganti patok batasnya. Namun hal ini sudah menjadi program rutin dari BNPP.
25	Apa saran Bapak untuk pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter di wilayah Perbatasan?	Pertahanan non militer di wilayah perbatasan negara oleh BNPP dan Partner kerjanya (K/L) adalah pembangunan aspek kesejahteraan sosial ekonomi, dan mengejar ketertinggalan akibat dari kurangnya sarana prasarana di semua aspek kehidupan. Karena itulah, segala bentuk pembangunan yang nirmiliterlah yang menjadi aspek yang mendesak dilakukan. Sejak berdiri pada tahun 2010, BNPP sudah menetapkan kawasan perbatasan dengan segala keterbatasannya justru sebagai “halaman depan” negara, dan bukan lagi “halaman belakang” sebagaimana sebelumnya terjadi.

## Narasumber 2

Narasumber : Dr. Miftahuddin, M.Si

Jabatan : Tenaga Ahli Bidang Fasilitasi dan Layanan Pengelolaan  
PLBN Terpadu pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas  
Batas Negara BNPP

Pelaksanaan : Rabu, 5 Agustus 2020

Metode : Tatap muka

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak pernah mendengar istilah ancaman non militer dan pertahanan nirmiliter?	<p>Tidak ada istilah “ancaman non militer” dan “pertahanan nirmiliter” dalam dokumen-dokumen perencanaan BNPP, seperti: <i>Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025; Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019</i>). Dalam dokumen-dokumen ini yang selalu disebut adalah; pertahanan, keamanan, dan hukum.</p> <p>Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2011-2025, menyebutkan: “Fokus pengelolaan batas wilayah negara darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:</p> <p>c. penetapan dan penegasan serta pembangunan dan pemeliharaan batas;</p> <p>d. pengelolaan pertahanan, keamanan dan hukum.</p> <p>Pasal 6: “Fokus pengelolaan kawasan perbatasan darat dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:</p> <p>c. pertahanan, keamanan dan hukum;</p> <p>d. ekonomi kawasan; dan</p> <p>e. sosial dasar kawasan perbatasan.</p>
2	Dari mana Bapak mengetahui tentang kedua istilah tersebut?	Dari pertanyaan yang diajukan ini.
3	Bagaimana pemahaman Bapak tentang kedua istilah tersebut?	Mungkin maksud “bukan militer” berarti “sipil” dalam arti bukan tentara (TNI). Dalam hal ini, istilah “non militer” mungkin mengacu pada personilnya, sedang istilah “nirmiliter” mengacu pada sifat atau pendekatan

No.	Pertanyaan	Jawaban
		dari tindakan.
4	Bagaimana Bapak melihat ancaman nonmiliter saat ini? Apakah menurut Bapak ancaman nonmiliter itu sudah nyata atau benar-benar terjadi saat ini?	Jika yang dimaksud dari “ancaman non militer” adalah ancaman yang sifatnya bukan tentara yang bersenjata (perang), maka bisa dikatakan, ancaman tersebut adalah segala bentuk kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan di wilayah perbatasan. Dalam hal demikian, maka apa yang disebut “ancaman non militer” (berupa kegiatan pelanggaran hukum) memang masih banyak terjadi di wilayah perbatasan.
5	Menurut Bapak ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia?	Semua bentuk pelanggaran hukum merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Pelanggaran yang sering terjadi di titik-titik perlintasan tidak resmi antar-negara antara lain berupa: pelintas orang dan perdagangan ilegal. Tetapi semua permasalahan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh, tidak bisa dinilai secara sepotong-sepotong.
6	Menurut Bapak bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi ancaman nonmiliter, apakah diserahkan kepada TNI, atau ada kemungkinan lain ditangani oleh K/L dan Pemda atau masyarakat sipil? Mohon Bapak jelaskan pendapat Bapak.	Segala permasalahan harus diselesaikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menurut proporsinya masing-masing. Dalam konteks permasalahan yang ada di perbatasan, BNPP tidak memilah antara “militer-non militer” atau “TNI-Polri-sipil”. BNPP sendiri, adalah lembaga negara yang anggotanya mencakup 30 K/L plus 13 Gubernur, termasuk di dalamnya Panglima TNI dan Kapolri (Perpres 12/2010 yang diubah dalam Perpres 44/2017 tentang BNPP). Semua K/L yang tergabung dalam BNPP bekerja dan terlibat penuh dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara termasuk batas wilayah negara. Jika ada pelanggaran hukum, atau permasalahan lain, maka K/L anggota BNPP bergerak sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Jika terkait narkoba, misalnya, maka Polri yang terdepan bergerak. Jika terkait pelanggaran dokumen perlintasan, maka Imigrasi yang berperan. Jika ada gangguan patok batas, misalnya, maka Pamantas (TNI) akan bergerak. Jadi permasalahannya, jika ada ancaman, bukan diserahkan kepada TNI atau tidak. Melainkan yang pertama-tama harus dilihat adalah apa permasalahannya? Dan kewenangan yang terdekat ada di K/L mana? Maka K/L itulah yang akan menanganinya.
7	Menurut pendapat Bapak, apakah penempatan K/L di luar bidang pertahanan sebagai	K/L bekerja sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Bidang pertahanan menjadi ranah kewenangan TNI, bidang ketertiban dan keamanan kewenangan Polri, terorisme kewenangan BNPT, dan seterusnya.

No.	Pertanyaan	Jawaban
	unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah tepat?	
8	Bagaimana pendapat Bapak tentang kesiapan K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dalam menghadapi ancaman nonmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan?	Ancaman dalam bentuk apapun, harus ditangani secara proporsional oleh K/L sesuai tugas dan fungsinya, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan. BNPP dalam hal ini adalah lembaga koordinasi yang mengkoordinasikan seluruh K/L dalam semua level untuk pengelolaan perbatasan negara dan kawasan perbatasan. Kesiapan K/L anggota BNPP dalam mengelola perbatasan dicerminkan dalam dokumen-dokumen perencanaan (Desain Besar, Rencana Induk, dan Renaksi) yang pelaksanaan programnya selalu dievaluasi secara periodik. Hal ini berlaku untuk pengelolaan perbatasan di Indonesia, tak terkecuali wilayah perbatasan yang ada di Kalbar. Seluruh instansi terkait pengelolaan perbatasan, termasuk Pemkab Bengkayang, Sanggau, Sambas dan Sintang, turut terlibat dalam pengelolaan perbatasan.
9	Apa upaya yang tepat menurut Bapak yang harus dilakukan oleh K/L (BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dll.) dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan?	Upaya yang dilakukan BNPP dalam pengelolaan perbatasan, termasuk di Kalbar, sesuai tugas fungsinya yaitu melalui; 1) penetapan kebijakan program, 2) penetapan rencana kebutuhan anggaran, 3) pengkoordinasian pelaksanaan dan 4) pelaksanaan evaluasi dan pengawasan. Seluruh K/L yang terlibat dalam pengelolaan kawasan baik di pusat maupun daerah dikoordinasikan oleh BNPP.
10	Dengan K/L atau instansi mana sajakah Bapak paling sering berkoordinasi terkait tugas yang ada di wilayah perbatasan? Contoh: BPPD, TNI, Polri dll.	Seluruh K/L anggota BNPP (31 K/L dan 13 Gubernur) dikoordinasikan oleh BNPP. Namun yang paling sering berkoordinasi adalah: Kementerian Luar Negeri (terkait penyelesaian batas-batas wilayah negara yang belum selesai, khususnya dengan Malaysia dan RDTL), TNI (terkait pertahanan termasuk penjagaan patok batas), Polri (terkait ketertiban, keamanan dan penegakan hukum), Kementerian PUPR (terkait pembangunan sarpras), Kementerian Perhubungan (terkait akses jalan dan pelabuhan), Kementerian ATR/BPN (terkait penataan ruang kawasan perbatasan), Kemenkeu (terkait kepabeanaan), Kementerian Hukum dan HAM (terkait keimigrasian) dan terkait kekarantinaan mencakup Kementerian Kesehatan (karantina kesehatan), Kementerian Pertanian (Karantina hewan dan tumbuhan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (karantina ikan).
11	Menurut Bapak,	Sudah. Secara K/L sudah melaksanakan tugas

No.	Pertanyaan	Jawaban
	apakah K/L yang Bapak sebutkan tadi sudah melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing?	fungsinya dengan baik. Namun untuk optimalisasi pelaksanaan umumnya masih terkendala minimnya sarana dan prasarana di perbatasan.
12	Apakah Bapak merasakan manfaat dari keberadaan K/L tersebut di wilayah perbatasan?	Sudah pasti kehadiran K/L di wilayah perbatasan memberi manfaat dan kemajuan di perbatasan. Seluruh K/L hadir di perbatasan dengan mengemban tugas fungsi masing-masing, yang pada ujungnya adalah pembangunan sarpras fisik dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
13	Bagaimana Bapak bersinergi dengan K/L tersebut? Contoh: rapat koordinasi, briefing dll.	Sinergi dilakukan melalui rapat koordinasi, survei bersama, pendidikan dan pelatihan (diklat peningkatan kapasitas), dan sosialisasi.
14	Apa saja hambatan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda terkait tugas di wilayah perbatasan?	Hambatan yang dirasakan oleh BNPP selaku lembaga koordinasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan dokumen perencanaan (seperti Rencana Induk) yang agak terlambat karena K/L terkait terlambat menyampaikan ke Settap BNPP.</li> <li>b. pelaporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang terlambat disampaikan oleh K/L, sehingga jika ada permasalahan terlambat untuk ditindaklanjuti.</li> </ul>
15	Apa upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Upaya yang dilakukan BNPP adalah: meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi kepada seluruh K/L mitra.
16	Apa saran Bapak untuk meningkatkan kinerja BNPP hingga PLBN dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan? Misal: perubahan organisasi, penambahan personil, infrastruktur dll.	Saran untuk peningkatan kinerja: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengoptimalkan sumberdaya yang ada;</li> <li>2. peningkatan kapasitas personil dan lembaga;</li> <li>3. peningkatan dan penambahan infrastruktur pendukung;</li> <li>4. penyiapan pedoman standar (SOP) dalam seluruh pelaksanaan tugas.</li> </ol>
17	Menurut Bapak, berapa kekuatan ideal organisasi vertikal BNPP di daerah agar dapat melaksanakan tugas secara optimal?	

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Apakah kondisi sekarang sudah memadai?	
18	Bagaimana pendapat Bapak tentang banyaknya pelanggaran lintas batas di wilayah perbatasan, baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA?	Pelintas batas secara umum terjadi melalui 2 (dua) jalur: resmi dan tidak resmi. Jalur resmi adalah jalur yang memang secara legal diperuntukkan sebagai pintu keluar masuk negara (exit-entry point), yaitu berupa PLBN atau TPI. Sedangkan yang tidak resmi adalah di luar PLBN dan TPI, biasanya berupa jalan setapak di tengah kebun atau sungai, yang tidak ada pengawasan secara ketat oleh aparat keamanan. Pelanggaran paling banyak adalah perlintasan yang tidak resmi ini. Titik-titik jalur tidak resmi ini jumlahnya banyak sekali yang membentang di sepanjang garis batas antar negara. Permasalahan ini secara teoritis mudah untuk dijelaskan, tetapi sangat sulit untuk diimplementasikan, karena membutuhkan biaya yang sangat besar, khususnya untuk membangun sarana prasarana baik untuk pelayanan masyarakat maupun untuk pengawasan aparat keamanan.
19	Apakah TNI selama ini melaksanakan tugas sesuai tupoksi atau mengambil alih tugas K/L atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh BNPP?	TNI sudah melaksanakan tugas sesuai tugas fungsinya. Dalam konteks pengelolaan perbatasan, TNI adalah bagian dari anggota BNPP. Segala program dan kegiatan yang dilakukan oleh K/L di perbatasan dikoordinasikan oleh BNPP, sehingga apa yang disebut pengambil-alihan tugas lintas K/L, atau mungkin tumpang tindih program dapat diminimalisir.
20	Pelanggaran apa saja yang terjadi di perbatasan yang ditangani oleh BNPP melalui PLBN?	Beberapa jenis pelanggaran yang pernah terjadi di PLBN, antara lain: barang bawaan pelintas yang tidak sesuai dokumen, barang bawaan yang melebihi kuota yang ditetapkan, dan ketidaklengkapan dokumen pelintas.
21	Dalam hal mengatasi pelanggaran terkait tugas BNPP, apakah petugas dan institusi vertikal yang ada saat ini sudah mampu mengatasi masalah?	Seluruh pelanggaran yang terjadi di PLBN ditindaklanjuti sesuai prosedur dan koordinasi lintas instansi yang ada di PLBN (karantina, imigrasi, bea cukai, dan keamanan). Sejauh ini seluruh permasalahan dapat diatasi oleh pegawai yang bertugas di PLBN
22	Apa saja faktor pemicu banyaknya pelanggaran di wilayah perbatasan? Contoh: faktor ekonomi dll.	Pelanggaran umumnya dipicu oleh: dorongan kebutuhan ekonomi, kurangnya pengetahuan/pemahaman terkait peraturan yang berlaku, di samping ada faktor kesengajaan untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas.
23	Apakah BNPP melakukan evaluasi	Evaluasi dilakukan secara rutin oleh BNPP, khususnya terkait pengawasan dan pelayanan di

No.	Pertanyaan	Jawaban
	secara rutin terhadap hal tersebut? Contoh, pengawasan jalur tikus?	PLBN. Untuk jalur tikus, pengawasan dilakukan bersama dengan TNI (Pamantas)
24	Apa saja yang dilakukan untuk perbaikan ke depan terkait pelanggaran lintas batas, patok batas dan pelanggaran lain yang menjadi tanggung jawab BNPP?	Upaya perbaikan yang dilakukan terkait pelanggaran lintas batas antara lain: sosialisasi kepada masyarakat sekitar PLBN, penguatan kapasitas pegawai intansi terkait di PLBN, penyusunan pedoman standar pelayanan di PLBN, peningkatan sarana prasarana di perbatasan. Terkait pemeliharaan patok batas, yang dilakukan adalah, peningkatan koordinasi dengan Pamantas (TNI) dan Polri untuk pengamanan patok batas, peningkatan sarana prasarana di kawasan perbatasan, termasuk peningkatan sarana prasarana untuk Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP).
25	Apa saran Bapak untuk pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan?	Sejauh 'pertahanan nirmiliter' dimaknai sebagai segala entitas 'di luar pengerahan tentara bersenjata', maka apa yang dilakukan BNPP (bersama seluruh anggotanya, termasuk di dalamnya Panglima TNI), merupakan bagian pembangunan kekuatan pertahanan 'nirmiliter'. Tantangan utama di perbatasan saat ini adalah aspek kesejahteraan sosial ekonomi, dan ketertinggalan sarana prasarana di semua aspek kehidupan. Karena itulah, segala bentuk pembangunan yang 'nirmiliter' justru menjadi aspek yang mendesak dilakukan. Sejak berdiri pada tahun 2010, BNPP sudah menetapkan kawasan perbatasan dengan segala keterbatasannya justru sebagai 'halaman depan' negara, dan bukan lagi 'halaman belakang' sebagaimana sebelumnya terjadi. Dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan yang sangat kompleks itu, BNPP tidak menggunakan istilah 'militer, non militer, nirmiliter'.

### Narasumber 3

Narasumber : Lettu Chb Agus

Jabatan : Anggota Puskodalops Kodam XII/Tpr

Pelaksanaan : Senin, 21 Desember 2020

Metode : Via whatsapp dan telepon

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sistem pelaporan dari Satgas Pamtas ke Kodam?	Setiap temuan ataupun kejadian yang menonjol akan dilaporkan pada posko utama untuk kemudian diteruskan kepada satuan atas yaitu Korem dan Kodam XII/Tpr. Pelaporan ke satuan atas dilakukan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan
2	Permasalahan apa sajakah yang terjadi terkait pelaporan?	Tidak semua pos tercover dengan jaringan internet sehingga untuk mengirim laporan harus mencari daerah yang terdapat koneksi internet.
3	Ancaman apa sajakah yang terjadi di perbatasan?	Ilegal logging, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, penggunaan dan kepemilikan senjata ilegal. Di masa pandemi lalu lintas orang berpotensi ikut menyebarkan virus sehingga Pamtas dilengkapi dengan pemindai suhu.
4	Dari pengamatan Bapak, kasus apakah yang paling sering terjadi?	Melintas secara ilegal melalui jalur tikus.
5	Apakah penyebab dari terjadinya kasus tersebut?	Menurut kami karena adanya faktor ekonomi dimana sulit mendapatkan pekerjaan di wilayah Kalbar.

#### Narasumber 4

Narasumber : Kol Laut Dr. Sugeng Suryanto, S.AP., M.A.P

Jabatan : Kasubdit Penyusunan Kebijakan Pengembangan  
Pertahanan Negara, Ditjakstra, Ditjen Strahan, Kemhan

Pelaksanaan : Rabu, 6 Januari 2021

Metode : Tatap muka

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Terkait UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang implementasinya di lapangan sejak UU tersebut diberlakukan?	Secara jelas berdasarkan UU 1945 Pasal 30, telah diamanatkan bahwa sistim pertahanan negara adalah Sistim Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang dipertegas dengan UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 bahwa sistim pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pada Pasal 7, secara rinci mengamanatkan bahwa dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Namun demikian implementasi dari Sishankamrata sesuai dengan UU tersebut hingga saat ini masih jauh dari optimal, karena belum adanya sinergi antar seluruh komponen pertahanan. Secara umum mereka masih beranggapan bahwa urusan bidang pertahanan adalah tanggung jawab Kemhan dan TNI.
2	Menurut Bapak/Ibu apakah peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter	Hingga saat ini peran K/L diluar bidang pertahanan (hampir secara keseluruhan) belum maksimal mendukung perwujudan bidang pertahanan, khususnya dalam mewujudkan Sishankamrata, karena masih fokus terhadap peran dan fungsinya masing-masing.

No	Pertanyaan	Jawaban
	sudah berjalan sesuai UU di atas? Kalau belum, faktor apa saja yang mengakibatkan tidak terimplementasinya UU tersebut?	Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi diatas antara lain: belum adanya pemahaman yang sama secara komprehensif tentang pertahanan negara dengan Sishankamrata yang menjadi pedoman bagi segenap bangsa; belum optimalnya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI kepada seluruh pemangku kepentingan; belum adanya kontrol yang jelas terhadap implementasi UU tersebut bagi segenap pemangku kepentingan.
3	Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah mendengar bagaimana proses perumusan UU tersebut?  Apakah sudah melibatkan semua K/L atau stakeholder, termasuk sosialisasinya?	Sejauh yang saya ketahui, perumusan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dirumuskan pada awal-awal era reformasi yang keadaannya serba mendesak untuk segera dirumuskan. Pemisahan Kemhan, TNI dan Polri ke dalam institusi yang berbeda cukup mewarnai situasi perumusan UU Nomor 3 Tahun 2002 tersebut (yang dulu dalam satu payung kendali Menhankam/Pangab). Perumusan suatu produk UU sudah pasti melalui mekanisme yang berlaku dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang diawali secara internal, intra dan antar K/L sampai dengan proses harmonisasi hingga disyahnkannya menjadi UU. Namun pada tahapan sosialisasi mungkin kurang optimal.
4	Sesuai UU No. 3 di atas, peran Kemhan dalam mendorong K/L di luar bidang pertahanan sangat diperlukan. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Kemhan untuk mewujudkan hal tersebut?	Peran Kemhan dalam mendorong K/L di luar bidang pertahanan agar turut berperan aktif dalam mengimplementasikan UU Nomor 3 tahun 2002 yang dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain : melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung dan berkala kepada semua pemangku kepentingan, melaksanakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) bidang pertahanan, bahkan mengundang secara langsung untuk diskusi, dan sebagainya.
5	Adakah kebijakan Kemhan dalam bentuk Peraturan (PP, Perpres atau Permenhan, dll) yang secara khusus dibuat untuk mendukung pembangunan pertahanan nirmiliter?	Sesuai amanat UU Nomor 3 tahun 2002 Pasal 13 diamanatkan bahwa Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara. Lebih lanjut Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara (Jakumhanneg) yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara. Dalam merumuskan Jakumhanneg tersebut Presiden dibantu oleh Menteri Pertahanan (Pasal 16). Jakumhanneg yang dirumuskan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden (Prespres), sehingga

No	Pertanyaan	Jawaban
		keberadaan Perpres tentang Jakumhanneq tersebut harus dipatuhi dan dijadikan sebagai acuan oleh seluruh K/L.
6	Bagaimana Bapak/Ibu melihat ancaman saat ini, baik ancaman militer maupun nonmiliter? Apakah UU No 3 tahun 2002 masih relevan melihat semakin kompleksnya ancaman, baik global, regional maupun nasional?	Pada tataran kebijakan, UU Nomor 3 Tahun 2002 yang telah dijabarkan ke dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneq tahun 2020-2021 masih sangat relevan bila dihadapkan dengan kompleksitas ancaman saat ini, baik ancaman militer, nonmiliter maupun hibrida. Karena secara detail jenis ancaman-ancaman tersebut sekaligus penanggung jawab penanganannya telah dijabarkan dalam Perpres tersebut.
7	Menurut Bapak/Ibu ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi saat ini?	<p>Sesuai dengan yang telah dijabarkan dalam beberapa produk strategis kebijakan bidang pertahanan bahwa dilihat dari jenisnya ancaman terdiri dari ancaman militer (agresi dan non agresi), ancaman nonmiliter (berdimensi Ipoleksosbud, keselamatan umum, legeslasi dan Iptek) dan ancaman hibrida (gabungan dari ancaman militer dan nonmiliter). Dilihat dari bentuknya ancaman tersebut adalah ancaman actual (yang sering terjadi dan harus segera ditangani) dan ancaman potensial.</p> <p>Dengan demikian maka, ancaman actual lah yang sering terjadi yang meliputi antara lain: pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing; separatisme dan pemberontakan bersenjata; terorisme dan radikalisme; ancaman siber, intelijen dan spionase; ancaman psikologikal; bencana alam dan lingkungan; perompakan dan pencurian kekayaan alam; narkoba; dampak revolusi industri 4.0; serangan senjata biologis; wabah penyakit.</p>
8	Menurut pandangan Bapak/Ibu bagaimana seharusnya K/L di luar bidang pertahanan menyikapi UU No. 3 tahun 2002 terkait semakin meningkatnya ancaman nonmiliter yang terjadi akhir-akhir ini seperti terorisme, bencana alam dan pandemi Covid-19?	Sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 yang juga telah dijabarkan kedalam Jakumhanneq yang dirumuskan tersebut dalam bentuk Peraturan Presiden (Prespres), sehingga keberadaan Perpres tentang Jakumhanneq tersebut harus dipatuhi dan dijadikan sebagai acuan oleh seluruh K/L, karena secara detail jenis ancaman-ancaman tersebut sekaligus penanggung jawab penanganannya (dalam hal ini K/L sesuai dengan ancaman yang dihadapi) telah dijabarkan dalam Perpres tersebut, termasuk ancaman terorisme, bencana alam maupun pandemi.
9	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang	Sejauh pengamatan saya, kekuatan dan kemampuan seluruh K/L di luar bidang pertahanan

No	Pertanyaan	Jawaban
	kemampuan atau kesiapan K/L dalam menghadapi ancaman nonmiliter?	dalam menangani ancaman nonmiliter sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi secara umum memiliki kekuatan dan kemampuan yang belum memadai. Namun demikian, perlu dipahami bahwa penanganan terhadap ancaman nonmiliter sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2002 adalah menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain kekuatan bangsa. Dalam hal ini TNI selaku komponen utama berlaku sebagai unsur lain kekuatan bangsa dalam mendukung unsur utama yang sekaligus melaksanakan tugas dalam OMSP.
10	Pedoman Strategis tentang pertahanan nirmiliter yang sudah disusun Kemhan tahun 2016 nampaknya belum dipahami oleh K/L. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang hal ini, apa upaya yang dilakukan oleh Kemhan untuk mewujudkan terlaksananya pedoman strategis dimaksud?	Memang perlu diakui bahwa produk kebijakan Permenhan tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter tidak implementatif dan kurang dipahami oleh K/L diluar bidang pertahanan, karena lemahnya legalitas produk tersebut untuk dipatuhi oleh K/L di luar bidang pertahanan dan kurangnya sosialisasi menjadi hal utama terjadinya miss understanding pemahaman terhadap produk kebijakan tersebut. Namun demikian, saat ini dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneg Tahun 2020-2021 yang sangat relevan dan harus dipatuhi dan dijadikan sebagai acuan oleh seluruh K/L dalam penyelenggaraan bidang pertahanan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
11	Apa saja hambatan yang Bapak/Ibu hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda terkait implementasi UU No. 3 tahun 2002 dan Pedoman Strategis tentang pertahanan nirmiliter?	Beberapa kendala dan hambatan dalam proses koordinasi dan sosialisasi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2002 serta produk-produk kebijakan pertahanan lainnya antara lain adalah pada saat koordinasi ataupun sosialisasi, personel dari K/L lain yang dilibatkan selalu berubah-ubah, sehingga selalu tidak tepat sasaran; adanya pemahaman yang saya anggap kurang tepat, karena mereka menganggap bahwa bidang pertahanan adalah tugas dan tanggung jawab Kemhan dan TNI saja.
12	Apa upaya yang dilakukan oleh Kemhan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Untuk menghindari adanya miss understanding pemahaman terhadap semua kebijakan di bidang pertahanan dan untuk mengatasi beberapa hambatan adalah selalu konsisten melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada K/L di luar bidang pertahanan dengan mengingatkan perlunya

No	Pertanyaan	Jawaban
		menjaga konsistensi personel yang akan mengikuti koordinasi dan sosialisasi, sehingga diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif.
13	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kaitan UU No. 3 tahun 2002 dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI terkait OMSP dalam implementasinya di lapangan?	Implementasi penyelenggaraan Sishankamrata sesuai UU nomor 3 Tahun 2002 diamanatkan sesuai Pasal 7 (ayat2) yang menjelaskan bahwa dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai Komponen Utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, sedangkan (ayat3) dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan di dukung oleh Unsur-Unsur Lain Kekatan Bangsa. Kaitanya dengan UU nomor 34 Tahun 2003 tentang TNI, khususnya terkait dengan tugas-tugas OMSP, karena TNI merupakan salah satu dari komponen pertahanan, yaitu Komponen Utama. Maka dalam penyelenggaraan Sishankamrata khususnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter, TNI atau Komponen Utama bisa berlaku sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa yang mendukung Unsur Utama, dalam hal ini menjalankan tugas-tugas OMSP.
14	Terkait Jakumhaneg 2020-2024 yang sudah ditandatangani oleh oleh Presiden, apakah ada kebijakan yang harus dilakukan oleh Kemhan untuk mendorong percepatan agar segera menindaklanjuti dalam bentuk peraturan internal, kebijakan atau program kerja K/L sesuai fungsi masing-masing?	Sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 4 (2) Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhaneg Tahun 2020-2024 diamanatkan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Menurut saya, hal ini mengandung makna bahwa Kemhan selaku kementerian yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan berhak mengkoordinasikan segala sesuatunya terkait penyelenggaraan di bidang pertahanan negara kepada semua K/L diluar bidang pertahanan dan pemangku kepentingan lainnya.
15	Apakah Kemhan mempunyai target tertentu terkait Jakumhaneg tersebut untuk mendorong pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter secara umum dan secara	Dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhaneg Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan oleh Kemhan, maka target yang ingin diwujudkan adalah terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman; terbangunnya sistem

No	Pertanyaan	Jawaban
	khusus di wilayah perbatasan negara?	pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern; terwujudnya pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara; serta terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.

## Narasumber 5

Narasumber : Lettu Inf Henry

Jabatan : Pasiintel Satgas Pamtas Yonif 642/Kps

Pelaksanaan : Minggu, 17 Januari 2021

Metode : Via whatsapp dan telepon

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimanakah kondisi sosial masyarakat di perbatasan Kalbar-Malaysia	<p>Terkait nilai-nilai Pancasila dan rasa nasionalisme masih kuat. Dalam bermasyarakat, para penduduk cenderung hidup berkelompok sesuai suku dan hanya mengenal adat-istiadat yg diyakini. Kesadaran dalam melestarikan lingkungan hidup masih kurang. Hukum adat terkadang lebih tinggi daripada hukum positif sehingga dapat dijadikan alasan atau pembenaran dalam melakukan tindakan tertentu yang melanggar hukum sehingga perlu adanya ketegasan dari pihak aparat keamanan dalam menyikapinya. Tingkat kemampuan SDM secara umum masih rendah.</p> <p>Adapun ketua suku/tokoh adat sangat dihormati dan dipatuhi. Terkait keyakinan terhadap agama cukup baik. Terbatasnya infrastruktur (jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, pelayanan kesehatan dan tenaga pendidik). Tingkat ekonomi relatif rendah dan secara umum bidang ekonomi dikuasai oleh suku pendatang dari luar daerah. Harga sembako di perbatasan lebih tinggi dibanding di pusat kabupaten. Adanya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menyebabkan ketersediaan sembako tidak stabil. Kalaupun stok bahan makanan cukup, maka harga akan lebih tinggi dari harga biasanya. Kesadaran protokol kesehatan masih rendah.</p> <p>Suku bangsa yang ada terdiri dari: Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa, Bugis, dan Madura. Mata pencaharian berkebun, buruh, dan nelayan. Banyaknya tindakan melanggar hukum seperti asusila dan membekingi kegiatan illegal menjadi permasalahan tersendiri. Kegiatan illegal yang sering terjadi adalah: illegal logging, illegal mining, dan human trafficking. Terdapat banyak jalan tikus</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>untuk kegiatan illegal dan pelintas batas.</p> <p>Banyaknya penyelundupan narkoba. Terdapat kerawanan terjadinya konflik SARA. Sering terjadi perusakan dan pergeseran patok batas. Sering terjadi penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak oleh masyarakat; dan Banyak terjadi bencana alam seperti: banjir, tanah longsor, dan kebakaran.</p>
2	Apa sajakah pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan?	Ada banyak, diantaranya senjata ilegal, penyelundupan miras untuk menghindari pajak atau bea cukai, narkoba, untuk di masa pandemi ada juga pelintas batas yang tidak membawa dokumen kesehatan yang disyaratkan.
3	Apa upaya yang dilakukan oleh Satgas Pamtas untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di perbatasan?	Dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat perbatasan tentang bahayanya melakukan penyelundupan ataupun pelanggaran lainnya. Sebagai contoh untuk masalah senjata ilegal, pendekatan secara persuasif telah membuahkan hasil yaitu masyarakat sudah banyak yang menyerahkan senjata di pos kepada petugas Satgas.
4	Ancaman apa sajakah yang terjadi di perbatasan?	Selain pelanggaran yang sudah disebutkan, kami juga menghadapi bencana alam diantaranya berupa banjir dan tanah longsor.
5	Dari pengamatan Bapak, kasus apakah yang paling sering terjadi?	Dari pengamatan kami melihat permasalahan <i>illegal entry</i> sangat mendominasi pelanggaran bahkan di tahun 2020 mencapai 254 kasus. Sebetulnya mereka menyadari bahwa ilegal entry merupakan pelanggaran yang mempunyai konsekuensi hukum bagi pelanggarnya.
6	Apakah penyebab dari terjadinya kasus tersebut?	Kebanyakan dari mereka pergi ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Yang menjadi masalah adalah terkait dokumen seriingkali tidak lengkap a tau bahkan tidak memiliki karena tidak mampu membayar secara resmi.

## Narasumber 6

Narasumber : Viktorius Dunand, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Administrator PLBN Entikong

Pelaksanaan : Senin, 18 Januari 2021

Metode : Via whatsapp dan telepon

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak pernah mendengar istilah ancaman non militer dan pertahanan nirmiliter?	Ya, saya pernah mendengar istilah ancaman non militer dan pertahanan nirmiliter.
2	Dari mana Bapak mengetahui tentang kedua istilah tersebut?	Saya mengetahui tentang kedua istilah tersebut setelah membaca Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan melalui media internet.
3	Bagaimana pemahaman Bapak tentang kedua istilah tersebut?	Pertahanan non militer adalah suatu usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa yang bukan bersifat fisik, namun melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi dan keselamatan umum. Sementara pertahanan nirmiliter merupakan suatu usaha atau kegiatan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi.
4	Bagaimana Bapak melihat ancaman nonmiliter saat ini? Apakah menurut Bapak ancaman nonmiliter itu sudah nyata atau benar-benar terjadi saat ini?	Ancaman nonmiliter saat ini menurut saya sudah benar terjadi, sebagai contoh dari sisi ekonomi adanya istilah perang dagang antara Amerika Serikat dan RRC, sisi ideologi dan politik adanya ancaman radikalisme dan terorisme global ISIS, sisi teknologi informasi adanya kegiatan spionase dari negara asing untuk mengetahui potensi kelautan bangsa Indonesia dengan menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
5	Menurut Bapak ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia?	Ancaman yang paling berbahaya dan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia yaitu ancaman ekonomi, karena ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap Malaysia sangat tinggi terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pemasaran hasil pertanian. Hal tersebut

No	Pertanyaan	Jawaban
		disebabkan karena akses menuju ke wilayah Malaysia lebih dekat dan baik daripada akses menuju wilayah kecamatan terdekat. Selain itu, karena kurangnya lapangan pekerjaan maka banyak warga Indonesia yang bekerja di Malaysia.
6	Menurut Bapak bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi ancaman nonmiliter, apakah diserahkan kepada TNI, atau ada kemungkinan lain ditangani oleh K/L dan Pemda atau masyarakat sipil? Mohon Bapak jelaskan pendapat Bapak.	Menghadapi ancaman nonmiliter, peran TNI masih tetap dibutuhkan terutama di sepanjang garis perbatasan antara Indonesia-Malaysia, karena di sepanjang garis perbatasan tersebut tidak semua ada petugas K/L dan Pemda atau masyarakat sipil. Khusus di area Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebaiknya ditangani oleh K/L seperti BNPP, Keimigrasian, Kepabeanan, dan Kekarantinaan.
7	Menurut pendapat Bapak, apakah penempatan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah tepat?	Penempatan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah tepat.
8	Bagaimana pendapat Bapak tentang kesiapan K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dalam menghadapi ancaman nonmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan?	K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan sudah siap, namun perlu didukung instansi vertikal lain yang memberikan pelayanan keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaan.
9	Apa upaya yang tepat menurut Bapak yang harus dilakukan oleh K/L (BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dll.) dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan?	Upaya yang perlu dilakukan oleh K/L (BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dll.) dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan yaitu penguatan kelembagaan dan peningkatan anggaran.
10	Dengan K/L atau instansi mana sajakah	Saya sering berkoordinasi terkait tugas yang ada di wilayah perbatasan dengan Imigrasi, Bea Cukai,

No	Pertanyaan	Jawaban
	Bapak paling sering berkoordinasi terkait tugas yang ada di wilayah perbatasan? Contoh: BPPD, TNI, Polri dll.	Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian, Karantina Perikanan, BP2MI, TNI dan Polri.
11	Menurut Bapak, apakah K/L yang Bapak sebutkan tadi sudah melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing?	Ya, K/L tersebut sudah melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing.
12	Apakah Bapak merasakan manfaat dari keberadaan K/L tersebut di wilayah perbatasan?	Keberadaan K/L tersebut di wilayah perbatasan sangat bermanfaat, karena aktifitas pelayanan dan pengawasan lintas batas negara tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja, harus saling berkoordinasi dan bersinergi.
13	Bagaimana Bapak bersinergi dengan K/L tersebut? Contoh: rapat koordinasi, briefing dll.	1Sinergi yang kami lakukan yaitu dengan membuat WA Grup Pilar Entikong yang terdiri dari K/L serta Pemda setempat sebagai sarana/media komunikasi dan informasi, patrol bersama, briefing, apel gabungan.
14	Apa saja hambatan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda terkait tugas di wilayah perbatasan?	Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain termasuk Pemda terkait tugas di wilayah perbatasan tidak ada hambatan
15	Apa upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Untuk meningkatkan kinerja organisasi PLBN dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan diperlukan penguatan kelembagaan BNPP melalui revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, termasuk di dalamnya perubahan organisasi, penambahan anggaran dan peningkatan kapasitas personil.
16	Apa saran Bapak untuk meningkatkan kinerja BNPP hingga PLBN dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan? Misal: perubahan organisasi, penambahan personil, infrastruktur dll.	Secara organisasi PLBN belum optimal sehingga perlu penguatan kelembagaan dalam hal mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang melakukan pelayanan dan pengawasan di perbatasan, peningkatan kualitas dan kuantitas personil serta peningkatan anggaran.
17	Menurut Bapak, berapa kekuatan ideal	Peran TNI di wilayah perbatasan khususnya di wilayah sepanjang garis perbatasan yang belum

No	Pertanyaan	Jawaban
	organisasi vertikal BNPP di daerah agar dapat melaksanakan tugas secara optimal? Apakah kondisi sekarang sudah memadai?	memiliki PLBN (non PLBN) sangat penting karena keterbatasan personil K/L dan Pemda pada area tersebut.
18	Bagaimana pendapat Bapak tentang banyaknya pelanggaran lintas batas di wilayah perbatasan, baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA?	TNI sudah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab di wilayah sepanjang garis perbatasan yang belum memiliki PLBN (non PLBN). Apabila TNI menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelintas batas di area tersebut baik berupa penyelundupan orang dan barang secara illegal, maka proses penanganan selanjutnya diserahkan kepada K/L terkait termasuk Polri.
19	Apakah TNI selama ini melaksanakan tugas sesuai tupoksi atau mengambil alih tugas K/L atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh BNPP?	Pelanggaran yang terjadi di perbatasan seperti pelanggaran dokumen keimigrasian ditangani oleh petugas Imigrasi, pelanggaran kepabeanan ditangani oleh petugas Bea Cukai, pelanggaran kekarantinaan ditangani oleh petugas Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian dan Karantina Perikanan. PLBN bertugas melaksanakan fasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar pada PLBN.
20	Pelanggaran apa saja yang terjadi di perbatasan yang ditangani oleh BNPP melalui PLBN?	Dalam hal mengatasi pelanggaran dari berbagai jenis petugas dan institusi yang ada saat ini sudah mampu mengatasi masalah tersebut, namun untuk wilayah sepanjang garis perbatasan yang belum memiliki PLBN (non PLBN) perlu peran serta TNI.
21	Dalam hal mengatasi pelanggaran terkait tugas BNPP, apakah petugas dan institusi vertikal yang ada saat ini sudah mampu mengatasi masalah?	Untuk pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur jalan parallel perbatasan yang terkoneksi dengan dusun/desa terluar yang berhadapan langsung dengan wilayah Malaysia, peningkatan sarana prasarana pendidikan seperti sekolah, guru dan perpustakaan, serta peningkatan jaringan listrik dan internet.
22	Apa saja faktor pemicu banyaknya pelanggaran di wilayah perbatasan? Contoh: faktor ekonomi dll.	-
23	Apakah BNPP melakukan evaluasi secara rutin terhadap hal tersebut? Contoh, pengawasan jalur	-

No	Pertanyaan	Jawaban
	tikus?	
24	Apa saja yang dilakukan untuk perbaikan ke depan terkait pelanggaran lintas batas, patok batas dan pelanggaran lain yang menjadi tanggung jawab BNPP?	-
25	Apa saran Bapak untuk pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan?	-

## Narasumber 7

Narasumber : Dra. Endang Purwaningsih, M.Si.

Jabatan : Kasubdit Lingdik Ditbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan

Pelaksanaan : Selasa, 19 Januari 2021

Metode : Tatap muka

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Terkait UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bagaimana pandangan Ibu tentang implementasinya di lapangan sejak UU tersebut diberlakukan?	Menurut saya penerapan undang-undang tersebut memang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Adapun yang menyangkut pertahanan militer tentu sudah diimplementasikan karena merupakan tugas TNI. Untuk pertahanan nirmiliter hingga saat ini belum terwujud.
2	Menurut Ibu apakah peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah berjalan sesuai UU di atas? Kalau belum, faktor apa saja yang mengakibatkan tidak terimplementasinya UU tersebut?	Ancaman yang paling berbahaya saat ini adalah berupa perpecahan antar anak bangsa yang diakibatkan oleh pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.
3	Apakah Ibu mengetahui atau pernah mendengar bagaimana proses perumusan UU tersebut?  Apakah sudah melibatkan semua K/L atau stakeholder, termasuk sosialisasinya?	Saya hanya mendengarnya, tapi tidak mengetahui secara jelas proses perumusannya.
4	Sesuai UU No. 3 di atas, peran Kemhan dalam mendorong K/L di luar bidang pertahanan sangat diperlukan. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Kemhan untuk mewujudkan hal tersebut?	Setahu saya, Kemhan sudah melaksanakan sosialisasi pedoman strategis pertahanan nirmiliter di beberapa wilayah.

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
5	Adakah kebijakan Kemhan dalam bentuk Peraturan (PP, Perpres atau Permenhan, dll) yang secara khusus dibuat untuk mendukung pembangunan pertahanan nirmiliter?	Kemhan telah menerbitkan Permenhan No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.

## Narasumber 8

Narasumber : Edison Silaen. S.Sos

Jabatan : Staf BNPP

Pelaksanaan : Kamis, 21 Januari 2021

Metode : Via telepon

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak pernah mendengar istilah ancaman non militer dan pertahanan nirmiliter?	<p>Ancaman non militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak seperti ancaman militer. Contoh ancaman non militer adalah adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah seperti di perbatasan wilayah negara.</p> <p>Pertahanan militer adalah kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, terdiri dari komponen utama serta komponen cadangan.</p>
2	Dari mana Bapak mengetahui tentang kedua istilah tersebut?	<p>Informasi tentang Ancaman non militer dan Pertahanan militer.</p> <p>Bagi aparaturnegara, kedua istilah ini tidak asing, diperoleh dari rapat-rapat yang dilakukan oleh institusi yang menangani pertahanan keamanan seperti Kementerian Pertahanan, TNI dan media.</p>
3	Bagaimana pemahaman Bapak tentang kedua istilah tersebut?	<p>Ancaman non militer dan Pertahanan Militer.</p> <p>a. Ancaman non militer adalah ancaman yang berlawanan dari ancaman militer atau dengan jelas ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan dalam sekian waktu yang lama akan berdampak negatif bagi kedaulatan negara, integritas wilayah negara, dan juga seluruh bangsa. Pertahanan nonmiliter adalah pertahanan secara nonfisik yang tidak menggunakan senjata seperti yang dilakukan oleh Lapis pertahanan militer, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian, serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.</p> <p>b. Pertahanan militer</p> <p>Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
4	Bagaimana Bapak melihat ancaman nonmiliter saat ini? Apakah menurut Bapak ancaman nonmiliter itu sudah nyata atau benar-benar terjadi saat ini?	Ancaman non militer selalu ada di suatu negara walaupun itu dalam skala yang sangat kecil bahkan tidak kelihatan. Ancaman non militer yang sangat membahayakan saat ini adalah adanya ancaman terhadap keberadaan Pancasila dan UUD Tahun 1945, NKRI dan Kebhinnekaan yang harus ditumpas secara bersama oleh seluruh anak bangsa yang cinta tanah air. Sedang di wilayah perbatasan negara ancaman non militer adalah kesenjangan antara masyarakat di perbatasan dan masyarakat di tempat lainnya. Kita tidak boleh menutup mata bahwa masih terdapat desa-desa di wilayah perbatasan dengan Malaysia yang belum memiliki alat penerangan listrik dan sarana pendidikan yang sangat minim.
5	Menurut Bapak ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia?	<p>Ancaman yang paling berbahaya dan sering terjadi perbatasan dengan Malaysia.</p> <p>Bahwa di perbatasan negara dengan Malaysia yaitu di Kalimantan banyak jalur-jalur tikus (jalan tradisional) yang dapat digunakan untuk kegiatan illegal, lintas illegal buronan, kemungkinan lintas teroris dan lain-lain. Kondisi ini sudah menjadi ancaman non militer, karena sudah mengganggu kedaulatan negara.</p> <p>Menurut data di BNPP tahun 2020, jumlah pelintas batas WNI yang berangkat ke Malaysia khususnya di PLBN Entikong sangat tinggi. Jumlah pelintas WNI baik pada pos keberangkatan maupun kedatangan di PLBN Entikong sebesar 122.833 pelintas, Aruk sebesar 84.626 pelintas, dan Badau berjumlah 19.481 pelintas, hal ini disebabkan oleh faktor ketergantungan WNI terhadap Malaysia sangat tinggi khususnya terkait lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Kebanyakan WNI yang melintas batas adalah pekerja migran musiman.</p> <p>Jumlah pelintas batas WNI yang berangkat ke Malaysia sangat tinggi sebelum masa pandemi Covid-19. Namun setelah pandemi justru pelintas batas yang masuk ke Indonesia sangat tinggi karena terhentinya berbagai kegiatan industri yang memaksa mereka harus kembali ke Indonesia..</p>
6	Menurut Bapak bagaimana seharusnya pemerintah	Menghadapi ancaman non militer. Di sekitar perbatasan wilayah negara, ditemukan beberapa permasalahan diantaranya kesenjangan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kesenjangan sosial,

No	Pertanyaan	Jawaban
	menghadapi ancaman nonmiliter, apakah diserahkan kepada TNI, atau ada kemungkinan lain ditangani oleh K/L dan Pemda atau masyarakat sipil? Mohon Bapak jelaskan pendapat Bapak.	kesenjangan pendidikan dan kesenjangan lainnya yang akhirnya dapat mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan, dan tentu ini merupakan ancaman non militer. Karena ini sifatnya non militer maka penyelesaiannya tidak harus diserahkan kepada TNI, tetapi dapat dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan K/L dimana TNI juga termasuk didalamnya. Dan salah satu elemen/unsur Pemerintahan yang harus terjun adalah Pemda, baik itu Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten
7	Menurut pendapat Bapak, apakah penempatan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah tepat?	Penempatan K/L di luar bidang pertahanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ancaman yang paling serius saat ini adalah ancaman non militer, diantara ancaman non militer adalah tidak menggunakan produk dalam negeri, khususnya penduduk yang tinggal di sekitar perbatasan yang menggunakan produk Malaysia. Perlu kita ketahui bahwa alasan masyarakat menggunakan produk Malaysia hanya karena harganya lebih murah dan mudah didapat. Solusi untuk ini adalah mengundang investor untuk mendirikan pabrik-pabrik industri di wilayah perbatasan. Untuk mendirikan pabrik industri di wilayah perbatasan negara tentu perlu dukungan dan tentu keterlibatan K/L. terkait.
8	Bagaimana pendapat Bapak tentang kesiapan K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dalam menghadapi ancaman nonmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan?	Kesiapan K/L dalam menghadapi ancaman non militer di perbatasan Kalimantan. Salah satu yang menjadi permasalahan di perbatasan selama ini adalah lalu lintas perdagangan yang kurang tertib, terjadinya kegiatan-kegiatan illegal karena kurangnya sarana prasarana keimigrasian di perbatasan dan kurangnya koordinasi antara institusi yang menangani lalu lintas perbatasan. Setelah Joko Widodo menjadi Presiden, ditetapkan Perpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan 7 PLBN di Indonesia. Ke-7 PLBN tersebut telah selesai yaitu : PLBN Aruk dan PLBN Entikong di Kalimantan, PLBN Mataain dan PLBN Motasain dan PLBN Wini di NTT, PLBN Skow dan Sota di Papua. PLBN ini dilengkapi dengan staf institusi terkait serta sarana yang dibutuhkan. Selain untuk kepentingan ketertiban administrasi kedatangan dan keluarnya masyarakat ke Malaysia, PLBN juga akan membantu kelancaran perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Dengan adanya PLBN, informasi terhadap jumlah yang masuk atau keluar Indonesia telah terekam setiap harinya dan dapat

No	Pertanyaan	Jawaban																																																																						
		<p>diakses dengan mudah. Sebagai contoh, dari data yang diperoleh terhadap pelintas di 7 PLBN pada Tahun 2020 sebagaimana pada table di bawah.</p> <p>Jumlah Pelintas Mandiri melalui 7 PLBN pada Tahun 2020.</p> <table border="1" data-bbox="694 548 1284 1070"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Keberangkatan</th> <th>Kedatangan</th> <th>Total</th> <th>Total Deportasi/Repatriasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari</td> <td>55.914</td> <td>55.068</td> <td>110.982</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Februari</td> <td>38.770</td> <td>32.447</td> <td>71.217</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maret</td> <td>20.623</td> <td>28.115</td> <td>48.378</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>365</td> <td>8.955</td> <td>9.320</td> <td>494</td> </tr> <tr> <td>Mei</td> <td>16</td> <td>6.452</td> <td>6.468</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>Juni</td> <td>64</td> <td>3.646</td> <td>3.700</td> <td>476</td> </tr> <tr> <td>Juli</td> <td>815</td> <td>6.393</td> <td>7.208</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>Agustus</td> <td>525</td> <td>4.213</td> <td>4.738</td> <td>394</td> </tr> <tr> <td>September</td> <td>289</td> <td>4.345</td> <td>4.634</td> <td>355</td> </tr> <tr> <td>Oktober</td> <td>52</td> <td>4.929</td> <td>4.981</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>November</td> <td>222</td> <td>5.214</td> <td>5.436</td> <td>663</td> </tr> <tr> <td>Desember</td> <td>16</td> <td>5.697</td> <td>5.713</td> <td>381</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>61.857</td> <td>110.406</td> <td>172.263</td> <td>3.483</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Keberangkatan	Kedatangan	Total	Total Deportasi/Repatriasi	Januari	55.914	55.068	110.982	-	Februari	38.770	32.447	71.217	-	Maret	20.623	28.115	48.378	138	April	365	8.955	9.320	494	Mei	16	6.452	6.468	63	Juni	64	3.646	3.700	476	Juli	815	6.393	7.208	189	Agustus	525	4.213	4.738	394	September	289	4.345	4.634	355	Oktober	52	4.929	4.981	330	November	222	5.214	5.436	663	Desember	16	5.697	5.713	381	Total	61.857	110.406	172.263	3.483
Bulan	Keberangkatan	Kedatangan	Total	Total Deportasi/Repatriasi																																																																				
Januari	55.914	55.068	110.982	-																																																																				
Februari	38.770	32.447	71.217	-																																																																				
Maret	20.623	28.115	48.378	138																																																																				
April	365	8.955	9.320	494																																																																				
Mei	16	6.452	6.468	63																																																																				
Juni	64	3.646	3.700	476																																																																				
Juli	815	6.393	7.208	189																																																																				
Agustus	525	4.213	4.738	394																																																																				
September	289	4.345	4.634	355																																																																				
Oktober	52	4.929	4.981	330																																																																				
November	222	5.214	5.436	663																																																																				
Desember	16	5.697	5.713	381																																																																				
Total	61.857	110.406	172.263	3.483																																																																				
9	<p>Apa upaya yang tepat menurut Bapak yang harus dilakukan oleh K/L (BNPP, BPPD dan Pemda Kalbar, dll.) dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan?</p>	<p>9. Upaya yang perlu dilakukan oleh BNPP, BPPd dan Pemda setempat di perbatasan untuk mengurangi ancaman non militer.</p> <p>a. BNPP.</p> <p>Sebagai institusi yang diberi tanggung jawab untuk menangani perbatasan, seharusnya dapat mengkoordiner setiap kegiatan K/L yang berhubungan dengan kegiatannya di perbatasan.</p> <p>Ada dua hal yang ditangani BNPP yaitu perbatasan wilayah secara fisik yaitu Pilar batas Negara, dan perbatasan wilayah negara dalam bentuk ruang yang digunakan oleh masyarakat.</p> <p>Perbatasan wilayah secara fisik sudah menjadi ranah pertahanan militer ( OMSP) termasuk didalamnya pengukuran dan pemasangan patok batas nagara, pemeliharaan patok, Identification Reficksation and Maintenance (IRM). Sedangkan perbatasan wilayah negara sebagai ruang, selain ranah TNI juga menjadi ranah K/L termasuk didalamnya Imigrasi, Karantina, Beacukai dan lain-lain.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan tugas, BNPP belum optimal dalam pelaksanaan koordinasi dengan K/L yang terlibat dalam kegiatan di perbatasan. Salah satu contoh yang menjadi pertanyaan adalah tidak masuknya BNPP dalam Panitia Teknis Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.</p>																																																																						

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>b. BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten. Sebagai organisasi Perangkat Daerah, tentu menjadi ujung tombak di lapangan untuk pembangunan khususnya pembangunan masyarakat di perbatasan. Pelaksanaan pembangunan dapat terealisasi apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati).</p> <p>c. Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten. Struktur Pemerintahan Indonesia yang terdiri atas Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah/Kepala desa sampai RT/Kepala Lorong terbentuk adalah untuk mempermudah pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Gubernur dan Bupati/Walikota yang melayani masyarakat secara adil perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di perbatasan negara, karena keberadaan mereka menjadi cermin bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu perlu dukungan penuh kepada BPPD.</p>
10	<p>Dengan K/L atau instansi mana sajakah Bapak paling sering berkoordinasi terkait tugas yang ada di wilayah perbatasan? Contoh: BPPD, TNI, Polri dll.</p>	<p>Tugas Koordinasi dengan K/L. Sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang sudah diubah dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2017, terdapat 16 K/L yang menjadi partner BNPP dalam melaksanakan tugas di perbatasan wilayah negara. Diantara K/L yang paling sering dilakukan koordinasi adalah : Kementerian Pertahanan, TNI, BIN, Kementerian Luar Negeri, KumHam, dan lainnya.</p>
11	<p>Menurut Bapak, apakah K/L yang Bapak sebutkan tadi sudah melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing?</p>	<p>Pada dasarnya BNPP hanya melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap program-program K/L yang berkaitan dengan perbatasan wilayah negara, tidak ada kewenangan lain yang sifatnya strategis. Koordinasi yang dilakukan misalnya bahwa pada TA 2020, Kemenhan telah merencanakan pembangunan Jalur Inspeksi Pengelola Perbatasan (JIPP) sepanjang ....km dengan Alokasi anggaran... rupiah. Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri akan melakukan pembangunan masyarakat desa melalui kegiatan Pengembangan Kreatifitas Masyarakat Desa di Bidang Kerajinan Tangan Sulam Menyulam di Desa X, Kecamatan Y Kabupaten F dengan alokasi anggaran Rp..... Pada akhir tahun BNPP melakukan Rakor terhadap Pelaksanaan Program?kegiatan K/L untuk mengetahui Realisasi Kegiatan yang dilakukan. Hanya berdasarkan Laporan yang diterima inilah BNPP mengetahui Kegiatan K/L di Lapangan tanpa mengetahui secara mendalam urgensinya bagi masyarakat di perbatasan wilayah negara. Karena kegiatan yang dilakukan oleh K/L sudah selesai, dapat K/L dianggap telah melakukan</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		tugas sesuai dengan bidangnya.
12	Apakah Bapak merasakan manfaat dari keberadaan K/L tersebut di wilayah perbatasan?	Manfaat keberadaan K/L di perbatasan. Kehadiran K/L di perbatasan sangat jelas, misalnya dalam hal pelaksanaan IRM yang dilakukan TNI, pembangunan PLBN yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, Pengisian Personil di PLBN yang didatangkan dari instansi terkait, semua manfaat walaupun masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan khususnya sinkronisasi dan sinergitas antar K/L untuk dalam melaksanakan program/kegiatan.
13	Bagaimana Bapak bersinergi dengan K/L tersebut? Contoh: rapat koordinasi, briefing dll.	Bersinergi dengan K/L. Perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh K/L di wilayah perbatasan sesuai dengan Program Pemerintah yaitu membangun dari pinggiran. BNPP sebagai institusi yang ditugaskan untuk menangani Perbatasan Wilayah Negara seharusnya dapat melaksanakan kewenangannya sehingga sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dapat berjalan secara optimal. Koordinasi yang dapat dilakukan berupa laporan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan K/L serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Sedangkan briefing hanya untuk kegiatan tertentu saja seperti Briefing Tim Survey Unilateral Sungai Sinapad November 2020
14	Apa saja hambatan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda terkait tugas di wilayah perbatasan?	Conflict of Interest dengan K/L. Pembangunan wilayah perbatasan adalah tugas negara yang melibatkan beberapa K/L. Semua K/L yang terlibat di dalamnya sudah menyusun rencana kerja untuk jangka waktu tertentu misalnya untuk lima tahun. Penyusunan rencana kerja dilakukan sendiri oleh K/L tanpa ada koordinasi dengan BNPP mengenai prioritas atau tugas-tugas utama yang harus dilakukan. Sehingga BNPP hanya mencatat rencana dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Seharusnya BNPP sebagai coordinator diikutkan dapat merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh K/L di wilayah perbatasan negara. Dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan K/L bisa bersifat partial dan tidak tertutup kemungkinan adanya conflict of interest dan mudah-mudah sifatnya posistif. Salah satu penyebab terjadinya hal ini demikian karena BNPP belum sepenuhnya menerapkan kewenangannya dalam menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan berjalan sebagaimana mestinya.
15	Apa upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan ini adalah tetap mencoba melakukan konsolidasi dengan K/L terkait, dan kalau dimungkinkan meninjau kembali isi UU Nmor 43 Tahun 208 tentang Wilayah Negara dengan melibatkan seluruh K/L terkait.
16	Apa saran Bapak	Saran untuk meningkatkan kinerja BNPP di PLBN.

No	Pertanyaan	Jawaban
	<p>untuk meningkatkan kinerja BNPP hingga PLBN dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan? Misal: perubahan organisasi, penambahan personil, infrastruktur dll.</p>	<p>Salah satu tugas yang sifatnya teknis adalah pengelolaan PLBN. Hingga saat ini, pimpinan administrasi PLBN masih dipegang oleh jajaran BNPP, dan belum ada isu negative terhadap PLBN yang sudah dibangun. Namun di luar PLBN, masih terdapat kewenangan BNPP yang sifatnya lebih luas yang tidak dapat diterapkan karena kewenangan-kewenangan dimaksud masih melekat pada institusi terkait.. Sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian kinerja suatu instansi adalah sejauh mana instansi dimaksud telah melakukan tupoksinya sesuai kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang. Hingga saat ini, BNPP belum dapat melakukan kewenangan yang diatur dalam UU. Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Jadi dapat untuk meningkatkan kinerja BNPP, mungkin perlu peninjauan ulang secara bersama UU Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.</p>
17	<p>Menurut Bapak, berapa kekuatan ideal organisasi vertikal BNPP di daerah agar dapat melaksanakan tugas secara optimal? Apakah kondisi sekarang sudah memadai?</p>	<p>Sebagaimana disebut di atas bahwa pada dasarnya, peran BNPP saat ini hanya sebagai pencatat hasil pekerjaan K/L yang melakukan kegiatan di perbatasan. Dengan kerja sedemikian, kekuatan BNPP sudah cukup. Namun jika tugas BNPP dilakukan sebagaimana kewenangan yang telah diberikan dan baru dilakukannya restrukturisasi Organisasi Kepegawaian di Instansi Pemerintah, sulit menilai seberapa kekuatan yang optimal yang diperlukan.</p>
18	<p>Bagaimana pendapat Bapak tentang banyaknya pelanggaran lintas batas di wilayah perbatasan, baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA?</p>	<p>Pelanggaran batas oleh WNA dan WNI. Salah satu permasalahan yang ada saat ini adalah pelanggaran batas wilayah oleh WNA atau WNI. Ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih banyaknya pos batas yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana keimigrasian;</li> <li>Masih banyaknya jalur tikus (jalan tradisonal) di perbatasan;</li> <li>Masih adanya penduduk di perbatasan yang memiliki identitas ganda;</li> <li>Kurangnya keseriusan untuk menyelesaikan permasalahan lintas batas, dll.</li> </ol> <p>Untuk itu kita perlu sama-sama memikirkan upaya penyelesaiannya, karena hal ini tentu sudah melanggar kedaulatan negara.</p>
19	<p>Apakah TNI selama ini melaksanakan tugas sesuai tupoksi atau</p>	<p>Tugas TNI di perbatasan. Sebagai wujud penyelenggaraan pertahanan militer ada dua yaitu : Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang. Operesi militer selain perang yaitu tugas pengamanan perbatasan. Di lapangan militer selain</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
	mengambil alih tugas K/L atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh BNPP?	menjaga terjadi keluar masuknya penduduk ke Indonesia juga diberi tugas untuk memeriksa pilar batas di lapangan. Dimungkinkan terjadinya penyelesaian permasalahan di lapangan oleh TNI (Pamtas) yang seharusnya tugas keamanan atau tugas institusi lain, namun karena kondisi lapangan yang sangat jauh dari pengambil keputusan, sehingga Pamtas dengan maksud baik dan melakukan tindakan. Namun ini tidak dapat dikategorikan sebagai pengambil alihan tugas K/L atau BNPP.
20	Pelanggaran apa saja yang terjadi di perbatasan yang ditangani oleh BNPP melalui PLBN?	Pelanggaran yang terjadi di PLBN. PLBN merupakan pintu keluar-masuk resmi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Bagi setiap orang yang ingin keluar atau masuk melalui PLBN tentu harus melengkapi persyaratan keimigrasian, seperti identitas pribadi, passport, asal dari mana, tujuan kemana, maksud keluar atau masuk dan lain-lain. Bagi yang tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan tentu tidak diperkenankan melalui PLBN.
21	Dalam hal mengatasi pelanggaran terkait tugas BNPP, apakah petugas dan institusi vertikal yang ada saat ini sudah mampu mengatasi masalah?	Penyelesaian masalah di PLBN. BNPP sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk mengelola perbatasan tidak melakukan tugas teknis, yang melakukan tugas teknis adalah K/L terkait, misalnya terjadinya lintas batas akan menjadi tugas TNI, dan imigrasi, perdagangan menjadi tugas beacukai dan lain-lain.
22	Apa saja faktor pemicu banyaknya pelanggaran di wilayah perbatasan? Contoh: faktor ekonomi dll.	Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di wilayah perbatasan yakni : lintas batas di jalan tradisional, illegal bussines, double identities dll. Pada umumnya ini disebabkan faktor ekonomi.
23	Apakah BNPP melakukan evaluasi secara rutin terhadap hal tersebut? Contoh, pengawasan jalur tikus?	Banyaknya jalur tikus (jalan tradisional) menjadi permasalahan juga saat ini. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa Jalan tikus ini hanyalah nama karena pada dasarnya adalah jalan yang pada dasarnya dapat dilalui kendaraan roda empat. Dan inilah yang selama ini digunakan masyarakat setempat untuk keluar masuk ke negara tetangga dan sebaliknya. Ini merupakan kebutuhan masyarakat di perbatasan. BNPP bersama aparat Pamtas sering melintas di jalan tikus dan mengevaluasi keberadaannya, tetapi karena ini merupakan kebutuhan masyarakat, tidak mungkin untuk ditutup. Yang penting mari

No	Pertanyaan	Jawaban
		kita pikirkan bersama upaya apa yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kegiatan-kegiatan illegal disana.
24	Apa saja yang dilakukan untuk perbaikan ke depan terkait pelanggaran lintas batas, patok batas dan pelanggaran lain yang menjadi tanggung jawab BNPP?	<p>Upaya BNPP dalam upaya perbaikan perbatasan dan wilayah perbatasan ke depan khususnya terkait dengan patok batas dan lintas batas.</p> <p>a. Patok batas, Bahwa setelah sejak tahun 1972 Indonesia telah memulai koordinasi dengan Malaysia untuk penegasan batas negara berdasarkan kesepakatan Inggris dan Belanda tahun 1891, Tahun 1915 dan Tahun 1928. dan realisasinya pelaksananya mulai tahun 1975 mulai dari pengukuran hingga pemasangan patok batas. Di sepanjang 2.062 km jarak perbatasan antara Malaysia dan Indonesia terdapat 20.311 patok batas. Disepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia masih terdapat segmen yang masih belum disepakati yang disebut dengan Outstanding Border Problem (OBP). Saat ini masih terdapat 2 (dua) OBP di sektor Timur yaitu Segmen S. Sinapad dan Segmen P. Sebatik yang penyelesaiannya tinggal pada MOU. Selain penyelesaian OBP, BNPP juga berupaya untuk mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan patok-patok batas dengan TNI, keberadaan Pos Pamtas dan sarana prasarana pendukungnya di lapangan, pembangunan JIPP dan lainnya.</p> <p>b. Lintas batas. Untuk lokasi lintas batas non PLBN yang sarana prasana pelaksanaan administrasi keimigrasian, perlu dilengkapi dengan perlengkapan sarana minim keimigrasian. Hal ini diperlukan karena jarak yang dibutuhkan oleh pelintas batas jauh lebih panjang dari pada tujuan yang akan dicapai oleh pelintas di negara tetangga. Sedangkan bagi pelintas batas melalui jalur tikus (jalan tradisional) perlu duduk bersama seluruh K/L terkait untuk membahas bersama hal-hal apa yang dapat diberikan oleh K/L dalam penyelesaiannya permasalahan ini. Ha ini tidak dapat dilakukan hanya oleh satu K/L.</p>
25	Apa saran Bapak untuk pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter di wilayah perbatasan?	<p>Pembangunan kekuatan pertahanan non militer di perbatasan.</p> <p>Pembangunan wilayah perbatasan yang digagas oleh Presiden Joko Widodo bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan agar sama dengan masyarakat di perkotaan. Pembangunan infrastruktur yang dimulai dengan pembangunan PLBN diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah perbatasan. Dengan dibangunnya PLBN tentu akan dapat merangsang investor menanamkan modalnya membangun pabrik-pabrik di perbatasan sehingga masyarakat yang</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>selama ini masih menggantungkan diri kepada produk luar (Malaysia) secara bertahap dapat beralih menggunakan produk dalam negeri. Di sekitar PLBN juga diharapkan ada gudang-gudang penampungan barang yang nantinya akan dikesport ke luar negeri.</p> <p>Jadi diharapkan pembangunan yang berkelanjutan dari K/L hingga wilayah perbatasan sebagai wajah negara dapat sebanding bahkan melebihi negara tetangga</p>

## Narasumber 9

Narasumber: : Lettu Chb Agus

Jabatan : Dantonhub Satgas Pamtas Yonif 642/Kps

Pelaksanaan : Jumat, 29 Januari 2021

Metode : Via whatsapp dan telepon

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Mohon Bapak jelaskan tentang Latar belakang dibentuknya Satgas Pamtas Yonif 642/Kps dan Undang-undang atau peraturan apa saja yang menjadi landasan/payung hukumnya.</p>	<p>a. Satgas Pamtas Yonif 642/Kps dibentuk atas dasar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/173/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan (Bujuklak) TNI tentang Pengamanan Perbatasan;</li> <li>2) Telegram Panglima TNI Nomor TR/828/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang pelaksanaan rotasi Satgas Pamtas RI-Malaysia Wilayah Kalbar dari Yonif R 641/Bru digantikan oleh Yonif 642/Kps dan Yonif 133/YS digantikan oleh Yonif 407/PK;</li> <li>3) Surat Perintah Pangkogabwilhan I Nomor Sprin/524/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang direktif operasi pengamanan perbatasan RI - Malaysia wilayah Kalimantan Barat Tahun 2021;</li> <li>4) Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Nomor Sprin/1423/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang perintah melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat;</li> <li>5) Surat Perintah Pangdam XII/Tpr Sprin/ 2178 /XII/2020 tanggal 30 Desember 2021 tentang perintah melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI - Malaysia di wilayah Kalimantan Barat; dan</li> <li>6) Perintah Operasi Perisai Khatulistiwa-21 Kodam XII/Tpr TA. 2021.</li> </ol> <p>b. Satgas Pamtas Yonif 642/Kps memiliki payung hukum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;</li> <li>2) Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 3</li> </ol>

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;</p> <p>3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan</p> <p>4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.</p>
2	<p>Apa saja tugas pokok Satgas Pamtas dan dengan instansi mana saja berkoordinasi terkait tugas di wilayah perbatasan?</p>	<p>a. Tugas pokok Satgas Pamtas Yonif 642/Kps meliputi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mencegah agar tidak terjadinya pergeseran patok perbatasan;</li> <li>2) Mencegah dan menggagalkan terjadinya segala tindak pelanggaran di perbatasan negara, baik berupa penyelundupan barang, penyelundupan narkoba maupun pelanggaran pelintas batas non prosedural;</li> <li>3) Menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan.</li> <li>4) Melaksanakan pembinaan teritorial.</li> <li>5) Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pelaksanaan tugas.</li> <li>6) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh komando atas.</li> </ol> <p>b. Adapun dalam pelaksanaan tugas, Satgas Pamtas Yonif 642/Kps melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintahan Setempat (Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Dusun);</li> <li>2) Kejaksaan Negeri Kab. Sanggau;</li> <li>3) Kejaksaan Negeri Kab. Bengkayang;</li> <li>4) Kejaksaan Negeri Kab. Sambas;</li> <li>5) KPP Bea dan Cukai TMP C Entikong;</li> <li>6) KPP Bea dan Cukai TMP C Sintete;</li> <li>7) Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;</li> <li>8) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas; Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong;</li> <li>10) Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas I Entikong;</li> <li>11) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Entikong;</li> <li>12) Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Entikong; dan</li> <li>13) Polri.</li> </ol>
3	<p>Bagaimana cakupan</p>	<p>Sektor wilayah yang menjadi tugas dan tanggung</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>wilayah yang menjadi tugas dan tanggung Satgas Pamtas wilayah Kalimantan Barat? Apakah semua wilayah Kalbar tercover oleh Yonif 642/Kps atau dibantu oleh Tim Satgas lain?</p>	<p>jawab Satgas Pamtas Yonif 642/Kps di Kalimantan Barat yaitu sepanjang ± 359,4 Km meliputi 3 wilayah Kabupaten yaitu Kab. Sambas, Kab. Bengkayang dan Kab Sanggau. Adapun pada wilayah perbatasan negara yang ada di Kalimantan Barat dalam tugas dan tanggung jawab pengawasan terbagi menjadi 2 sektor. Untuk sektor Barat yang meliputi Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, dan Kab. Sanggau menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 642/Kps. Kemudian untuk sektor Timur menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 407/PK. Selain itu juga terdapat Satgas lainnya seperti Satgaster, Satgas Intelijen baik dari Kodam, BAIS TNI maupun BIN.</p>
4	<p>Sejauh ini, berapa jumlah Pos Pamtas yang ada di wilayah perbatasan darat Kalbar-Malaysia? Apakah jumlah tersebut sudah cukup jika dihadapkan dengan luasnya wilayah yang harus diawasi? Bagaimana dengan sarana pendukung seperti air, listrik dll.?</p>	<p>Pada sektor Barat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 642/Kps terdapat 29 Pos Pamtas yang terdiri dari 1 Pos Kotis, 1 Pos Kout, 4 Pos Koki (SSK), dan 23 Pos Pamtas (SST).</p> <p>b. Dihadapkan pada luas wilayah yang menjadi tanggung jawab pengawasan Satgas Pamtas Yonif 642/Kps, jumlah Pos tersebut kurang memadai.</p> <p>c. Sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas sudah cukup terpenuhi, namun pada beberapa Pos masih terdapat Pos Pamtas yang belum menggunakan sumber listrik yang mencukupi, kemudian juga masih terdapat bangunan Pos Pamtas yang belum permanen dan ada pula yang masih tidak dapat digunakan dikarenakan selalu direndam banjir apabila terjadi hujan. Selain itu, perlu adanya peningkatan sarana transportasi inventaris yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok.</p>
5	<p>Instansi apa saja yang ada di pos Pamtas? Contoh: Bea cukai, Imigrasi, Karantina dan Polri.</p>	<p>Adapun instansi yang berada di wilayah operasi Satgas Pamtas Yonif 642/Kps meliputi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintahan Setempat (Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan Dusun)</li> <li>Kejaksaan Negeri Kab. Sanggau;</li> <li>Kejaksaan Negeri Kab. Bengkayang;</li> <li>Kejaksaan Negeri Kab. Sambas;</li> <li>KPP Bea dan Cukai TMP C Entikong;</li> <li>KPP Bea dan Cukai TMP C Sintete;</li> <li>Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;</li> </ol>

No.	Pertanyaan	Jawaban
		h. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas; i. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong; j. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas I Entikong; k. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Entikong; l. Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Entikong; dan m. Polri.
6	Dalam melaksanakan tugas Satgas Pamtas, TNI harus didukung dengan infrastruktur berupa Gedung/bangunan, alat komunikasi, dll. Apakah hal ini sudah terpenuhi dengan baik? Jika belum, apa upaya yang dilakukan Satgas Pamtas agar dapat melaksanakan tugas secara maksimal?	Beberapa infrastruktur pada Pos Pamtas masih terdapat yang semi permanen namun masih dapat digunakan dengan baik sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok. Akan tetapi, terdapat Pos Pamtas yang bangunannya tidak dapat digunakan akibat selalu direndam banjir apabila terjadi hujan, sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut Satgas Pamtas berkoordinasi dengan pihak Komando Kewilayahan sehingga untuk saat ini Pos Pamtas tersebut menggunakan bangunan Pos Ramil. Pada aspek alat komunikasi masih terdapat beberapa titik lokasi yang tidak terdapat sinyal sama sekali, baik untuk radio maupun telepon genggam/ internet (Blank Spot). Dalam mengatasi kendala tersebut personil pada Pos Pamtas tersebut harus mencari lokasi yang terdapat sinyal komunikasi dengan jarak terdekat $\pm$ 5 km.
7	Infrastruktur apa saja yang perlu dipenuhi oleh pemerintah untuk mendukung tugas Satgas Pamtas?	Adapun salah satu infrastruktur yang pada saat ini perlu untuk dipenuhi maupun ditingkatkan adalah fasilitas berupa bangunan utama Pos serta akses jalan menuju Pos.
8	Terkait UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bagaimana pandangan Bapak tentang implementasinya di lapangan sejak UU tersebut diberlakukan?	Implementasi UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di lapangan sampai dengan saat ini masih dapat dilaksanakan, namun masih perlu ditunjang oleh aturan-aturan lainnya yang belum tercantum dalam UU tersebut.
9	Menurut Bapak apakah peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah berjalan sesuai UU di atas? Kalau	Peran K/L di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Hal tersebut dapat terlaksana dikarenakan sinergitas yang terjalin sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan sesuai yang diamanatkan oleh UU tersebut.

No.	Pertanyaan	Jawaban
	belum, faktor apa saja yang mengakibatkan tidak terimplementasinya UU tersebut?	
10	Bagaimana Bapak melihat ancaman saat ini, baik ancaman militer maupun nonmiliter terutama di wilayah perbatasan? Apakah UU No 3 tahun 2002 masih relevan melihat semakin kompleksnya ancaman, baik global, regional maupun nasional?	Wilayah perbatasan merupakan muka terdepan dari negara yang memiliki tingkat AGHT yang sedemikian kompleks yang paling membahayakan diantaranya adalah penyelundupan senjata maupun munisi dan bahan peledak. Bila dihadapkan dengan UU RI No. 3 Tahun 2002 perlu dilaksanakan pengkajian kembali terhadap relevansinya.
11	Menurut Bapak ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi saat ini, baik militer maupun nonmiliter khususnya di wilayah perbatasan?	Ancaman yang paling berbahaya adalah penyelundupan senjata maupun munisi dan bahan peledak yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang dapat saja digunakan untuk segala kegiatan maupun aktivitas terorisme. Namun demikian, sampai dengan saat ini Satgfas Pamtas Yonif 642/Kps bertugas belum pernah mendapati hal tersebut.
12	Dengan instansi mana saja Bapak sering berkoordinasi terkait pelaksanaan tugas di perbatasan?	Dalam pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan Satgas Pamtas Yonif 642/Kps melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di perbatasan seperti BNPP, Bea dan Cukai, Karantina, Imigrasi dan pihak keamanan yang berada di wilayah perbatasan serta Polri.
13	Menurut pandangan Bapak bagaimana seharusnya K/L di luar bidang pertahanan menyikapi UU No. 3 tahun 2002 terkait semakin meningkatnya ancaman nonmiliter yang terjadi akhir-akhir ini seperti terorisme, bencana alam dan pandemi Covid-19?	Dalam menyikapi UU No. 3 tahun 2002 terkait semakin meningkatnya ancaman nonmiliter yang terjadi akhir-akhir ini seperti terorisme, bencana alam dan pandemi Covid-19, K/L di luar bidang pertahanan hendaknya melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan prosedur yang berlaku di masing-masing instansi dengan secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dengan Satgas yang berada di wilayah perbatasan terutama Satgas Pamtas sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pertahanan negara di wilayah perbatasan.
14	Bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan atau kesiapan K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPP, BPPD dan	Bahwa sampai dengan saat ini Satgas Pamtas Yonif 642/Kps bertugas di wilayah perbatasan, kemampuan K/L di luar bidang pertahanan yang berada di wilayah perbatasan memiliki kesiapan yang cukup baik, dapat dilihat dari segi fasilitas, perlengkapan serta kesejahteraan yang diterima.

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>Pemda Kalbar serta instansi yang ada di PLBN (Customs, Imigration, Quarantine, dan Security/CIQS) dalam menghadapi ancaman nonmiliter tersebut jika dihadapkan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di wilayah perbatasan?</p>	
15	<p>Apa saja hambatan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan tugas maupun koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda dan Polri terkait pelaksanaan tugas di lapangan serta upaya yang dilakukan oleh Satgas Pamtas untuk mengatasi hambatan tersebut?</p>	<p>Hambatan yang dirasakan selama Satgas Pamtas Yonif 642/Kps dalam pelaksanaan tugas diantaranya yaitu kurangnya sarana berupa inventaris kendaraan sehingga dalam pelaksanaannya Satgas Pamtas Yonif 642/Kps berupaya dengan menggunakan kendaraan pribadi yang didapat dari hasil peminjaman kepada masyarakat setempat maupun instansi-instansi yang berada di wilayah perbatasan.</p>
16	<p>Menurut pendapat Bapak, bagaimana kaitan UU No. 3 tahun 2002 dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI terkait OMSP dalam implementasinya di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan? Bagaimana keterkaitan kedua UU tersebut dengan tugas Satgas Pamtas? Apakah Satgas Pamtas melaksanakan tugas sebagai pertahanan militer (OMSP) atau juga melaksanakan tugas pertahanan nirmiliter? Mohon dijelaskan pendapat Bapak.</p>	<p>Berkaitan dengan kedua perundang-undangan tersebut dalam implementasi tugas Satgas Pamtas Yonif 642/Kps dilapangan sangatlah berpengaruh. Sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas sebagai pertahanan militer (OMSP) berupa Pembinaan Teritorial serta Peningkatan Wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat di wilayah perbatasan sehingga diharapkan dapat mewujudkan tujuan pertahanan semesta sesuai dengan amanat kedua perundang-undangan tersebut.</p>
17	<p>Dalam hal penanganan pelanggaran seperti lintas batas, penyelundupan, narkoba, dll., apa upaya yang dilakukan oleh</p>	<p>Dalam setiap penanganan pelanggaran seperti Pelanggaran pelintas batas, penyelundupan barang-barang, penyelundupan hewan/satwa dan penyelundupan narkoba, pihak Satgas Pamtas Yonif 642/Kps memiliki prosedur tetap (Protap)</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Satgas? Apakah ditangani sendiri atau diserahkan ke instansi yang terkait sesuai jenis pelanggarannya? Apakah ada Sistem Operasional Prosedur (SOP), Jukops, Juknik atau panduan tentang penanganan pelanggaran di wilayah perbatasan?	yang sudah dibakukan dan diaplikasikan berupa langkah-langkah penanganan mulai dari pengamanan pada saat kejadian, melaksanakan pemeriksaan singkat/interogasi guna mendapatkan bahan keterangan maupun informasi lanjutan dalam pelaksanaan upaya pencegahan ke depannya, selanjutnya melimpahkan pelaku, barang bukti dan perkara kepada pihak/instansi terkait sesuai dengan bidangnya.
18	Apa yang Bapak lakukan untuk menangani wilayah yang tidak terdapat pos Satgas Pamtas, seperti jalur-jalur tikus atau jalur tidak resmi?	Satgas Pamtas Yonif 642/Kps melaksanakan Patroli secara rutin dan berkelanjutan dan melaksanakan pengetatan serta penyekatan dengan giat pengintaian dan pengendapan guna menangani wilayah-wiyah yang memiliki jalur-jalur tikus atau jalur tidak resmi.
19	Menurus analisis Bapak, pos mana saja yang paling rawan terjadi pelanggaran? Apa penyebab utama pelanggaran yang selama ini terjadi, apakah karena faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum atau legislasi? Mohon dijelaskan pendapat Bapak.	Seluruh wilayah pengawasan Pos Satgas Pamtas Yonif 642/Kps memiliki kerawanan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakkukan oleh oknum masyarakat. Namun dapat kami sampaikan bahwa terdapat 4 titik wilayah pengawasan yang memiliki kerawanann cukup tinggi yaitu, sektor Aruk, Sajingan; Sektor Jagoi Babang, Bengkayang; Sektor Entikong, Sanggau; dan Sektor Sekayam, Sanggau. Berdasarkan hasil interogasi dan pengumpulan bahan keterangan dari para pelaku pelanggaran yang berhasil diamankan oleh Satgas Pamtas Yonif 642/Kps yang menjadi aspek utama para pelaku melakukan pelangggaran adalah faktor ekonomi.
20	Apa saran dan masukan Bapak terkait pelaksanaan tugas Satgas Pamtas dan pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter ke depan, khususnya di wilayah perbatasan?	Adapun saran dan masukan yang dapat kami sampaikan adalah dalam pelaksanaan tugas Satgas Pamtas dan pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter dimana negara kita menggunakan sistem pertahanan semesta maka perlu kiranya pemerintah agar melaksanakan pembangunan serta pemenuhan logistik di pelosok wilayah perbatasan, hal ini dapat mencegah terjadinya pembelotan maupun penghianatan masyarakat (WNI) perbatasan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta secara tersirat dapat menumbuhkan dan memupuk rasa kebangsaan dan nasionalisme yang pada outputnya dapat melaksanakan deteksi dini sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas pokok dari Satgas Pamtas.

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Dalam hal yang berkaitan langsung dengan pertahanan, perlu kiranya didukung sarana dan prasarana yang dapat menunjang atau memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok Satgas Pamtas dihadapkan pada era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Seperti perlunya pembekalan pengoperasian pesawat pengintai tanpa awak (Drone) serta pemenuhan armada/unit Drone tersebut. Hal tersebut penting untuk dipenuhi dikarenakan terdapat beberapa medan yang secara geografis sulit untuk dijangkau. Sehingga apabila hal tersebut dapat dipenuhi, diharapkan Satgas Pamtas nantinya hanya perlu fokus dan fokus pada pelaksanaan tugas pokoknya dan tidak terganggu lagi dengan memikirkan dan melaksanakan upaya-upaya mandiri dalam mengatasi hambatan-hambatan yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh Komando atas.</p>

## Narasumber 10

Narasumber : Indah Permata

Jabatan : Kasubag TU Bela Negara Ditbelneg, Ditjen Pothan,  
Kemhan

Pelaksanaan : Senin, 1 Februari 2021

Metode : Tatap muka

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	<p>Bagaimana Ibu melihat ancaman saat ini, baik ancaman militer maupun nonmiliter?</p> <p>Apakah UU No 3 tahun 2002 masih relevan melihat semakin kompleksnya ancaman, baik global, regional maupun nasional?</p>	<p>Pada tataran kebijakan, UU Nomor 3 Tahun 2002 yang telah dijabarkan ke dalam Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang Jakumhanneg tahun 2020-2021 masih sangat relevan bila dihadapkan dengan kompleksitas ancaman saat ini, baik ancaman militer, nonmiliter maupun hibrida. Karena secara detail jenis ancaman-ancaman tersebut sekaligus penanggung jawab penanganannya telah dijabarkan dalam Perpres tersebut.</p>
2	<p>Menurut Ibu ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi saat ini?</p>	<p>Ancaman yang paling berbahaya saat ini adalah berupa perpecahan antar anak bangsa yang diakibatkan oleh pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.</p>
3	<p>Menurut pandangan Ibu bagaimana seharusnya K/L di luar bidang pertahanan menyikapi UU No. 3 tahun 2002 terkait semakin meningkatnya ancaman nonmiliter yang terjadi akhir-akhir ini seperti terorisme, bencana alam dan pandemi Covid-19?</p>	<p>Seharusnya K/L menurunkan UU tersebut dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga sehingga dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L dalam menghadapi ancaman nonmiliter .</p>
4	<p>Bagaimana pendapat Ibu tentang kemampuan atau kesiapan K/L dalam menghadapi ancaman nonmiliter?</p>	
5	<p>Pedoman Strategis tentang pertahanan nirmiliter yang sudah disusun Kemhan tahun</p>	<p>Setahu saya sosialisasi terhadap Permenhan tersebut sudah dilaksanakan namun karena keterbatasan anggaran maka sosialisasi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	2016 nampaknya belum dipahami oleh K/L. Bagaimana pandangan Ibu tentang hal ini, apa upaya yang dilakukan oleh Kemhan untuk mewujudkan terlaksananya pedoman strategis dimaksud?	

## Narasumber 11

Narasumber : Brigjen TNI Dr. Jubei Levianto, S.Sos., M.M.

Jabatan : Dirbelneg, Ditjen Pothan, Kemhan

Pelaksanaan : Senin, 1 Februari 2021

Metode : Tatap muka

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja hambatan yang Bapak hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda terkait implementasi UU No. 3 tahun 2002 dan Pedoman Strategis tentang pertahanan nirmiliter?	Secara langsung saya tidak terlibat dalam upaya sosialisasi Undang-Undang maupun Permenhan tersebut, namun dari beberapa informasi yang saya dapat memang hambatannya ada di persoalan anggaran. Di samping itu K/L di luar bidang pertahanan kurang antusias untuk membahas tentang pertahanan baik militer maupun nirmiliter karena menurut mereka urusan pertahanan adalah domain Kemhan dan TNI.
2	Apa upaya yang dilakukan oleh Kemhan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Kemhan terus melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan K/L melalui seminar, saresahan, maupun melalui media massa.
3	Menurut Bapak, bagaimana kaitan UU No. 3 tahun 2002 dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI terkait OMSP dalam implementasinya di lapangan?	Berdasarkan UU No.3 Tahun 2002, TNI berperan sebagai Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan sebagai unsur pendukung dalam menghadapi ancaman nonmiliter. UU No.34 Tahun 2004 mengamanatkan tugas TNI dalam OMSP yang hampir mirip dengan ancaman nonmiliter sebagaimana dimaksud pada UU No.3 Tahun 2002.
4	Terkait Jakumhaneg 2020-2024 yang sudah ditandatangani oleh Presiden, apakah ada kebijakan yang harus dilakukan oleh Kemhan untuk mendorong percepatan agar segera menindaklanjuti dalam bentuk peraturan internal, kebijakan atau program kerja K/L sesuai fungsi	Semestinya masing-masing K/L menterjemahkan Perpres tersebut ke dalam program kerja K/L sesuai dengan bidang masing-masing sehingga ancaman nonmiliter yang dimaksudkan dalam Perpres tersebut dapat secara langsung dihadapi oleh K/L terkait. Namun demikian, Kemhan juga perlu melaksanakan sosialisasi / koordinasi kepada seluruh K/L terkait Perpres tersebut.

No.	Pertanyaan	Jawaban
	masing-masing?	
5	Apakah Kemhan mempunyai target tertentu terkait Jakumhaneg tersebut untuk mendorong pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan negara?	Hingga saat ini peran Kemhan untuk mendorong K/L dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan belum terlihat secara nyata karena Kemhan/TNI masih fokus pada ancaman militer. Namun demikian khusus untuk wilayah perbatasan, Kemhan memberikan prioritas dukungan dalam bentuk pengamanan perbatasan yang didukung dengan infrastruktur jalan, alkom, dan pembangunan pos Pamtas.

## Narasumber 12

Narasumber : Priskah, S.H., M.H.

Jabatan : Kabid Kerma, Biro Hukum BNPB

Pelaksanaan : Senin, 8 Februari 2021

Metode : Via zoom

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Ibu pernah mendengar istilah ancaman non militer dan pertahanan nirmiliter?	Pernah, tapi hanya sekilas.
2	Dari mana Ibu mengetahui tentang kedua istilah tersebut?	Berita.
3	Bagaimana pemahaman Ibu tentang kedua istilah tersebut?	Kurang paham.
4	Bagaimana Ibu melihat ancaman nonmiliter saat ini? Apakah menurut Ibu ancaman nonmiliter itu sudah nyata atau benar-benar terjadi saat ini?	Sudah nyata.
5	Bagaimana pendapat Ibu tentang definisi atau konsep ancaman? Menurut Ibu, ancaman apa saja yang paling berbahaya dan yang sering terjadi saat ini?	Ancaman adalah hal yang berpotensi mempengaruhi bahan merubah tatanan / mekanisme keamanan negara.  Ancaman yang berbahaya adalah bioteknologi , bencana dan ancaman lewat budaya.
6	Menurut Ibu bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi ancaman nonmiliter, apakah diserahkan kepada TNI, atau ada kemungkinan lain	Ancaman terhadap negara harus dilakukan bersama dan perlu ada kesadaran kolektif.  Krn kekuatan militer kita tidak setangguh negara maju, jadi perlu ada strategi lain untuk menyadarkan semua pihak.  Serta memaksimalkan ketahanan sipil dan penguatan

No	Pertanyaan	Jawaban
	ditangani oleh K/L dan Pemda atau masyarakat sipil? Mohon Ibu jelaskan pendapat Ibu.	perangkat daerah dan masyarakat dalam menjaga ketahanan negara.
7	Menurut pendapat Ibu, apakah penempatan K/L di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sudah tepat?  Bagaimana dengan penanganan Covid-19, apakah sudah sesuai dengan UU tersebut? Mohon diberikan penjelasan.	Penempatan prajurit TNI di K/L harus sesuai dengan politik Negara yaitu kedalam K/L yang ditentukan dengan Undang-Undang. Dalam hal ini, hal tersebut harus sesuai sebagaimana telah diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI, yaitu pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</li> <li>2. Kementerian Pertahanan</li> <li>3. Sekretaris Militer Presiden</li> <li>4. Badan Intelijen Negara</li> <li>5. Lembaga Sandi Negara</li> <li>6. Lembaga Ketahanan Nasional</li> <li>7. Dewan Pertahanan Nasional</li> <li>8. Badan Search dan Rescue Nasional (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)</li> <li>9. Badan Narkotika Nasional</li> <li>10. Mahkamah Agung</li> </ol> Penanganan Covid sudah sesuai dengan UU , karena berdasarkan UU no 24 tahun 2007, Bencana adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Dimana Covid 19 adalah bencana non alam , hanya BNPB tetap berkoordinasi dengan KL terutama Kementerian Kesehatan sebagai leading Kesehatan, Pertahanan dll terkait penanganan Covid 19 agar program kegiatan penanganan Covid 19 tepat sasaran dan berdaya guna.
8	Apakah Pelaksanaan tugas pokok BNPB dalam penanganan bencana selama ini sudah cukup ideal menurut Ibu?  Bagaimana dengan kesiapan personil, apakah BNPB memiliki SDM atau satuan khusus untuk melaksanakan tugas di lapangan?  Bagaimana pendapat	Pelaksanaan PB yang dikoordinasikan oleh BNPB sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didukung oleh K/L.  Namun demikian implementasinya memang masih banyak yang perlu ditingkatkan.  Selain itu penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak dan perlu kesadaran bersama untuk sigap menjadi masyarakat yang Tangguh krn yang pertama kali menolong adalah kita dan tetangga terdekat. Dalam bidang Pencegahan di BNPB kerap mensosialisasikan destana dan katanan yaitu desa Tangguh bencana dan keluarga Tangguh bencana agar kelompok masyarakat terkecil siap dalam menghadapi kejadian bencana sebelum datang

No	Pertanyaan	Jawaban
	Ibu tentang keterlibatan TNI dalam membantu tugas BNPB?	<p>bantuan dari luar daerah kejadian bencana.</p> <p>Militer dapat memberikan dukungan. namun sesuai dengan UU dan prinsip humanitarian adalah civilian lead.</p> <p>RUU PB di dalam darurat bencana pelibatan SDM TNI/POLRI memang sudah dimasukkan pelibatannya.</p> <p>Dan terkait peran TNI/Polri dalam struktur organisasi, TNI/Polri dikonsider untuk dapat dinominasikan sbagai pimpinan di organisasi PB sebatas Kepala BNPB.</p> <p>Tataran pelaksana di fungsi koordinasi, komando, pelaksana BNPB memberikan kesempatan di jabatan structural tertingdi di Deputi Penanganan Darurat dengan merubah Perpres No. 1 Tahun 2019 tentang BNPB.</p>
9	Apakah BNPB memiliki organisasi vertikal di wilayah perbatasan?	Tidak.
10	Bagaimana pendapat Ibu tentang kesiapan K/L di luar bidang pertahanan seperti BNPB, BNPP dan Pemda, dalam menghadapi ancaman nonmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan?	Kemampuan baik knowledge dan sumberdaya masih perlu ditingkatkan. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas KL melalui ssosialisasi dan workshop terkait ancaman non militer di perbatasan.
11	Apa upaya yang tepat menurut Ibu yang harus dilakukan oleh K/L (BNPP, BNPB dan Pemda Kalbar, dll.) dalam menghadapi ancaman nonmiliter di wilayah perbatasan??	Penguatan penjagaan, personil dan fasilitas pendukung serta pengetahuan tentang ancaman non militer tersebut di ketahanan sipil/daerah dan masyarakat di perbatasan.
12	Dengan K/L atau instansi mana sajakah Ibu paling sering berkoordinasi terkait tugas, khususnya yang ada di wilayah	TNI Polri Kemendagri

No	Pertanyaan	Jawaban
	perbatasan? Contoh: BNPP, TNI, Polri dll. Mohon disebutkan peraturan yang menjadi acuan tugas BNPB di lapangan	UU 24/2007 Perban SKPDB Perban 6 UU
13	Bagaimana Ibu bersinergi dengan K/L tersebut? Contoh: rapat koordinasi, briefing dll.	Koordinasi informal. Koordinasi formal. Mendirikan Posko Bersama.
14	Apa saja hambatan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L lain, termasuk Pemda terkait tugas di wilayah perbatasan?  Adakah conflict of interest dengan instansi lain?	Ego sectoral Karna BNPB tidak punya unit pelaksana teknis di daerah kadang kesulitan dalam komando, sifatnya hanya koordinasi saja. Birokrasi yang Panjang dan kaku padahal sama2 demi negara.
15	Apa upaya yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?	Intens berkoordinasi dan memberikan bantuan yang diperlukan.
16	Apa saran Ibu untuk meningkatkan kinerja BNPB maupun organisasi vertikal dalam melaksanakan tugas di wilayah perbatasan? Misal: perubahan organisasi, penambahan personil, infrastruktur dll	Penguatan organisasi Mendirikan Pusat PB di daerah rawan bencana Penguatan kualitas personil
17	Menurut Ibu, berapa kekuatan ideal organisasi vertikal BNPB di daerah agar dapat melaksanakan tugas secara optimal? Apakah kondisi sekarang sudah memadai?	Kondisi saat ni belum memadai sehingga perlu diperkuat tidak hanya jumlah tapi kualitasnya.  Kekuatannya disesuaikan dengan risiko bencana daerah yang ada.
18	Bagaimana SOP	Belum ada secara spesifik

No	Pertanyaan	Jawaban
	dalam BNPB penanganan bencana di wilayah perbatasan?	
19	Instansi mana saja yang secara signifikan membantu tugas BNPB, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di wilayah perbatasan negara?	Semua Kementerian/Lembaga pemerintahan berperan dan sangat membantu BNPB. Tidak hanya K/L namun juga sinergisitas pentahelix dalam memberikan kesadaran kolektif sangat membantu BNPB untuk menambah ketangguhan Indonesia hadapi bencana.
20	Apa saran Ibu untuk pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter secara umum dan secara khusus di wilayah perbatasan?	

**Lampiran 3 :**  
**Surat Perintah Penetapan Promotor dan Copromotor**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**  
**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

SURAT PERINTAH  
NOMOR : SPRIN/ 1737 /IX/2019

- Pertimbangan** : bahwa dalam rangka kelancaran bimbingan disertasi Mahasiswa Program Doktorat / S3 Ilmu Pertahanan Unhan TA. 2018/ 2019 perlu dikeluarkan Surat Perintah;
- Dasar** : 1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
3. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/149/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan TA. 2019.

**DIPERINTAHKAN:**

- Kepada** : Nama : ) sebagaimana tercantum dalam  
Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP : ) lampiran surat perintah ini  
Jabatan/Kesatuan : )
- Untuk** : 1. Seterimanya surat perintah ini, di samping tugas dan tanggungjawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Pertahanan TA.2018/2019.
2. Melaporkan kepada atasan masing-masing sebelum dan sesudah melaksanakan surat perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Bogor  
pada tanggal 14 September 2019

Rektor  
Universitas Pertahanan,

Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.A.P  
Letnan Jenderal TNI

Tembusan:

1. Warek/Dekan/Kalem Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Karo Unhan.

Lampiran Surat Perintah Rektor Unhan  
 Nomor : SPRIN/ 1737 /IX/2019  
 Tanggal : 19 September 2019

DAFTAR NAMA PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR  
 PROGRAM DOKTORAL ILMU PERTAHANAN TA.2018/2019

NO	NAMA	NIM	JUDUL/TEMA	PROMOTOR	CO-PROMOTOR I	CO-PROMOTOR II
1	Agus Risnadi	220180101001	Penataan Organisasi TNI dalam Membangun Kekuatan Pertahanan Negara (Studi Kasus Pembinaan Personel Manuis (Binpersman) TNI AU Sejak Reformasi hingga 2019)	Prof. Makarim Wibisono, Ph.D	Prof. Dr. Syarifudin Tippe, M.Si	Prof. Dr. S. Pantja Djati, M.Si., M.A
2	Binar Arfa Darumaya	220180101002	Rencana Strategi Pertahanan dalam Menghadapi Ancaman Perang Siber	Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si	Dr. TSL Toruan, M.M., Dipl.S.S	Dr. Yoedhi Swastanto, M.B.A
3	David Yacobus	220180101003	Cyberspace as Battlespace	Prof. Purnomo Yugiartoro, M.A., M.Sc., Ph.D	Dr. Pujo Widodo, M.A., M.D.S., M.Si., M.Si(Han)	Dr. Agus Hasan Reksoprodjo
4	Gerald Theodorus	220180101006	Diplomasi Pertahanan Indonesia Pasca Putusan PCA ( <i>Permanent Court Arbitration</i> ) 2016 Sengketa Laut China Selatan	Prof. Dr. Marsetio, S.Sos., M.M	Dr. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A	Dr. Suhirwan, S.T., M.MT
5	Hendra Anthonius Ginting	220180101007	Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Secara Non Yudisial dalam Perspektif Kemanan Nasional yang Berkepastian Hukum	Prof. Dr. Marsetio, S.Sos., M.M	Prof. DR. Dr. Hafidz Abbas	Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT
6	Juniawan Priyono	220180101009	Perang Semesta	Prof. Makarim Wibisono Ph.D	Dr. I Gede Sumertha, K.Y., P.S.C	Dr. I Wayan Midhio, M.Phil

2

7	Lidia Rina	220180101010	Penegakan Batas Wilayah Udara	Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat	Dr. D.A Mamahit, M.Sc	Dr. Agus Sudarya, S.E., M.M., M.Sc
8	Linus Yoseph Wawan Rukmono	220180101012	Intervensi Makro Ergonomi Dalam Kesiapan Daya Gerak Panser Terhadap Operasi Pertahanan	Prof. Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc., Ph.D	Dr. Sovian Aritonang, S.Si., M.Si	Dr. Jupriyanto, S.T., M.T
9	Mirad Fahri	220180101013	Gliserin Sebagai Bahan Baku Propelan Dalam Rangka Kemandirian Penyediaan Alat dan Peralatan Hankam	Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat	Romie O. Bura, B.Eng. (Hons), M.Raes., Ph.D	Dr. Henry Setiyanto, M.T
10	Priyanto	220180101015	Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Menghadapi Ancaman Terorisme	Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si	Dr. Yusuf Ali S.E., M.M	Dr. Jonni Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc
11	Riska Riskawati	220180101017	Investasi Asing dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia melalui Perspektif Pertahanan	Prof. Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc., Ph.D	Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A	Dr. Herlina JR Saragih, M.Si
12	Saldianoor	220180101018	Perubahan Lahan dengan Penginderaan Jauh	Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si	Prof. Dr. Sobar Sutisna, M.Sc	Dr. Ir. Edy Saptono, M.M
13	Sahrn Gultom	220180101019	Komunikasi Politik dalam Kebijakan Pertahanan	Prof. Dr. Irdam Ahmad, M.Stat	Prof. Anwar Arifin	Dr. Edi Suhardono, S.E., M.A.P
14	Yanda Dwira Firman Z.	220180101020	Model Pengembangan Kawasan Industri Terpadu	Prof. Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc., Ph.D	Romie O. Bura, B.Eng. (Hons), M.Raes., Ph.D	Dr. Drs. Timbul Siahaan, M.M

Rektor  
Universitas Pertahanan,



Dr. Tri Legionosuko, S.I.P., M.A.P  
Letnan Jenderal TNI

**Lampiran 4 :**  
**Dokumentasi *Group Discussion***

**A. FGD 1**



**Paparan Promovendus**

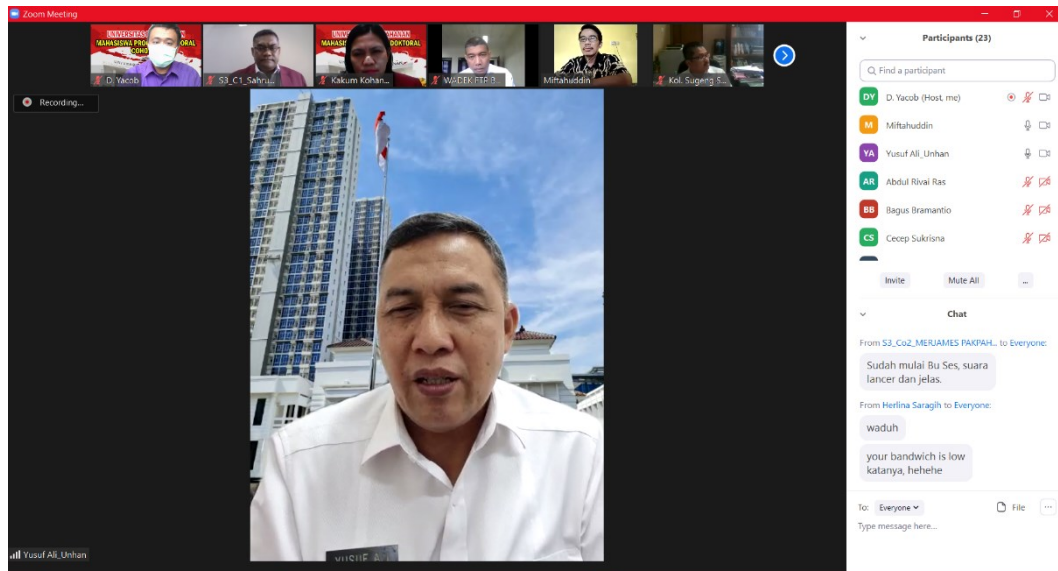
Sumber: Dokumentasi peneliti.



**Penyerahan Buku Karya Narasumber kepada Unhan RI**

Sumber: Dokumentasi peneliti.

## B. RTD



**Pembukaan Giat RTD oleh Kol. Dr. Yusuf Ali**

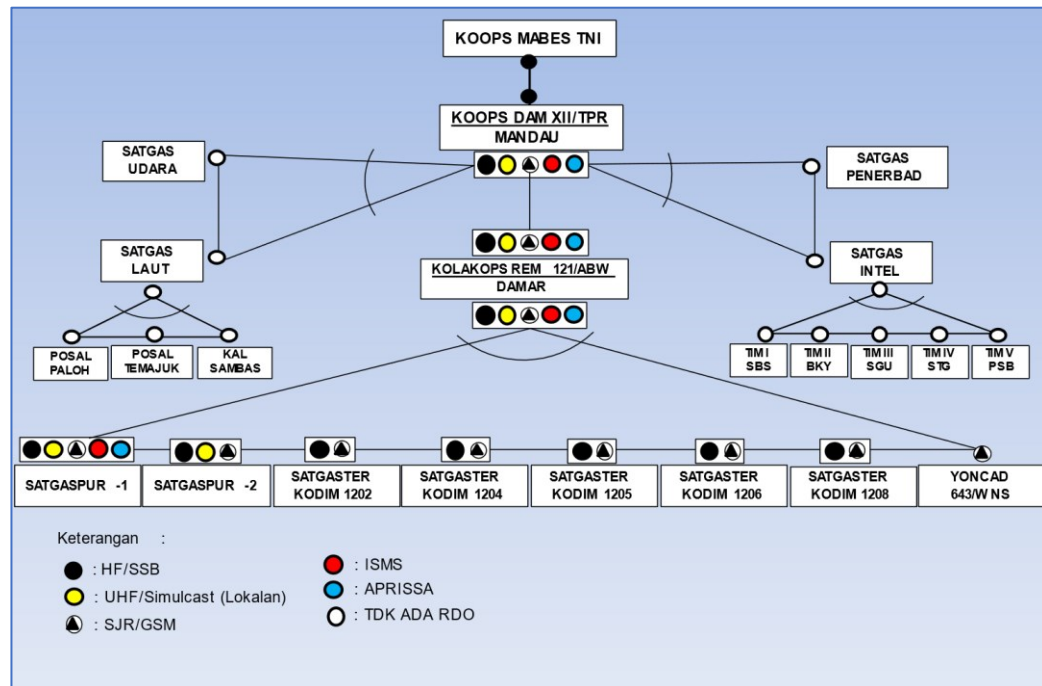
Sumber: Dokumentasi peneliti.



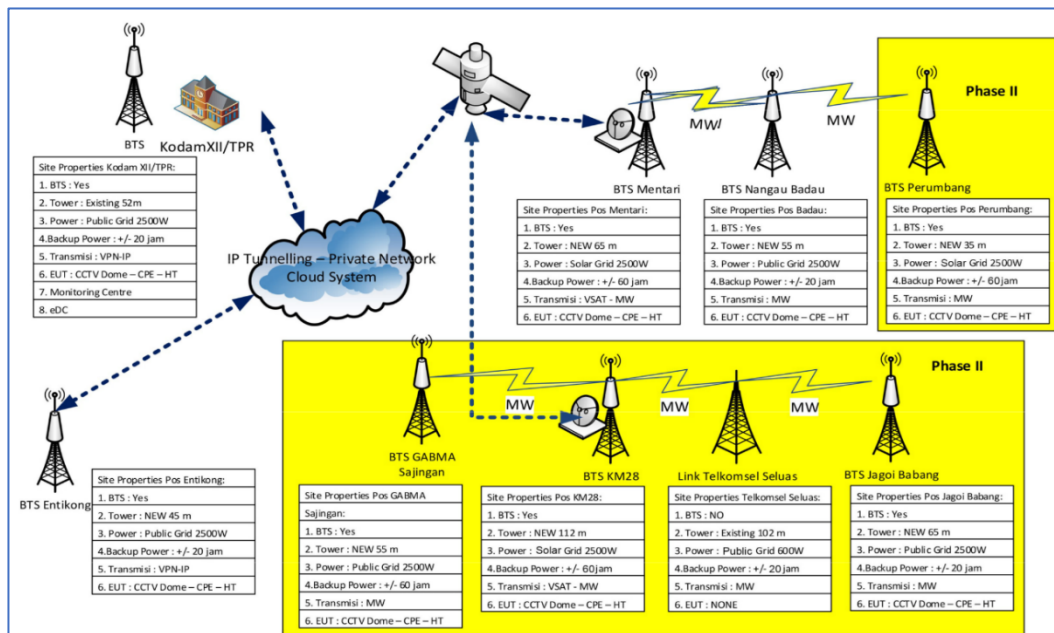
**Paparan oleh Dr. Miftahuddin**

Sumber: Dokumentasi peneliti.

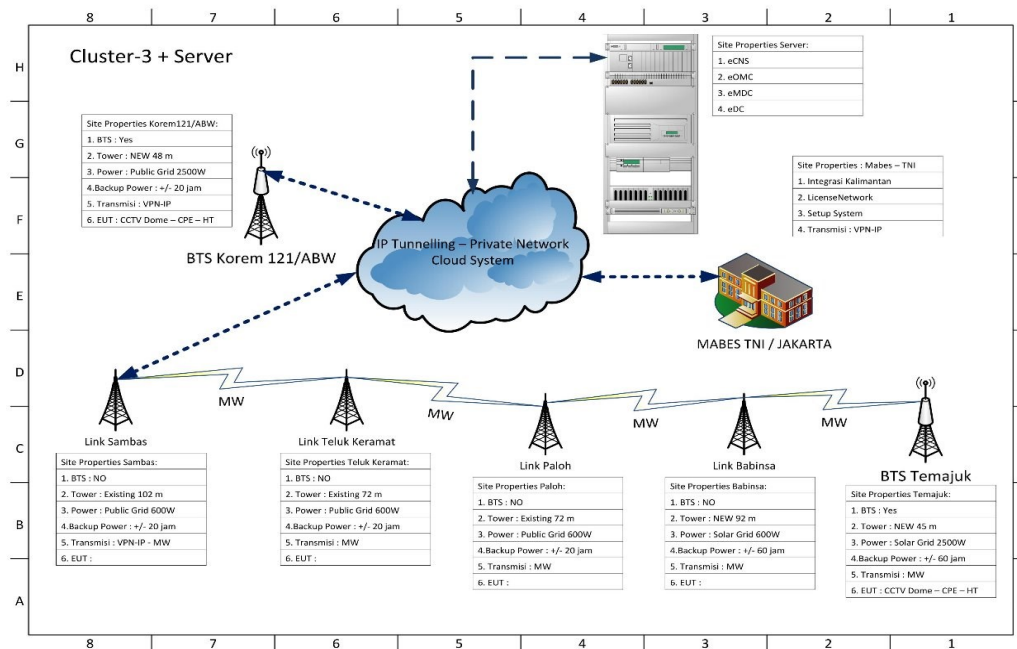
**Lampiran 5 :**  
**Jaringan Komunikasi Radio PAMTAS RI-MALAYSIA**



**Bagan L - 1 Jaringan Komunikasi PAMTAS**



**Bagan L - 2 Jaringan Komunikasi Sektor Kodam XII/TPR**



**Bagan L - 3 Jaringan Komunikasi Perbatasan Berbasis IP**

**Tabel L - 1 Data Jaringan GSM Pos PAMTAS Sektor Barat**

No	Nama Pos	Mode Jaringan	Keterangan
1	KOTIS	4G	STABIL
2	KOUT	4G	SINYAL TIMBUL TENGGELAM
3	SSK 1 SAJINGAN	4G	STABIL
4	POS GABMA BIAWAK		JARINGAN MALAYSIA
5	POS GABMA SAJINGAN	4G	STABIL
6	POS TEMAJUK	GSM	INTERNET TIMBUL TENGGELAM
7	POS SEI BENING	GSM	HANYA BISA TELFON
8	POS SEI TENGAH	TIDAK ADA SINYAL	
9	POS CAMAR BULAN	TIDAK ADA SINYAL	
10	POS SIMPANG 3 LOKPON	2G	SINYAL 2 BAR, TIMBUL TENGGELAM
11	SSK 2 JAGOI BABANG	4G	HARUS PAKAI MODEM
12	POS KM 28	2G	SINYAL TIMBUL TENGGELAM
13	POS BERJONGKONG	3G	TIMBUL TENGGELAM
14	POS KUMBA SEMUNYING	EDGE	INTERNET SUSAH
15	POS SAPARAN	4G	TIMBUL TENGGELAM
16	POS SENTABENG	3G	HARUS KE DAERAH BUKIT
17	POS GUN. ANGGAS	TIDAK ADA SINYAL	
18	POS SIDING	4G	INTERNET SUSAH
19	SSK3 SEI DAUN	4G	SINYAL TIMBUL TENGGELAM
20	POS BANTAN	4G	SINYAL TIMBUL TENGGELAM
21	POS LUBUK TENGAH	4G	STABIL
22	POS SEGUMUM	4G	STABIL
23	POS GUNA BANIR	TIDAK ADA SINYAL	
24	SSK4 BALAI KARANGAN	4G	TEMPAT TEMPAT TERTENTU
25	POS PANGA	4G	SINYAL HANYA 1 BAR
26	POS SERANGKANG	3G/4G	SINYAL TIMBUL TENGGELAM
27	POS ENTABANG	GSM, 4G	BISA TELFON, SINYAL TIMBUL TENGGELAM
28	POS PALAPASANG	4G	INTERNET TIMBUL TENGGELAM TEMPAT TERTENTU
29	POS. GUN. TEMBAWANG	GSM	TIDAK BISA INTERNET, TELPON SUSAH

**Tabel L - 2 Data Jaringan GSM Pos PAMTAS Sektor Timur**

No	Nama Pos	Operator	Jaringan	Keterangan
1	KOTIS BADAU	TELKOMSEL, INDOSAT	4G	Stabil
2	KOUT SENANING	TELKOMSEL, INDOSAT	4G	Kurang Stabil
3	POS GABMA LUBUK ANTU	MAXIS (MALAYSIA)	4G	Stabil
4	KOKI 1 POS MENTARI	TELKOMSEL	4G	Stabil
5	POS KELAWIK	-	-	
6	POS KAPAR	-	-	
7	POS SERIANG	-	-	
8	POS KELADAN	-	-	
9	POS PERUMBANG	TELKOMSEL	4G	Stabil
10	KOKI 2 SEI MAWANG 2	MAXIS (MALAYSIA)	4G	200 m dari Pos
11	POS KANTUK ASAM	TELKOMSEL, INDOSAT	4G	Kurang Stabil
12	POS MERAKAI PANJANG	MAXIS (MALAYSIA)	3G	7 Km dari Pos
13	POS SEI MAWANG I	TELKOMSEL	4G	Kurang Stabil
14	POS LANGAU I	TELKOMSEL	2G	Kurang Stabil
15	POS LANGAU II	TELKOMSEL, MAXIS	2G	500 m dari Pos
16	POS JAUNG	TELKOMSEL, MAXIS	2G	5 Km dari Pos
17	KOKI 3 NANGA BAYAN	TELKOMSEL, MAXIS	3G	1 Km dari Pos atas
18	POS NANGA SERAN	DIGI MALAYSIA	2G	2 Km dari Pos
19	POS TANJUNG LESUNG	-	-	
20	POS SEMAREH	TELKOMSEL	3G	Kurang Stabil
21	POS SEI KELIK	TELKOMSEL	3G	Kurang Stabil
22	POS KAMPUNG JASA	XL	3G	Kurang Stabil
23	POS RIAM SEJAWA	-	-	
24	KOKI 4 SEI BERUANG	TELKOMSEL	3G	2 Km dari Pos
25	POS SEPAN BADAK	-	-	
26	POS MUAKAN	TELKOMSEL	4G	di Pos (Kurang Stabil)
27	POS ENTELI	-	-	
28	POS SEI SERI A/B BATU BALAI	-	-	
29	POS SEI TEKAM	TELKOMSEL	3G	Kurang Stabil

**Lampiran 6 :**  
**Tabel Patok Batas**

**Tabel L - 3 Pra Investigation Refixation Maintenance - Tahun 2019**  
**Desa Badau, Kec. Nanga Badau, Kab. Kapuas Hulu**

No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
1	I499	D	112027.02	241939.87	1.01227	111.86320	BAIK
2	I500	D	112114.69	242208.82	1.01306	111.86561	BAIK
3	I501	C	112020.21	242402.61	1.01220	111.86735	BAIK
4	I502	D	112123.13	242655.53	1.01313	111.86963	BAIK
5	I503	D	112376.25	242602.6	1.01542	111.86915	BAIK
6	I504	D	112470.78	242812.36	1.01627	111.87104	RUSAK
7	I505	D	112496.97	242783.57	1.01651	111.87078	HILANG
8	I506	D	112800.19	242962.23	1.01925	111.87239	RUSAK
9	I507	D	112949.94	243013.14	1.02061	111.87284	BAIK
10	I508	D	113110.25	242943.96	1.02206	111.87222	BAIK
11	I509	D	113077.48	243071.65	1.02176	111.87337	BAIK
12	I510	D	113187	243056.57	1.02275	111.87323	BAIK
13	I511	D	113364.51	242956.75	1.02357	111.87256	BAIK
14	I512	D	113656.04	242975.02	1.02699	111.87250	BAIK
15	I513	D	113666.33	243345.9	1.02709	111.87584	BAIK
16	I514	D	113879.69	243482.1	1.02902	111.87706	BAIK
17	I516	D	114200.79	243417.41	1.03192	111.87648	BAIK
18	I517	D	114425.67	243407.31	1.03395	111.87639	BAIK
19	I518	D	114682.34	243308.31	1.03628	111.87550	RUSAK
20	I519	D	114861.57	243353.14	1.03790	111.87591	RUSAK
21	I520	D	115056.94	243000.65	1.03967	111.87274	BAIK
22	I521	D	115332.2	242140.89	1.04215	111.87400	BAIK
23	I522	D	115412.92	242912.34	1.04289	111.87195	BAIK

24	I523	C	115660.22	242804.96	1.04512	111.87099	BAIK
25	I524	D	115721.43	242870.83	1.04568	111.87158	BAIK
26	I525	D	115796.69	242943.27	1.04636	111.87223	BAIK
27	I526	D	115973.08	242905.44	1.04795	111.87189	BAIK
28	I527	D	116024.97	243054.81	1.04842	111.87323	BAIK
29	I528	D	116189.88	243056.8	1.04991	111.87325	BAIK
30	I529	D	116187.83	243373.06	1.04989	111.87609	RUSAK
31	I530	D	116218.95	243547.24	1.05017	111.87766	RUSAK
32	I531	D	116237.54	243680.9	1.05034	111.87886	BAIK
33	I532	D	116397.18	243470.53	1.05179	111.87697	RUSAK
34	I533	D	116623.89	243533.12	1.05384	111.87753	RUSAK
35	I534	D	116645.8	243651.13	1.05403	111.87859	RUSAK
36	I535	D	116617.82	243828.78	1.05378	111.88019	BAIK
37	I536	D	116745.91	244018.84	1.05495	111.88190	BAIK
38	I537	D	116850.18	243956.87	1.05588	111.88134	BAIK
39	I538	D	117024.56	243981.69	1.05746	111.88157	BAIK
40	I539	D	117274.64	244047.64	1.05972	111.88216	BAIK
41	I540	D	117308.85	244308.46	1.06003	111.88450	BAIK
42	I541	D	117444.51	244474.42	1.06125	111.88600	BAIK
43	I542	D	117619.85	244253.85	1.06284	111.88401	BAIK
44	I543	D	117763.37	244130.7	1.06414	111.88291	BAIK
45	I544	D	117850.32	244073.42	1.06493	111.88239	BAIK
46	I545	D	117915.28	243918.87	1.06551	111.88101	BAIK
47	I546	D	118116.18	243985.53	1.06733	111.88161	BAIK
48	I547	D	118265.12	243990.49	1.06868	111.88165	BAIK
49	I548	D	118346.2	244157.59	1.06941	111.88315	BAIK
50	I549	D	118489.29	244147.56	1.07070	111.88306	BAIK

**PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) -  
TAHUN 2019 DESA BADAU, KEC. NANGA BADAU, KAB.**

KAPUAS HULU							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
51	I550	D	118716.45	244211.75	1.07276	111.88364	BAIK
52	I551	D	118850.4	244419.24	1.07397	111.88551	BAIK
53	I552	D	119048.81	224447.15	1.07576	111.88576	BAIK
54	I553	D	119222.68	244494.98	1.07734	111.88619	BAIK
55	I554	D	119370.48	244577.87	1.07867	111.88693	BAIK
56	I555	D	119356.42	244744.53	1.07854	111.88843	BAIK
57	I556	D	119161.7	244865.76	1.07678	111.88952	BAIK
58	I557	D	119117.15	245000.86	1.07638	111.89073	BAIK
59	I558	D	118879.99	245165.7	1.07423	111.89221	BAIK
60	I559	D	118761	245214.64	1.07316	111.89265	BAIK
61	I560	D	118827.72	245336.66	1.07376	111.89375	RUSAK
62	I561	D	119045.84	245401.74	1.07573	111.89434	BAIK
63	I562	D	119008.43	245603.43	1.07539	111.89615	RUSAK
64	I563	D	119048.07	245717.99	1.07575	111.89718	RUSAK
65	I564	D	119062.2	245838.46	1.07588	111.89826	RUSAK
66	I564/1	D	119007.71	246017.78	1.07538	111.89987	BAIK
67	I565	C	118954.64	246094.71	1.07490	111.90056	BAIK
68	I566	D	118917.88	246278.34	1.07457	111.90221	RUSAK
69	I567	D	119048.4	246278.52	1.07575	111.90306	BAIK
70	I568	D	119070.12	246583.21	1.07595	111.90495	RUSAK
71	I569	D	119342.78	246685.27	1.07841	111.90587	RUSAK
72	I570	D	119365.69	246685.4	1.07862	111.90789	RUSAK
73	I571	D	119311.94	247013.07	1.07813	111.90882	BAIK
74	I572	D	119583.3	247233.73	1.08058	111.91080	BAIK
75	I573	D	119850.34	247277.7	1.08300	111.91120	BAIK
76	I574	D	120036.44	247133.66	1.08468	111.90990	RUSAK
77	I575	D	120136.36	246914.02	1.08559	111.90793	RUSAK
78	I576	D	120156.26	247084.24	1.08577	111.90946	RUSAK
79	I577	D	120300.98	247212.4	1.08708	111.91061	BAIK
80	I578	D	120285.51	247409.77	1.08694	111.91239	BAIK

81	I579	D	120386.5	247535.75	1.08785	111.91352	BAIK
82	I580	D	120591.49	247497.48	1.08970	111.91318	BAIK
83	I581	D	120732.3	247487.73	1.09098	111.91309	BAIK
84	I582	D	120758.73	247673.01	1.09121	111.91475	BAIK
85	I583	D	120688.04	247858.04	1.09057	111.91642	BAIK
86	I584	D	120805.29	247155.01	1.09157	111.91899	BAIK
87	I585	D	120618.48	247258.9	1.08988	111.91992	BAIK
88	I586	D	120814.62	247407.06	1.09165	111.92125	BAIK
89	I587	D	120764.28	248631.55	1.09126	111.92337	BAIK
90	I588	D	120921.64	248634.94	1.09268	111.92340	BAIK
91	I589	D	120902.3	248892.35	1.09251	111.92571	BAIK
92	I590	D	120712.79	248977.9	1.09079	111.92648	BAIK



PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA KEKURAK, KEC. NANGA BADAU, KAB. KAPUAS HULU							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
1	I482	D	110103.9	239092.39	0.99488	111.83760	BAIK
2	I483	D	110080.83	239378.13	0.99467	111.84017	BAIK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA KEKURAK, KEC. NANGA BADAU, KAB. KAPUAS HULU							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
3	I484	D	110232.7	239582.53	0.99605	111.84200	BAIK
4	I485	D	110433.54	239572.46	0.99786	111.84191	BAIK
5	I486	D	110489.26	239766.11	0.99837	111.84366	BAIK
6	I487	D	110576.38	239962.34	0.99915	111.84542	BAIK
7	I488	D	110688.5	240160.14	1.00017	111.84720	BAIK
8	I489	D	110799.11	240444.87	1.00117	111.84976	BAIK
9	I490	D	110954.92	240640.63	1.00257	111.85152	BAIK
10	I491	D	110933.95	240881.52	1.00238	111.85368	BAIK
11	I492	D	110995.63	241103.54	1.00294	111.85568	BAIK
12	I493	D	111061.12	241256.52	1.00353	111.85705	BAIK
13	I494	D	111103.8	241522.83	1.00392	111.85944	BAIK
14	I495	D	111318.15	241531.96	1.00586	111.85953	BAIK
15	I496	D	111550.01	241563.33	1.00795	111.85981	BAIK
16	I497	D	111704.39	241723.78	1.00935	111.86125	BAIK
17	I498	D	111821.75	241721.89	1.01041	111.86124	BAIK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA SERIANG, KEC. NANGA BADAU, KAB. KAPUAS HULU							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi

1	I591	D	120730.66	249254.46	1.09095	111.92896	BAIK
2	I592	D	120954.71	249086.81	1.09298	111.92746	BAIK
3	I593	D	121107.81	249126.59	1.09436	111.92782	BAIK
4	I594	D	121239.75	249246.7	1.09556	111.92890	RUSAK
5	I595	D	121409.72	249156.49	1.09709	111.92809	BAIK
6	I596	D	121554.73	249183.23	1.09841	111.92833	BAIK
7	I597	D	121706.19	249354.31	1.09978	111.92987	BAIK
8	I598	D	121920.4	249390.4	1.10171	111.93019	BAIK
9	I599	D	122139.04	249634.35	1.10369	111.93239	BAIK
10	I600	D	122312.38	249781.61	1.10526	111.93371	BAIK
11	I601	D	122484.17	249827.97	1.10681	111.93413	BAIK
12	I602	D	122750.42	249902.86	1.10922	111.93480	RUSAK
<b>PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA LANGAU, KEC. PURING KENCANA, KAB. KAPUAS HULU</b>							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
1	I50/91	D	105533.673	204947.24	0.95368	111.53076	BAIK
2	I50/92	D	105538.009	204972.979	0.95372	111.53100	BAIK
3	I51	C	105550	205041.24	0.95383	111.53161	BAIK
4	I52	D	105644.42	205240.18	0.95468	111.53343	BAIK
5	I53	D	105787.38	205433.96	0.95598	111.53514	BAIK
6	I54	D	105695.88	205880.92	0.95508	111.53915	BAIK
7	I55	D	105580.44	206043.1	0.95410	111.54061	BAIK
8	I56	D	105421.41	206217.64	0.95266	111.54218	BAIK
9	I57	D	105254.18	206284.85	0.95115	111.54278	BAIK
10	I58	D	105063.28	206431.91	0.94940	111.54408	BAIK
11	I59	D	104995.05	206683.33	0.94878	111.54638	BAIK
12	I60	D	104885.39	206754.44	0.94779	111.54698	RUSAK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA LANGAU, KEC. PURING KENCANA, KAB. KAPUAS HULU							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
13	I61	D	104816.42	206888.71	0.94716	111.54818	HILANG
14	I62	D	104847.68	207260.32	0.94747	111.55148	BAIK
15	I63	D	104074.46	207164.05	0.94952	111.55068	RUSAK
16	I64	D	105236.04	207039.23	0.95098	111.54956	BAIK
17	I65	D	105266.74	206883.04	0.95126	111.54816	BAIK
18	I66	D	105402	206871.55	0.95249	111.54806	BAIK
19	I67	D	105620.8	206684.99	0.95447	111.54638	BAIK
20	I68	D	105669.92	206860.29	0.95491	111.54796	RUSAK
21	I69	D	105770.52	207065.26	0.95582	111.54980	RUSAK
22	I70	D	105747.54	207165.27	0.95561	111.55070	BAIK
23	I71	D	105842.43	207195.6	0.95647	111.55097	BAIK
24	I72	D	106003.51	207116.76	0.95793	111.55026	BAIK
25	I73	D	106008.68	207256.53	0.95797	111.55152	BAIK
26	I74	D	106213.27	207228.74	0.95982	111.55127	BAIK
27	I75	D	106284.4	207169.5	0.96047	111.55074	BAIK
28	I76	D	106365.33	207191.45	0.96120	111.55093	BAIK
29	I77	D	106393.13	207136.63	0.96145	111.55044	BAIK
30	I78	D	106545.62	207150.52	0.96283	111.55057	BAIK
31	I79	D	106614.31	207280.56	0.96345	111.55173	BAIK
32	I80	D	106728.31	207438.06	0.96448	111.55315	BAIK
33	I81	D	106929.58	207107.04	0.96630	111.55018	BAIK
34	I82	D	107049.25	206987.23	0.96739	111.54910	RUSAK
35	I83	D	107124.61	207000.26	0.96807	111.54922	BAIK
36	I84	D	107248.52	207164.66	0.96919	111.55070	BAIK
37	I85	D	107409.64	207080.55	0.97064	111.54994	BAIK
38	I86	D	107625.65	207121.22	0.97260	111.55031	BAIK
39	I87	D	107871.89	207138.91	0.97483	111.55047	BAIK
40	I88	D	107929.48	206967.07	0.97535	111.54892	BAIK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. BALAIKARANGAN, KAB. SANGGAU							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
1	G395	D	96132.33	102840.31	0.86886	110.61324	BAIK
2	G396	D	96049.16	102929.73	0.86811	110.61404	BAIK
3	G397	D	96037.37	103125.76	0.86800	110.61581	BAIK

4	G398	D	95944.38	103303.02	0.86716	110.61740	BAIK
5	G399	D	95831.4	103600.75	0.86614	110.62008	BAIK
6	G400	D	95820.66	103711.84	0.86604	110.62107	BAIK
7	G401	D	96030.37	103846.29	0.86794	110.62228	BAIK
8	G402	C	96165.74	103987.38	0.86916	110.62355	BAIK
9	G403	D	96179.59	104134.82	0.86929	110.62487	BAIK
10	G404	D	96138.85	104297.03	0.86892	110.62633	BAIK
11	G405	D	96155.53	104572.2	0.86907	110.62883	BAIK
12	G406	D	96403.75	104397.66	0.87132	110.62724	BAIK
13	G407	D	93203.76	104575.83	0.87222	110.62884	BAIK
14	G408	D	96644.44	104721.73	0.87349	110.63015	BAIK
15	G409	D	96859.48	104762.61	0.87544	110.63052	BAIK
16	G410	D	96728.94	104902.63	0.87426	110.63177	BAIK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. BALAIKARANGAN, KAB. SANGGAU							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
17	G411	D	96808.89	105079.79	0.87498	110.63337	BAIK
18	G412	D	96903.23	105274.76	0.87583	110.63512	BAIK
19	G413	D	97035.04	105269.41	0.87702	110.63507	BAIK
20	G414	D	97211.25	105312.52	0.87862	110.63546	BAIK
21	G415	D	97374.71	105459.96	0.88010	110.63678	BAIK
22	G416	D	97452.39	105351	0.88080	110.63580	BAIK
23	G417	D	97613.62	105314.55	0.88226	110.63548	BAIK
24	G418	D	97629.68	105117.43	0.88240	110.63371	BAIK
25	G419	D	97698.83	105040.91	0.88303	110.63302	BAIK
26	G420	D	97749.57	104983.12	0.88349	110.63250	BAIK
27	G421	D	97951.55	105093.5	0.88531	110.63349	BAIK
28	G422	D	98051.64	105225.56	0.88622	110.63468	BAIK
29	G423	D	98335.46	105393.63	0.88879	110.63619	BAIK
30	G424	D	98447.7	105255.72	0.88980	110.63495	BAIK
31	G425	D	98545.2	105308.81	0.89068	110.63543	BAIK
32	G426	D	98666.17	105259.84	0.89178	110.63499	BAIK
33	G427	D	98825.11	105246.61	0.89322	110.63487	BAIK
34	G428	D	98894.23	105140.34	0.89384	110.63391	BAIK
35	G429	D	98992.51	105002.95	0.89473	110.63268	BAIK
36	G430	D	99083.21	105078.65	0.89555	110.63336	BAIK
37	G431	D	99015.21	105222.56	0.89494	110.63465	BAIK
38	G432	D	98929.46	105359.99	0.89416	110.63589	BAIK
39	G433	D	98826.79	105504.93	0.89323	110.63719	BAIK
40	G434	D	98732.01	105614.62	0.89237	110.63817	BAIK
41	G435	D	98885.51	105764.16	0.89376	110.63952	BAIK
42	G436	D	99013.32	105929.9	0.89492	110.64101	BAIK
43	G437	D	99011.89	106053.84	0.89490	110.64215	BAIK
44	G438	D	99118.7	106079.11	0.89587	110.64235	BAIK
45	G439	D	99320.89	106168.25	0.89770	110.64315	BAIK

46	G440	D	99274.61	106388.32	0.89728	110.64513	BAIK
47	G441	D	99351.47	106506.6	0.89798	110.64619	BAIK
48	G442	D	99582.52	106576.56	0.90007	110.64682	BAIK
49	G443	D	99819.03	106726.1	0.90221	110.64816	BAIK
50	G444	D	99900.36	106856.82	0.90294	110.64934	BAIK
51	G445	D	99950.88	107108.17	0.90340	110.65160	BAIK
52	G446	C	99887.87	107146.22	0.90283	110.65194	BAIK
53	G447	D	99760.1	107139.94	0.90167	110.65188	BAIK
54	G448	D	99660.23	107127.2	0.90077	110.65177	BAIK
55	G449	D	99572.26	106990.15	0.89997	110.65054	BAIK
56	G450	D	99397.3	106956.3	0.89839	110.65023	BAIK
57	G451	D	99377.29	106934.69	0.89821	110.64914	BAIK
58	G452	D	99217.84	106794.76	0.89677	110.64878	BAIK
59	G453	D	99149.26	106697.06	0.89615	110.64790	BAIK
60	G454	D	99051.16	106770.08	0.89526	110.64856	BAIK
61	G455	D	98901.59	106939.5	0.89391	110.65008	BAIK
62	G456	D	98769.53	106863.74	0.89271	110.64940	BAIK
63	G457	D	98574.16	106910.72	0.89094	110.64982	BAIK
64	G458	D	98529.89	107084.6	0.89054	110.65138	BAIK
65	G459	D	98651.14	107162.23	0.89164	110.65208	BAIK
66	G460	D	98746.36	107100.14	0.89250	110.65224	BAIK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. BALAIKARANGAN, KAB. SANGGAU							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
67	G461	D	98873.82	107213.32	0.89365	110.65254	BAIK
68	G462	D	98780.12	167355.25	0.89277	110.65382	BAIK
69	G463	D	98596.81	107449.26	0.89115	110.65466	BAIK
70	G464	D	98430.85	107362.14	0.88965	110.65388	BAIK
71	G465	D	98290.59	107412.46	0.88838	110.65433	BAIK
72	G466	D	98159.62	107378.31	0.88719	110.65402	BAIK
73	G467	D	98002.39	107306.39	0.88577	110.65338	BAIK
74	G468	D	97914.74	107328.04	0.88498	110.65357	BAIK
75	G469	D	97742.76	107317.95	0.88342	110.65348	BAIK
76	G470	D	97666.45	107196.74	0.88273	110.65239	BAIK
77	G471	D	97482.26	107200.18	0.88107	110.65242	BAIK
78	G472	D	97385.68	107095.6	0.88019	110.65148	BAIK
79	G473	D	97279.36	107115.08	0.87923	110.65166	BAIK
80	G474	D	97101.91	107147.49	0.87770	110.65186	HILANG
81	G475	D	96893.52	107332.01	0.87575	110.65360	BAIK
82	G476	D	96998.32	107501.7	0.87669	110.65513	BAIK
83	G477	D	96888.33	107668.21	0.87570	110.65663	BAIK
84	G478	D	96723.3	107839.87	0.87420	110.65817	BAIK
85	G479	D	96521.51	107857.22	0.87238	110.65832	BAIK
86	G480	D	96376.18	107928.94	0.87106	110.65897	BAIK
87	G481	D	96315.7	108190.81	0.87052	110.66132	BAIK
88	G482	D	96320.46	108297.22	0.87056	110.66228	BAIK
89	G483	D	96646.23	108395.58	0.87350	110.66316	BAIK
90	G484	D	96694.79	108667.12	0.87394	110.66560	HILANG
91	G485	D	96805.87	108749.33	0.87495	110.66634	BAIK
92	G486	D	96844.08	108957.82	0.87529	110.66821	BAIK
93	G487	D	96841.93	109055.53	0.87527	110.66909	BAIK
94	G488	D	96893.84	109183.45	0.87574	110.67024	BAIK

95	G489	D	97092.39	109230.42	0.87754	110.67066	BAIK
96	G490	D	97050.34	109357.43	0.87716	110.67180	BAIK
97	G491	D	96944.99	109452.73	0.87621	110.67266	BAIK
98	G492	D	97040.64	109633.73	0.87707	110.67429	BAIK
99	G493	D	97180.07	109702.64	0.87833	110.67491	BAIK
100	G494	D	97099.05	109819.15	0.87760	110.67595	BAIK
101	G495	D	96950.32	109752.73	0.87625	110.67536	BAIK
102	G496	D	96873.2	109670.86	0.87556	110.67462	BAIK
103	G497	D	96846.84	109860.92	0.87532	110.67633	BAIK
104	G498	D	96677.11	109850.46	0.87378	110.67623	BAIK
105	G499	D	96581.73	119069.54	0.87292	110.67820	BAIK
106	G500	D	96467.13	110115.44	0.87188	110.67861	BAIK
107	G501	D	96473.57	110260.8	0.87197	110.67992	BAIK
108	G502	D	96325.43	110402.79	0.87060	110.68120	BAIK
109	G503	D	96149.49	110363.39	0.86901	110.68084	BAIK
110	G504	D	96020.08	110633.49	0.86784	110.68327	BAIK
111	G505	D	96139.47	110739.78	0.86892	110.68422	BAIK
112	G506	D	96147.91	110873.3	0.86899	110.68542	BAIK
113	G507	D	96303.5	110992.93	0.87040	110.68641	BAIK
114	G508	D	96219.3	111078.24	0.86964	110.68727	BAIK
115	G509	D	96126.01	111168.38	0.86880	110.68808	BAIK
116	G510	D	95930.26	111170.44	0.86703	110.68809	BAIK

**PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) -  
TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. BALAIKARANGAN, KAB.  
SANGGAU**

No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
117	G511	D	95691.74	111184.1	0.86487	110.68822	BAIK
118	G512	D	95641.48	111293.7	0.86441	110.68920	BAIK
119	G513	D	95534.7	111417.13	0.86345	110.69031	BAIK
120	G514	D	95517.71	111559.13	0.86329	110.69159	BAIK
121	G515	D	95623.94	111669.91	0.86425	110.69258	BAIK
122	G516	D	95541.53	111896.28	0.86351	110.69462	BAIK

123	G517	D	95657.39	112066.53	0.86456	110.69615	BAIK
124	G518	D	96013.97	112045.48	0.86778	110.69596	BAIK
125	G519	D	96041.32	112238.26	0.86803	110.69769	BAIK
126	G520	D	96217.44	112383.65	0.86962	110.69900	BAIK
127	G521	D	96466.4	112413.04	0.87187	110.69926	BAIK
128	G522	D	96613.82	112399.94	0.87321	110.69914	BAIK
129	G523	D	96769.44	112104.26	0.87462	110.69649	BAIK
130	G524	C	97017.96	112039.2	0.87686	110.69590	BAIK
131	G525	D	97138.96	112218.22	0.87796	110.69751	BAIK
132	G526	D	97369.56	112270.14	0.88004	110.69798	BAIK
133	G527	D	97505.14	112221.87	0.88127	110.69754	BAIK
134	G528	D	97641.84	112140.36	0.88251	110.69681	BAIK
135	G529	D	97825.56	112233.77	0.88417	110.69765	HILANG
136	G530	D	97888.91	112375.84	0.88474	110.69893	BAIK
137	G531	D	97989.83	112518.16	0.88565	110.70021	BAIK
138	G532	D	97991.8	112669.15	0.88567	110.70156	BAIK
139	G533	D	98075.95	112802.95	0.88643	110.70277	RUSAK
140	G534	D	98268.07	112764.74	0.88817	110.70242	RUSAK
141	G535	D	98505.54	112959.35	0.89032	110.70417	BAIK
142	G536	D	98629.22	112989.2	0.89144	110.70444	BAIK
143	G537	D	98724.02	113186.7	0.89238	110.70621	BAIK
144	G538	D	98847.53	113280.62	0.89341	110.70706	BAIK
145	G539	D	98943.02	113490.98	0.89427	110.70895	BAIK
146	G540	D	99133	113537.64	0.89599	110.70937	BAIK
147	G541	D	99253.43	113641.52	0.89708	110.71030	BAIK
148	G542	D	99187.87	113808.14	0.89649	110.71180	BAIK
149	G543	D	99394.45	113940.81	0.89836	110.71299	BAIK
150	G544	D	99519.95	114022.44	0.89949	110.71373	BAIK
151	G545	D	99838.4	114069.45	0.90237	110.71415	BAIK
152	G546	D	100100.09	114227.47	0.90474	110.71557	BAIK
153	G547	D	100247.94	114310.9	0.90608	110.71632	BAIK
154	G548	D	100195.6	114478.52	0.90560	110.71782	BAIK
155	G549	D	100110.7	114599.12	0.90483	110.71891	BAIK
156	G550	D	100152.89	114178.46	0.90523	110.72005	BAIK
157	G551	D	100186.69	114965.58	0.90552	110.72130	BAIK

158	G552	D	100343.73	114902.05	0.90694	110.72163	BAIK
159	G553	D	100378.32	115162.61	0.90725	110.72397	BAIK
160	G554	D	100293.22	115272.5	0.90648	110.72496	BAIK
161	G555	D	100208.97	115400.78	0.90572	110.72611	BAIK
162	G556	D	100390.9	115550.52	0.90737	110.72746	BAIK
163	G557	D	100416.53	115735.14	0.90760	110.72912	BAIK
164	G558	D	100359.4	115899.2	0.90708	110.73059	BAIK
165	G559	D	100395.13	116003.72	0.90741	110.73153	BAIK
166	G560	D	100319.24	116221.21	0.90672	110.73348	BAIK

**PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) -  
TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. BALAIKARANGAN, KAB.  
SANGGAU**

No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
167	G561	B	100399.82	116363.13	0.90736	110.73476	BAIK
168	G562	D	100268.4	116389.46	0.90626	110.73500	BAIK
169	G563	D	100275.71	116570.62	0.90632	110.73662	BAIK
170	G564	D	100171.84	116842.79	0.90538	110.73907	BAIK
171	G565	D	100048.15	116875.38	0.90427	110.73964	BAIK
172	G566	D	99956.45	117099.4	0.90344	110.74137	BAIK
173	G567	D	100016.28	117391.78	0.90398	110.74400	BAIK
174	G568	D	100025.14	117606.54	0.90406	110.74593	BAIK
175	G569	D	99937.23	117883.12	0.90326	110.74842	BAIK
176	G570	D	99738.95	117888.56	0.90147	110.74847	BAIK
177	G571	D	99547.14	118063.01	0.89973	110.75003	BAIK
178	G572	D	99505.24	118336.41	0.89935	110.75249	BAIK
179	G573	D	99497.44	118689.55	0.89928	110.75566	BAIK
180	G574	D	99721.2	118898.72	0.90131	110.75754	BAIK
181	G575	D	99955.05	119021.16	0.90342	110.75892	BAIK
182	G576	D	100212.81	119122.6	0.90575	110.75955	BAIK
183	G577	D	100313.16	119346	0.90666	110.76156	BAIK
184	G578	D	100386.84	119508.8	0.90733	110.76302	BAIK
185	G579	D	100485.66	119711.21	0.90822	110.76484	BAIK

186	G580	D	100709.19	119762.25	0.91023	110.76530	BAIK
187	G581	D	100972.6	119529.58	0.91262	110.76321	BAIK
188	G582	D	101308.76	119512.29	0.91567	110.76306	BAIK
189	G583	D	101489.97	119401.69	0.91730	110.76206	BAIK
190	G584	D	101541.31	119225.18	0.91777	110.76048	BAIK
191	G585	D	101632.84	119230.14	0.91860	110.76052	BAIK
192	G586	D	101738	119236.55	0.91955	110.76058	RUSAK
193	G587	D	101881.33	119302.06	0.92084	110.76117	BAIK
194	G588	D	102164.8	119373.69	0.92341	110.76181	BAIK
195	G589	D	102233.66	119610.95	0.92403	110.76395	BAIK
196	G590	D	102288.67	119708.53	0.92453	110.76482	BAIK
197	G591	D	102436.58	119741.46	0.92587	110.76512	BAIK
198	G592	D	102648	119743.07	0.92778	110.76513	HILANG
199	G593	D	102840.84	119810.69	0.92952	110.76574	BAIK
200	G594	C	102941.23	119979.09	0.93043	110.76725	BAIK
201	G595	D	103075.42	120136.52	0.93163	110.76867	BAIK
202	G596	D	103139.41	120451.22	0.93222	110.77150	HILANG
203	G597	D	103067.16	120693.41	0.93157	110.77367	HILANG
204	G598	D	103029.93	120814.81	0.93123	110.77476	HILANG
205	G599	D	102954.65	121069.75	0.93055	110.77705	HILANG
206	G600	D	102717.23	121179.43	0.92840	110.77804	HILANG
207	G601	D	102560.69	121255.55	0.92699	110.77872	HILANG
208	G602	D	102475.24	121467	0.92621	110.78062	HILANG
209	G603	D	102232.55	121495.47	0.92402	110.78088	HILANG
210	G604	D	101933.71	121573.38	0.92132	110.78158	HILANG
211	G605	D	101628.95	121681.25	0.91856	110.78255	HILANG
212	G606	D	101432.716	121803	0.91678	110.78364	HILANG
213	G607	D	101310.82	121729.1	0.91568	110.78298	HILANG
214	G608	D	101179.36	121907.79	0.91449	110.78368	BAIK
215	G609	D	100953.68	121830.26	0.91245	110.78389	HILANG
216	G610	D	100873.22	122058.09	0.91172	110.78593	BAIK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. BALAIKARANGAN, KAB. SANGGAU							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
217	G611	D	100911.89	122243.88	0.91207	110.78760	HILANG
218	G612	D	100935.29	122506.77	0.91228	110.78996	HILANG
219	G613	D	100733.09	122691.79	0.91045	110.79163	BAIK
220	G614	C	100472.54	122708.62	0.90810	110.79178	BAIK
221	G615	D	100338.29	122967.16	0.90688	110.79410	HILANG
222	G616	D	100325.95	123102.2	0.90677	110.79531	BAIK
223	G617	D	100219.83	123231.93	0.90581	110.79648	BAIK
224	G618	D	100380.5	123523.36	0.90726	110.79910	BAIK
225	G619	D	100118.07	123748.04	0.90489	110.80112	BAIK
226	G620	D	99092.39	123940.11	0.90285	110.80284	RUSAK
227	G621	D	99644.85	123981.05	0.90061	110.80321	BAIK
228	G622	D	99601.44	124178.36	0.90022	110.80498	HILANG
229	G623	D	99551.39	124353.63	0.89976	110.80659	HILANG
PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. KETUNGAU HULU, KAB. SINTANG							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
1	G395	D	96132.33	102840.31	0.86886	110.61324	BAIK
2	G396	D	96049.16	102929.73	0.86811	110.61404	BAIK
3	G397	D	96037.37	103125.76	0.86800	110.61581	BAIK
4	G398	D	95944.38	103303.02	0.86716	110.61740	BAIK
5	G399	D	95831.4	103600.75	0.86614	110.62008	BAIK
6	G400	D	95820.66	103711.84	0.86604	110.62107	BAIK
7	G401	D	96030.37	103846.29	0.86794	110.62228	BAIK
8	G402	C	96165.74	103987.38	0.86916	110.62355	BAIK
9	G403	D	96179.59	104134.82	0.86929	110.62487	BAIK
10	G404	D	96138.85	104297.03	0.86892	110.62633	BAIK

11	G405	D	96155.53	104572.2	0.86907	110.62883	BAIK
12	G406	D	96403.75	104397.66	0.87132	110.62724	BAIK
13	G407	D	93203.76	104575.83	0.87222	110.62884	BAIK
14	G408	D	96644.44	104721.73	0.87349	110.63015	BAIK
15	G409	D	96859.48	104762.61	0.87544	110.63052	BAIK
16	G410	D	96728.94	104902.63	0.87426	110.63177	BAIK
17	G411	D	96808.89	105079.79	0.87498	110.63337	BAIK
18	G412	D	96903.23	105274.76	0.87583	110.63512	BAIK
19	G413	D	97035.04	105269.41	0.87702	110.63507	BAIK
20	G414	D	97211.25	105312.52	0.87862	110.63546	BAIK
21	G415	D	97374.71	105459.96	0.88010	110.63678	BAIK
22	G416	D	97452.39	105351	0.88080	110.63580	BAIK
23	G417	D	97613.62	105314.55	0.88226	110.63548	BAIK
24	G418	D	97629.68	105117.43	0.88240	110.63371	BAIK
25	G419	D	97698.83	105040.91	0.88303	110.63302	BAIK
26	G420	D	97749.57	104983.12	0.88349	110.63250	BAIK
27	G421	D	97951.55	105093.5	0.88531	110.63349	BAIK
28	G422	D	98051.64	105225.56	0.88622	110.63468	BAIK
29	G423	D	98335.46	105393.63	0.88879	110.63619	BAIK
30	G424	D	98447.7	105255.72	0.88980	110.63495	BAIK
31	G425	D	98545.2	105308.81	0.89068	110.63543	BAIK

**PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) -  
TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. KETUNGAU HULU, KAB.  
SINTANG**

No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
32	G426	D	98666.17	105259.84	0.89178	110.63499	BAIK
33	G427	D	98825.11	105246.61	0.89322	110.63487	BAIK
34	G428	D	98894.23	105140.34	0.89384	110.63391	BAIK
35	G429	D	98992.51	105002.95	0.89473	110.63268	BAIK
36	G430	D	99083.21	105078.65	0.89555	110.63336	BAIK
37	G431	D	99015.21	105222.56	0.89494	110.63465	BAIK
38	G432	D	98929.46	105359.99	0.89416	110.63589	BAIK
39	G433	D	98826.79	105504.93	0.89323	110.63719	BAIK

40	G434	D	98732.01	105614.62	0.89237	110.63817	BAIK
41	G435	D	98885.51	105764.16	0.89376	110.63952	BAIK
42	G436	D	99013.32	105929.9	0.89492	110.64101	BAIK
43	G437	D	99011.89	106053.84	0.89490	110.64215	BAIK
44	G438	D	99118.7	106079.11	0.89587	110.64235	BAIK
45	G439	D	99320.89	106168.25	0.89770	110.64315	BAIK
46	G440	D	99274.61	106388.32	0.89728	110.64513	BAIK
47	G441	D	99351.47	106506.6	0.89798	110.64619	BAIK
48	G442	D	99582.52	106576.56	0.90007	110.64682	BAIK
49	G443	D	99819.03	106726.1	0.90221	110.64816	BAIK
50	G444	D	99900.36	106856.82	0.90294	110.64934	BAIK
51	G445	D	99950.88	107108.17	0.90340	110.65160	BAIK
52	G446	C	99887.87	107146.22	0.90283	110.65194	BAIK
53	G447	D	99760.1	107139.94	0.90167	110.65188	BAIK
54	G448	D	99660.23	107127.2	0.90077	110.65177	BAIK
55	G449	D	99572.26	106990.15	0.89997	110.65054	BAIK
56	G450	D	99397.3	106956.3	0.89839	110.65023	BAIK
57	G451	D	99377.29	106934.69	0.89821	110.64914	BAIK
58	G452	D	99217.84	106794.76	0.89677	110.64878	BAIK
59	G453	D	99149.26	106697.06	0.89615	110.64790	BAIK
60	G454	D	99051.16	106770.08	0.89526	110.64856	BAIK
61	G455	D	98901.59	106939.5	0.89391	110.65008	BAIK
62	G456	D	98769.53	106863.74	0.89271	110.64940	BAIK
63	G457	D	98574.16	106910.72	0.89094	110.64982	BAIK
64	G458	D	98529.89	107084.6	0.89054	110.65138	BAIK
65	G459	D	98651.14	107162.23	0.89164	110.65208	BAIK
66	G460	D	98746.36	107100.14	0.89250	110.65224	BAIK
67	G461	D	98873.82	107213.32	0.89365	110.65254	BAIK
68	G462	D	98780.12	167355.25	0.89277	110.65382	BAIK
69	G463	D	98596.81	107449.26	0.89115	110.65466	BAIK
70	G464	D	98430.85	107362.14	0.88965	110.65388	BAIK
71	G465	D	98290.59	107412.46	0.88838	110.65433	BAIK
72	G466	D	98159.62	107378.31	0.88719	110.65402	BAIK
73	G467	D	98002.39	107306.39	0.88577	110.65338	BAIK
74	G468	D	97914.74	107328.04	0.88498	110.65357	BAIK

75	G469	D	97742.76	107317.95	0.88342	110.65348	BAIK
76	G470	D	97666.45	107196.74	0.88273	110.65239	BAIK
77	G471	D	97482.26	107200.18	0.88107	110.65242	BAIK
78	G472	D	97385.68	107095.6	0.88019	110.65148	BAIK
79	G473	D	97279.36	107115.08	0.87923	110.65166	BAIK
80	G474	D	97101.91	107147.49	0.87770	110.65186	HILANG
81	G475	D	96893.52	107332.01	0.87575	110.65360	BAIK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. KETUNGAU HULU, KAB. SINTANG							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
82	G476	D	96998.32	107501.7	0.87669	110.65513	BAIK
83	G477	D	96888.33	107668.21	0.87570	110.65663	BAIK
84	G478	D	96723.3	107839.87	0.87420	110.65817	BAIK
85	G479	D	96521.51	107857.22	0.87238	110.65832	BAIK
86	G480	D	96376.18	107928.94	0.87106	110.65897	BAIK
87	G481	D	96315.7	108190.81	0.87052	110.66132	BAIK
88	G482	D	96320.46	108297.22	0.87056	110.66228	BAIK
89	G483	D	96646.23	108395.58	0.87350	110.66316	BAIK
90	G484	D	96694.79	108667.12	0.87394	110.66560	HILANG
91	G485	D	96805.87	108749.33	0.87495	110.66634	BAIK
92	G486	D	96844.08	108957.82	0.87529	110.66821	BAIK
93	G487	D	96841.93	109055.53	0.87527	110.66909	BAIK
94	G488	D	96893.84	109183.45	0.87574	110.67024	BAIK
95	G489	D	97092.39	109230.42	0.87754	110.67066	BAIK
96	G490	D	97050.34	109357.43	0.87716	110.67180	BAIK
97	G491	D	96944.99	109452.73	0.87621	110.67266	BAIK
98	G492	D	97040.64	109633.73	0.87707	110.67429	BAIK
99	G493	D	97180.07	109702.64	0.87833	110.67491	BAIK
100	G494	D	97099.05	109819.15	0.87760	110.67595	BAIK
101	G495	D	96950.32	109752.73	0.87625	110.67536	BAIK

102	G496	D	96873.2	109670.86	0.87556	110.67462	BAIK
103	G497	D	96846.84	109860.92	0.87532	110.67633	BAIK
104	G498	D	96677.11	109850.46	0.87378	110.67623	BAIK
105	G499	D	96581.73	119069.54	0.87292	110.67820	BAIK
106	G500	D	96467.13	110115.44	0.87188	110.67861	BAIK
107	G501	D	96473.57	110260.8	0.87197	110.67992	BAIK
108	G502	D	96325.43	110402.79	0.87060	110.68120	BAIK
109	G503	D	96149.49	110363.39	0.86901	110.68084	BAIK
110	G504	D	96020.08	110633.49	0.86784	110.68327	BAIK
111	G505	D	96139.47	110739.78	0.86892	110.68422	BAIK
112	G506	D	96147.91	110873.3	0.86899	110.68542	BAIK
113	G507	D	96303.5	110992.93	0.87040	110.68641	BAIK
114	G508	D	96219.3	111078.24	0.86964	110.68727	BAIK
115	G509	D	96126.01	111168.38	0.86880	110.68808	BAIK
116	G510	D	95930.26	111170.44	0.86703	110.68809	BAIK
117	G511	D	95691.74	111184.1	0.86487	110.68822	BAIK
118	G512	D	95641.48	111293.7	0.86441	110.68920	BAIK
119	G513	D	95534.7	111417.13	0.86345	110.69031	BAIK
120	G514	D	95517.71	111559.13	0.86329	110.69159	BAIK
121	G515	D	95623.94	111669.91	0.86425	110.69258	BAIK
122	G516	D	95541.53	111896.28	0.86351	110.69462	BAIK
123	G517	D	95657.39	112066.53	0.86456	110.69615	BAIK
124	G518	D	96013.97	112045.48	0.86778	110.69596	BAIK
125	G519	D	96041.32	112238.26	0.86803	110.69769	BAIK
126	G520	D	96217.44	112383.65	0.86962	110.69900	BAIK
127	G521	D	96466.4	112413.04	0.87187	110.69926	BAIK
128	G522	D	96613.82	112399.94	0.87321	110.69914	BAIK
129	G523	D	96769.44	112104.26	0.87462	110.69649	BAIK
130	G524	C	97017.96	112039.2	0.87686	110.69590	BAIK
131	G525	D	97138.96	112218.22	0.87796	110.69751	BAIK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) -

TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. KETUNGAU HULU, KAB. SINTANG							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
132	G526	D	97369.56	112270.14	0.88004	110.69798	BAIK
133	G527	D	97505.14	112221.87	0.88127	110.69754	BAIK
134	G528	D	97641.84	112140.36	0.88251	110.69681	BAIK
135	G529	D	97825.56	112233.77	0.88417	110.69765	HILANG
136	G530	D	97888.91	112375.84	0.88474	110.69893	BAIK
137	G531	D	97989.83	112518.16	0.88565	110.70021	BAIK
138	G532	D	97991.8	112669.15	0.88567	110.70156	BAIK
139	G533	D	98075.95	112802.95	0.88643	110.70277	RUSAK
140	G534	D	98268.07	112764.74	0.88817	110.70242	RUSAK
141	G535	D	98505.54	112959.35	0.89032	110.70417	BAIK
142	G536	D	98629.22	112989.2	0.89144	110.70444	BAIK
143	G537	D	98724.02	113186.7	0.89238	110.70621	BAIK
144	G538	D	98847.53	113280.62	0.89341	110.70706	BAIK
145	G539	D	98943.02	113490.98	0.89427	110.70895	BAIK
146	G540	D	99133	113537.64	0.89599	110.70937	BAIK
147	G541	D	99253.43	113641.52	0.89708	110.71030	BAIK
148	G542	D	99187.87	113808.14	0.89649	110.71180	BAIK
149	G543	D	99394.45	113940.81	0.89836	110.71299	BAIK
150	G544	D	99519.95	114022.44	0.89949	110.71373	BAIK
151	G545	D	99838.4	114069.45	0.90237	110.71415	BAIK
152	G546	D	100100.09	114227.47	0.90474	110.71557	BAIK
153	G547	D	100247.94	114310.9	0.90608	110.71632	BAIK
154	G548	D	100195.6	114478.52	0.90560	110.71782	BAIK
155	G549	D	100110.7	114599.12	0.90483	110.71891	BAIK
156	G550	D	100152.89	114178.46	0.90523	110.72005	BAIK
157	G551	D	100186.69	114965.58	0.90552	110.72130	BAIK
158	G552	D	100343.73	114902.05	0.90694	110.72163	BAIK
159	G553	D	100378.32	115162.61	0.90725	110.72397	BAIK
160	G554	D	100293.22	115272.5	0.90648	110.72496	BAIK
161	G555	D	100208.97	115400.78	0.90572	110.72611	BAIK

162	G556	D	100390.9	115550.52	0.90737	110.72746	BAIK
163	G557	D	100416.53	115735.14	0.90760	110.72912	BAIK
164	G558	D	100359.4	115899.2	0.90708	110.73059	BAIK
165	G559	D	100395.13	116003.72	0.90741	110.73153	BAIK
166	G560	D	100319.24	116221.21	0.90672	110.73348	BAIK
167	G561	B	100399.82	116363.13	0.90736	110.73476	BAIK
168	G562	D	100268.4	116389.46	0.90626	110.73500	BAIK
169	G563	D	100275.71	116570.62	0.90632	110.73662	BAIK
170	G564	D	100171.84	116842.79	0.90538	110.73907	BAIK
171	G565	D	100048.15	116875.38	0.90427	110.73964	BAIK
172	G566	D	99956.45	117099.4	0.90344	110.74137	BAIK
173	G567	D	100016.28	117391.78	0.90398	110.74400	BAIK
174	G568	D	100025.14	117606.54	0.90406	110.74593	BAIK
175	G569	D	99937.23	117883.12	0.90326	110.74842	BAIK
176	G570	D	99738.95	117888.56	0.90147	110.74847	BAIK
177	G571	D	99547.14	118063.01	0.89973	110.75003	BAIK
178	G572	D	99505.24	118336.41	0.89935	110.75249	BAIK
179	G573	D	99497.44	118689.55	0.89928	110.75566	BAIK
180	G574	D	99721.2	118898.72	0.90131	110.75754	BAIK
181	G575	D	99955.05	119021.16	0.90342	110.75892	BAIK

**PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM)  
TAHUN 2019 DESA SEI TEKAM, KEC. KETUNGAU HULU,  
KAB. SINTANG**

No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
182	G576	D	100212.81	119122.6	0.90575	110.75955	BAIK
183	G577	D	100313.16	119346	0.90666	110.76156	BAIK
184	G578	D	100386.84	119508.8	0.90733	110.76302	BAIK
185	G579	D	100485.66	119711.21	0.90822	110.76484	BAIK
186	G580	D	100709.19	119762.25	0.91023	110.76530	BAIK
187	G581	D	100972.6	119529.58	0.91262	110.76321	BAIK
188	G582	D	101308.76	119512.29	0.91567	110.76306	BAIK
189	G583	D	101489.97	119401.69	0.91730	110.76206	BAIK

190	G584	D	101541.31	119225.18	0.91777	110.76048	BAIK
191	G585	D	101632.84	119230.14	0.91860	110.76052	BAIK
192	G586	D	101738	119236.55	0.91955	110.76058	RUSAK
193	G587	D	101881.33	119302.06	0.92084	110.76117	BAIK
194	G588	D	102164.8	119373.69	0.92341	110.76181	BAIK
195	G589	D	102233.66	119610.95	0.92403	110.76395	BAIK
196	G590	D	102288.67	119708.53	0.92453	110.76482	BAIK
197	G591	D	102436.58	119741.46	0.92587	110.76512	BAIK
198	G592	D	102648	119743.07	0.92778	110.76513	HILANG
199	G593	D	102840.84	119810.69	0.92952	110.76574	BAIK
200	G594	C	102941.23	119979.09	0.93043	110.76725	BAIK
201	G595	D	103075.42	120136.52	0.93163	110.76867	BAIK
202	G596	D	103139.41	120451.22	0.93222	110.77150	HILANG
203	G597	D	103067.16	120693.41	0.93157	110.77367	HILANG
204	G598	D	103029.93	120814.81	0.93123	110.77476	HILANG
205	G599	D	102954.65	121069.75	0.93055	110.77705	HILANG
206	G600	D	102717.23	121179.43	0.92840	110.77804	HILANG
207	G601	D	102560.69	121255.55	0.92699	110.77872	HILANG
208	G602	D	102475.24	121467	0.92621	110.78062	HILANG
209	G603	D	102232.55	121495.47	0.92402	110.78088	HILANG
210	G604	D	101933.71	121573.38	0.92132	110.78158	HILANG
211	G605	D	101628.95	121681.25	0.91856	110.78255	HILANG
212	G606	D	101432.716	121803	0.91678	110.78364	HILANG
213	G607	D	101310.82	121729.1	0.91568	110.78298	HILANG
214	G608	D	101179.36	121907.79	0.91449	110.78368	BAIK
215	G609	D	100953.68	121830.26	0.91245	110.78389	HILANG
216	G610	D	100873.22	122058.09	0.91172	110.78593	BAIK
217	G611	D	100911.89	122243.88	0.91207	110.78760	HILANG
218	G612	D	100935.29	122506.77	0.91228	110.78996	HILANG
219	G613	D	100733.09	122691.79	0.91045	110.79163	BAIK
220	G614	C	100472.54	122708.62	0.90810	110.79178	BAIK
221	G615	D	100338.29	122967.16	0.90688	110.79410	HILANG
222	G616	D	100325.95	123102.2	0.90677	110.79531	BAIK
223	G617	D	100219.83	123231.93	0.90581	110.79648	BAIK
224	G618	D	100380.5	123523.36	0.90726	110.79910	BAIK

225	G619	D	100118.07	123748.04	0.90489	110.80112	BAIK
226	G620	D	99092.39	123940.11	0.90285	110.80284	RUSAK
227	G621	D	99644.85	123981.05	0.90061	110.80321	BAIK
228	G622	D	99601.44	124178.36	0.90022	110.80498	HILANG
229	G623	D	99551.39	124353.63	0.89976	110.80659	HILANG

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA SUNGAI SERIA, KEC. KETUNGAU HULU, KAB. SINTANG							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
1	G662	D	104555.43	125422.05	0.94502	110.81622	BAIK
2	G663	D	104648.47	125652.77	0.94587	110.81824	HILANG
3	G664	D	104809.2	125844.54	0.94732	110.81996	BAIK
4	G665	D	105059.43	125936.23	0.94958	110.82079	BAIK
5	G666	D	105251.1	125993.27	0.95132	110.82130	BAIK
6	G667	D	105398.86	126112.15	0.95265	110.82237	BAIK
7	G668	D	105551.78	126209.18	0.95403	110.82324	BAIK
8	G669	C	105449.24	126472.99	0.95310	110.82561	HILANG
9	G670	D	105380.1	126668.66	0.95248	110.82737	HILANG
10	G671	D	105298.84	126847.06	0.95175	110.82897	BAIK
11	G672	D	105222.94	127130.14	0.95106	110.83152	BAIK
12	G673	D	105290.46	127404.75	0.95167	110.83398	BAIK
13	G674	D	105249.39	127853.42	0.95130	110.83801	BAIK
14	G675	D	105293.28	128017.21	0.95169	110.83949	BAIK
15	G676	D	105334.41	128065.6	0.95207	110.83992	BAIK
16	G677	D	105421.67	128143.46	0.95286	110.84062	BAIK
17	G678	D	105383.52	128388.25	0.95251	110.84282	BAIK
18	G679	D	105469.22	128660.69	0.95328	110.84527	HILANG
19	G680	D	105622.16	128875.71	0.95452	110.84709	HILANG
20	G681	D	105605.95	129088.31	0.95452	110.84911	BAIK
21	G682	D	105496.17	129293.19	0.95353	110.85095	BAIK
22	G683	D	105374.35	129545.49	0.95243	110.85322	HILANG

23	G684	D	105167.63	129746.56	0.95056	110.85503	HILANG
24	G684/1	D	105145.8	129895.88	0.95036	110.85637	HILANG
25	G685	D	105122.47	130132.75	0.95015	110.85850	HILANG
26	G686	D	105250.58	130433.55	0.95130	110.86120	BAIK
27	G687	D	105498.41	130213.55	0.95355	110.85922	HILANG
28	G688	D	105832.27	130418.56	0.95657	110.86107	HILANG
29	G689	D	106163.9	130506.53	0.95957	110.86186	HILANG
30	G690	D	106452.89	130497.71	0.96218	110.86178	BAIK
31	H1	B	106807.35	130599.86	0.96539	110.86270	BAIK
32	H2	D	106794	130744.84	0.96526	110.86400	HILANG
33	H3	D	106778.16	130922.63	0.96512	110.86560	HILANG
34	H4	D	106831.93	131017.85	0.96561	110.86645	BAIK
35	H5	D	106850.15	131133.86	0.96577	110.86749	BAIK

**PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019**  
**DESA MUNGGUIK GELOMBANG, KEC. KETUNGAU TENGAH,**  
**KAB. SINTANG**

No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
1	I50/59	D	106274.155	203779.105	0.96039	111.52027	BAIK
2	I50/60	D	106230.694	203777.431	0.95999	111.52026	BAIK
3	I50/61	D	106186.407	203780.64	0.95959	111.52028	BAIK
4	I50/62	D	106150.685	203818.325	0.95932	111.52062	RUSAK
5	I50/63	D	106113.715	203817.147	0.95893	111.52061	BAIK
6	I50/64	D	106085.825	203856.636	0.95868	111.52097	BAIK
7	I50/65	D	106048.56	203854.689	0.95835	111.52095	BAIK
8	I50/66	D	106015.997	203904.082	0.95805	111.52139	BAIK
9	I50/67	D	105974.728	203394.728	0.95768	111.52167	RUSAK

**PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019**  
**DESA MUNGGUIK GELOMBANG, KEC. KETUNGAU TENGAH,**

KAB. SINTANG							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
10	I50/68	D	105968.794	203970.139	0.95762	111.52199	BAIK
11	I50/69	D	105936.206	204013.289	0.95733	111.52237	BAIK
12	I50/70	D	105878.924	204008.816	0.95681	111.52233	BAIK
13	I50/71	D	105825.24	204033	0.95632	111.52255	BAIK
14	I50/72	D	105792.067	204047.703	0.95602	111.52268	BAIK
15	I50/73	D	105770.426	204098.439	0.95583	111.52314	BAIK
16	I50/74	D	105756.008	204127.089	0.95570	111.52340	BAIK
17	I50/75	D	105742.35	204165.287	0.95557	111.52374	BAIK
18	I50/76	D	105771.242	204201.467	0.95584	111.52406	BAIK
19	I50/77	D	105780.912	204266.24	0.95592	111.52465	BAIK
20	I50/78	D	105774.682	204320.839	0.95587	111.52514	BAIK
21	I50/79	D	105758.629	204356.066	0.95572	111.52545	BAIK
22	I50/80	D	105747.61	204389.5	0.95562	111.52575	BAIK
23	I50/81	D	105724.114	204439.316	0.95541	111.52620	BAIK
24	I50/82	D	105726.677	204471.421	0.95534	111.52649	BAIK
25	I50/83	D	105709.515	204497.696	0.95528	111.52673	BAIK
26	I50/84	D	105718.089	204539.153	0.95535	111.52710	BAIK
27	I50/85	D	105684.864	204476.963	0.95505	111.52744	BAIK
28	I50/86	D	105659.145	204647.699	0.95482	111.52807	BAIK
29	I50/87	D	105614.306	204715.119	0.95441	111.52868	BAIK
30	I50/88	D	105609.478	204753.828	0.95437	111.52903	BAIK
31	I50/89	D	105580.541	204830.182	0.95411	111.52971	BAIK
32	I50/90	D	105551.511	204875.478	0.95385	111.53012	BAIK
<b>PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA NANGA KELAPAN, KEC. KETUNGAU TENGAH, KAB. SINTANG</b>							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
1	I50	D	109532.677	203309.956	0.98986	111.51607	BAIK

2	I50/1	D	109442.063	203334.863	0.98904	111.51629	BAIK
3	I50/2	D	109363.219	203360.653	0.98833	111.51652	BAIK
4	I50/3	D	109278.458	203370.742	0.98756	111.51661	BAIK
5	I50/4	D	109207.722	203387.171	0.98692	111.51676	BAIK
6	I50/5	D	109150.22	203370.178	0.98640	111.51661	BAIK
7	I50/6	D	109100.017	203358.649	0.98595	111.51650	BAIK
8	I50/7	D	109027.063	203364.769	0.98529	111.51650	BAIK
9	I50/8	D	108966.76	203370.009	0.98474	111.51660	BAIK
10	I50/9	D	108904.097	203372.523	0.98418	111.51663	BAIK
11	I50/10	D	108852.37	203333.195	0.98371	111.51627	BAIK
12	I50/11	D	108794.446	203304.566	0.98318	111.51602	BAIK
13	I50/12	D	108737.644	203280.166	0.98267	111.51580	BAIK
14	I50/13	D	108681.258	203255.832	0.98216	111.51558	BAIK
15	I50/14	D	108609.923	203235.741	0.98151	111.51540	BAIK
16	I50/15	D	108560.372	203219.439	0.98107	111.51525	BAIK
17	I50/16	D	108512.41	203225.425	0.98063	111.51530	BAIK
18	I50/17	D	108427.826	203240.264	0.97987	111.51544	BAIK
19	I50/18	D	108394.748	203248.287	0.97957	111.51551	HILANG
20	I50/19	D	108374.904	203270.286	0.97939	111.51571	BAIK
21	I50/20	D	108332.382	203316.679	0.97900	111.51612	BAIK

PRA INVESTIGATION REFIXATION MAINTENANCE (PRA IRM) - TAHUN 2019 DESA NANGA KELAPAN, KEC. KETUNGAU TENGAH, KAB. SINTANG							
No	Nama Pilar	Tipe Pilar	Koordinat RSO (Datum Timbalay)		Koordinat Geografis (Datum WGS 84)		Kondisi
			x (m)	y (m)	Lintang	Bujur	Kondisi
22	I50/21	D	108296.451	203348.734	0.97868	111.51641	BAIK
23	I50/22	D	108247.205	203335.817	0.97823	111.51635	BAIK
24	I50/23	D	108204.28	203338.262	0.97785	111.51632	HILANG
25	I50/24	D	108131.88	203312.644	0.97719	111.51609	RUSAK
26	I50/25	D	108046.018	203329.23	0.97641	111.51623	BAIK
27	I50/26	D	107992.003	203338.81	0.97593	111.51632	HILANG
28	I50/27	D	107959.838	203318.487	0.97563	111.51614	HILANG
29	I50/28	D	107911.955	203304.158	0.97520	111.51601	BAIK

30	I50/29	D	107849.118	203270.278	0.97463	111.51570	HILANG
31	I50/30	D	107796.987	203279.057	0.97416	111.51578	BAIK
32	I50/31	D	107729.569	203344.88	0.97355	111.51637	BAIK
33	I50/32	D	107667.166	203327.703	0.97299	111.51622	HILANG
34	I50/33	D	107588.544	203341.109	0.97228	111.51634	HILANG
35	I50/34	D	107503.641	203369.378	0.97151	111.51659	BAIK
36	I50/35	D	107439.33	203405.99	0.97093	111.51692	BAIK
37	I50/36	D	107408.244	203405.879	0.97065	111.51708	BAIK
38	I50/37	D	107336.347	203463.157	0.96999	111.51744	BAIK
39	I50/38	D	107274.927	203512.522	0.96944	111.51788	BAIK
40	I50/39	D	107201.735	203536.264	0.96878	111.51809	BAIK
41	I50/40	D	107126.103	203519.556	0.96809	111.51794	HILANG
42	I50/41	D	107067.802	203493.661	0.96757	111.51771	BAIK
43	I50/42	D	107024.871	203501.224	0.96718	111.51776	BAIK
44	I50/43	D	106980.876	203511.771	0.96678	111.51787	BAIK
45	I50/44	D	106933.177	203527.228	0.96635	111.51801	HILANG
46	I50/45	D	106870.363	203565.343	0.96578	111.51835	HILANG
47	I50/46	D	106823.686	203605.372	0.96536	111.51871	BAIK
48	I50/47	D	106784.486	203610.782	0.96500	111.51876	BAIK
49	I50/48	D	106744.242	203626.572	0.96464	111.51890	BAIK
50	I50/49	D	106705.423	203637.116	0.96429	111.51900	BAIK
51	I50/50	D	106667.146	203634.674	0.96394	111.51897	BAIK
52	I50/51	D	106600.037	203672.979	0.96333	111.51932	BAIK
53	I50/52	D	106563.029	203669.56	0.96300	111.51929	BAIK
54	I50/53	D	106514.217	203674.158	0.96256	111.51933	HILANG
55	I50/54	D	106481.083	203676.427	0.96226	111.51935	HILANG
56	I50/55	D	106435.282	203689.781	0.96184	111.51947	BAIK
57	I50/56	D	106404.234	203720.158	0.96156	111.51974	BAIK
58	I50/57	D	106342.59	203748.871	0.96101	111.52000	BAIK
59	I50/58	D	106308.071	203763.628	0.96069	111.52013	BAIK

**Lampiran 7 :**  
**Rekapitulasi Hasil Operasi Pamtas RI – Malaysia**

**Rekap TA. 2018**

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT  
KOMANDO DAERAH MILITER XII/TANJUNGPURA

Lampiran A (Rekapitulasi)

**REKAPITULASI HASIL OPERASI PAMTAS RI – MALAYSIA TA. 2018**

NO		JENIS KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
URT	BAG			
1	2	3	4	5
		<b>Satgas Yonif 642/Kps</b>		
1	1	Senpi/Muhandak a. Senjata Rakitan b. Senjata Laras Pendek jenis Air Soft Gun c. Senjata Laras Pendek jenis Pistol Revolver	40 Pucuk 1 Pucuk 1 Pucuk	34 Kasus
2	2	Illegal Logging a. Kayu Meranti b. Papan Tamao	350 Balok 328 Papan	2 Kasus
3	3	Illegal Trading a. Mobil Ford Ranger b. Pupuk Karung c. Gula Pasir d. Pupuk dan Racun Kemasan Botol e. Sosis f. Milo g. Sepeda Motor	1 Unit 1 Karung 1 Karung 1 Karung 14 Kotak 2 Kotak 4 Unit	6 Kasus
4	4	Narkoba a. Sabu-sabu b. Narkoba c. Sabu-sabu d. Sabu-sabu	3,01 Gram 4,2 Kg 0,10 Gram 10 Gram	4 Kasus
5	5	Illegal Entry a. Warga Indonesia b. Warga malaysia	2 Orang 1 Orang	1 Kasus
6	6	Miras a. Gin b. Orangejeboom	72 Botol 165 Kaleng	1 Kasus
		<b>Jumlah</b>		<b>48 Kasus</b>
		<b>Satgas Yonif 123/RW</b>		
7	1	Senpi/Muhandak a. Senjata Rakitan b. Munisi Penabur c. Munisi Kal 7,62 mm	28 Pucuk 11 Butir 20 Butir	29 Kasus

2

1	2	3	4	5
		d. Munisi Kal 45 mm e. Granat	93 Butir 1 Buah	
8	2	Illegal Trading a. Sepeda Motor b. Bibit Sawit	2 Unit 60 Batang	2 Kasus
9	3	Illegal Entry a. Warga Indonesia b. Warga malaysia	8 Orang 4 Orang	5 Kasus
10	4	Miras a. Benson b. Kingway	2.173 Botol 888 Kaleng	4 Kasus
11	5	Narkoba - Sabu-sabu	11,1 Gram	2 Kasus
		Jumlah		<b>42 Kasus</b>
		<b>Satgas Yonif 511/DY</b>		
12	1	Senpi/Muhandak a. Rakitan jenis Lantak/Bowmen b. Rakitan Pistol c. Munisi	76 Pucuk 1 Pucuk 24 Munisi jenis rimba 5 butir munisi 1 Kotak isi Timah 2 Ons Bubuk Mesiu	26 Kasus
13	2	Illegal Logging a. Kayu Durian b. Kayu Gaharu c. Kayu Kruing	208 Batang 1.400 Kg 100 Batang	4 Kasus
14	3	Illegal Trading a. Tabung Gas LPG b. Soft Drink c. Bawang Merah d. Bawang Putih e. Kentang f. Gula Pasir g. Pakaian Bekas h. Bunga Anggrek i. Telur ayam j. Sosis k. Ikan l. Buntut Ayam	58 Tabung 50 Dus 367 Karung 158 Karung 3 Karung 2 Karung 11 Bal 3 Karung 227 Krat 195 Kg 150 Kg 45 Kg	19 Kasus

3

1	2	3	4	5
		m. Dada Ayam n. Tulang Sapi o. Sayap Ayam p. Ikan Patin q. Fishball r. Bawang s. Telur Ayam t. Daging Ayam u. Buntut Ayam v. Speaker w. Alat penyemprot x. Alat penjernih air y. Rokok Malaysia z. Hati Ayam aa. Ikan Patin bb. Ikan Bawal cc. Daging Babi dd. Miras Gin Tanduk ee. Lemon Gin ff. Golden Pagoda gg. Kingway hh. Tequila ii. Vodka	120 Kg 15 Kg 15 Kg 15 Kg 30 Kg 1 Karung 126 Layer 1 Dus 2 Dus 1 Pasang 1 Buah 1 Set 73 Slop 2 Dus 20 Dus 8 Dus 6 Box 144 Botol 94 Botol 36 Botol 673 Kaleng 23 Botol 12 Botol	
15	4	Illegal Entry a. Pembawa Narkoba b. WNA Illegal c. WNI Illegal	2 Orang 5 Orang 3 Orang	3 Kasus
16	5	Narkoba a. Sabu-Sabu b. Sabu-sabu c. Alat Hisap Bong	13,25 Gram 5 Paket 1 Paket	3 Kasus
		Jumlah		<b>55 Kasus</b>
17	1	<b>Satgas Yonif 320/BP</b> Senpi/Muhandak a. Rakitan jenis Lantak/Bowmen b. Rakitan jenis Pistol c. Munisi	62 Pucuk 4 Pucuk 3 Butir	35 Kasus
	2	Illegal Trading a. Pakaian Bekas b. Sembako Illegal c. Batu Antimony d. Telur e. Miras Tequila f. Arak Kok Pun Tiga Sekawan	4 Karung 4,5 Ton 90 kat 11 Botol 12 Botol	8 Kasus

4

1	2	3	4	5
	3	g. Miras Benson h. Kingway i. Beer Mons  Illegal Logging a. Rotan b. Kayu Balok	40 Botol 192 Kaleng 168 Kaleng  20 Ton 27 Batang	2 Kasus
		Jumlah		<b>45 Kasus</b>
Jumlah Total				<b>190 Kasus</b>

a.n. Panglima Kodam XII/Tanjungpura  
Asops,



Anwar  
Kolonel Inf NRP 11950043691072

TELAH DI TELITI OLEH		
PEJABAT	PARAF	TANGGAL
Pabandaops		
Pabandyaops		
Waasops		

## Rekap TA. 2019

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT  
KOMANDO DAERAH MILITER XII/TANJUNGPURA

Lampiran A (Rekapitulasi)

## REKAPITULASI HASIL OPERASI PAMTAS RI-MALAYSIA TA. 2019

NO		JENIS KEGIATAN	JUMLAH	KET
URT	BAG			
1	2	3	4	5
		<b>Satgas Yonif 511/DY</b>		
1	1	Senpi/Muhandak - Senjata Rakitan	28 Pucuk	21 Kasus
2	2	<i>Illegal Trading</i> a. Telur ayam b. Ikan kembung c. Miras kingway d. Baju Bekas	3.168 butir 63 Kg 167 kaleng 5 tas	5 Kasus
		Jumlah		<b>26 Kasus</b>
		<b>Satgas Yonif 320/BP</b>		
3	1	Senpi/Muhandak a. Senjata Rakitan b. Meriam	19 Pucuk 1 Pucuk	13 Kasus
4	2	<i>Illegal Trading</i> a. Pakaian layak pakai  b. Miras benson c. Miras arak putih d. Miras vodka e. Rokok Malaysia f. Speed boat Yamaha 15 PK g. Sinso/pemotong kayu	1 Ball dan 7 karung 36 botol 1 jerigen 5 botol 5 slop 1 buah 1 buah	4 Kasus
		Jumlah		<b>17 Kasus</b>
		<b>Satgas Yonif Mekanis 643/Wns</b>		
5	1	<i>Illegal Logging</i> a. Rotan b. Kayu Sengon	192 ikat 18 kubik	2 Kasus
6	2	<i>Illegal Entry</i> a. WNA Malaysia b. TKI Illegal	1 orang 75 orang	12 Kasus

2

1	2	3	4	5
7	3	<i>Illegal Trading</i> a. Telur b. Ikan Bandeng c. Sosis  d. Ceker ayam e. Daging ayam  f. Hati ayam g. Baso h. Daging kerbau i. Kosmetik illegal j. Daging k. Ikan bandeng l. Lodspeaker m. Senso n. Racun  o. Miras  p. Mobil Malaysia q. Pakaian bekas r. Uang ringgit s. Uang tunai t. Minyak goreng u. Crimer saji v. Tepung w. Gula  x. Sajam y. Mata gerindra z. MSG aa. Bawang putih bb. Bawang merah cc. Rokok  dd. Ikan tuna ee. Ayam filipin ff. Ikan gg. Kulit sapi hh. TV ii. Amplifier jj. Buntut ayam kk. Sepeda motor ll. Ikan bawal mm. Ikan patin nn. Ayam bangkok oo. Sapi pp. Burung kacer	29.790 butir 140 kg 1 dus, 8 kotak dan 1.252 bungkus 60 kg 96 kaleng, 2 kantong dan 150 kg 2 kardus 2 plastik besar 40 kg Rp.13.600.000 1 kotak 10 kg 8 buah 2 set 1 karung, 1 ken, 123 botol, 16 liter, 25 kaleng dan 10 bungkus 3 derigen, 701 botol, 26 kaleng dan 55 liter 4 buah 24 karung, 8 tas RM 70.130 Rp.11.000.000 51 bungkus 20 kaleng 11 bungkus 28 karung, 24 sak dan 94 bungkus 4 bilah 10 buah 33 bungkus 9 karung 2 karung 2 karung, 6 dus dan 4.256 batang 3 kotak 6 ekor 3 kantong 13 kg 3 buah 1 buah 3 kotak, 2 kantong 1 buah 4 karung 20 kotak 3 ekor 2 ekor 935 ekor	48 Kasus

3

1	2	3	4	5
8	4	Senpi/Muhandak a. Rakitan jenis Lantak/Bowmen b. Rakitan jenis pistol c. Munisi d. Granat Meriam kaliber 140 mm (aktif) e. Granat Meriam Kal 81 mm	50 pucuk 2 pucuk 5 butir 1 buah 1 buah	34 Kasus
9	5	Narkoba a. Sabu-sabu b. Sabu-sabu c. Sabu-sabu d. Sabu-sabu e. Sabu-sabu	6 paket 8 gram 8 gram 1 gram 0,6 gram	6 Kasus
10	6	<i>Illegal Mining</i> Pengamanan kunci Alat Berat Dozer dan Excavator milik PT. Cipta Sarana Marga Sejati (PT. CSMS) terkait adanya kegiatan pengerukan Pasir		1 Kasus
		Jumlah		<b>103 Kasus</b>
<b>Satgas Yonif R 301/Pks</b>				
7	1	<i>Illegal Trading</i> a. Miras  b. Mesin merk Yahmaha 15 PK c. Mesin merk Mercury 3 PK d. Pakaian bekas e. Boneka dan Sepatu bekas f. Rokok Malaysia	12 kendi, 289 botol, 1.824 kaleng dan 195 liter 2 buah 1 buah 9 karung 1 karung 19.200 batang	17 Kasus
8	2	Senpi/Muhandak a. Rakitan laras panjang b. Rakitan jenis pistol c. Graat tangan d. Munisi Cal. 12 mm e. Munisi Cal. 9 mm	46 pucuk 2 pucuk 1 buah 63 butir 3 butir	43 Kasus
9	3	<i>Illegal Entry</i> TKI	14 orang	1 Kasus
		Jumlah		<b>61 Kasus</b>

4

1	2	3	4	5
		<b>Satgas Yonif R 641/Bru</b>		
8	1	Senpi/Muhandak a. Senjata Rakitan b. Granat Nanas	1 pucuk 1 buah	2 Kasus
9	2	<i>Illegal Entry</i> - Tki Illegal	11 orang	2 Kasus
10	3	Narkoba - Sabu-sabu	51,923 kg	1 Kasus
11	4	<i>Illegal Trading</i> a. Amonium Nitrat b. Gula pasir c. Sosis d. Ikan e. Daging Kambing	650 kg 600 kg 18 kotak 20 kg 10 kg	3 Kasus
		Jumlah		<b>8 Kasus</b>
		<b>Satgas Yonif 133/YS</b>		
12	1	Senpi/Muhandak a. Senjata Rakitan b. Munisi	7 pucuk 7 butir	5 Kasus
13	2	<i>Illegal Trading</i> a. Kulit Rusa b. Kuli Babi c. Parang d. Minuman keras	15 kg 3 kg 5 buah 4 dus	2 Kasus
		Jumlah		<b>4 Kasus</b>
		Jumlah Total		<b>222 Kasus</b>


 Panglima Kodam XII/Tanjungpura  
 Asisten Operasi,  
 Fredy Sianturi, S.I.P.  
 Kolonel Inf NRP 11960050840575

## Rekap TA. 2020

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT  
KOMANDO DAERAH MILITER XII/TANJUNGPURA

Lampiran A (Rekapitulasi)

## REKAPITULASI HASIL OPERASI PAMTAS RI-MALAYSIA TA 2020

NO		JENIS KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
URT	BAG			
1	2	3	4	5
		<b>Satgas Yonif R 641/Bru</b>		
1	1	Senpi/Muhandak a. Senjata rakitan b. Pistol rakitan	36 pucuk 3 pucuk	32 Kasus
2	2	Narkoba a. Sabu-sabu b. Sabu-sabu c. Sabu-sabu d. Sabu-sabu e. Sabu-sabu f. Sabu-sabu	7 gram 3076 gram 1,33 gram 9 gram 0,5 gram 0,3 gram	6 Kasus
3	3	<i>Illegal Trading</i> a. Burung kacer b. Rokok  c. Miras arak tempayan d. Miras lemon gin e. Pakaian bekas f. Gula pasir  g. Mobil h. Bawang merah i. Sapi j. Burung kacer k. Miras Vodka l. Sosis m. Tuperware n. Obat merek paracil	40 ekor 6 truck, 140 bungkus 10 botol 195 botol 33 karung 142 karung, 552 kg 5 unit 306 karung 1 ekor 60 ekor 33 botol 36 kotak 5 koli 70 kotak/ 69.920 tablet	30 Kasus
4	4	<i>Illegal Entry</i> a. TKI Illegal b. WNA	2.443 orang 1 orang	254 Kasus
5	5	<i>Illegal Logging</i> a. Kayu papan 4 M b. Kayu meranti	120 keping 53 batang	2 Kasus
		Jumlah		<b>324 Kasus</b>
		<b>Satgas Yonif 133/YS</b>		
6	1	Senpi/Muhandak a. Senjata Rakitan b. Pistol Rakitan	49 pucuk 4 pucuk	41 Kasus

2

1	2	3	4	5
7	2	c. Munisi d. Munisi mortir e. Laras Bowmen  <i>Illegal Trading</i> a. Mobil avanza b. Miras  c. Miras Benson d. Pakaian bekas e. Daging  f. Gula  g. Daging ayam h. Sosis  i. Beras j. Susu Milo k. Telur l. Burung kacer m. Ayam n. Daging sapi	7 butir 1 butir 1 buah  1 unit 3 dus, 92 botol 19 dus 2 karung 1 karung, 4 dus 7 karung, 23 sak, 90 kg 6 kotak 2 karung, 1 kotak, 2 dus 3 karung 3 karung 1 rak 150 ekor 7 ekor 80 kg	17 Kasus
8	3	<i>Illegal Entry</i> - Tki Illegal	231 orang	95 Kasus
		Jumlah		<b>153 Kasus</b>
9	1	<b>Yonif 642/Kps</b> <i>Illegal Entry</i> - TKI Illegal	173 orang	70 Kasus
10	2	<i>Human trafficking</i> a. TKI Illegal b. Calo PMI	21 orang 2 orang	3 Kasus
11	3	<i>Illegal Logging</i> - Kayu bulat ukuran $\pm$ 20cm	$\pm$ 30 batang	1 Kasus
12	4	<i>Illegal Trading</i> a. Obat-obatan b. Miras Vodca c. Arak guci d. Racun e. Miras  f. Kosmetik g. Rokok	1 dus 12 botol 12 botol 3 jerigen 111 botol dan 24 kaleng 1 dus 240 bungkus	6 Kasus
13	5	Narkoba a. Sabu-sabu b. Sabu-sabu c. Sabu-sabu	5 kg 1,1 kg 0,48 gram	5 Kasus

3

1	2	3	4	5
		d. Sabu-sabu e. Sabu-sabu f. Pil kstasi	3,075 kg 4,092 kg 500 butir	
14	6	Senpi/ Muhandak a. Senjata rakitan b. Air Soft Gun	8 pucuk 1 pucuk	7 Kasus
15	7	Illegal Satwa - Burung Kacer	50 ekor	1 Kasus
		Jumlah		<b>93 Kasus</b>
		<b>Yonif 407/PK</b>		
16	1	<i>Illegal Entry</i> a. TKI Illegal b. TKA Illegal	7 orang 4 orang	7 Kasus
17	2	<i>Human Trafficking</i> a. TKI Illegal b. Sopir TKI Illegal	4 orang 1 orang	1 Kasus
18	3	<i>Illegal Trading</i> a. Miras Benson b. Daging sapi c. Tulang sapi d. Ayam potong e. Spm f. Miras Vodca g. Miras Tequila h. Miras Lemon Gin i. Miras Brandy j. Rokok M2 k. Miras l. Arak putih	6 dus 40 kg 20 kg 2 karung 1 unit 21 botol 21 botol 77 botol 3 dus 80 slop 1 dus 34 liter	5 Kasus
19	4	Senpi/ Muhandak a. Senjata rakitan b. Munisi	11 pucuk 1 butir	10 Kasus
		Jumlah		<b>23 Kasus</b>
		Jumlah Total		<b>593 Kasus</b>

a.n. Panglima Kodam XII/Tanjungpura  
Selaku  
Panglima Komando Operasi  
Wakil,



Djaka Budhi Utama  
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran 8 :  
Dokumentasi Pamtas

Senjata Ilegal



### Pemeriksaan Kesehatan



### Penyelundupan Miras dengan Motif Menghindari Bea dan Cukai



### Giat Patroli



### Bantuan Bencana Banjir





### Penyelundupan Narkoba



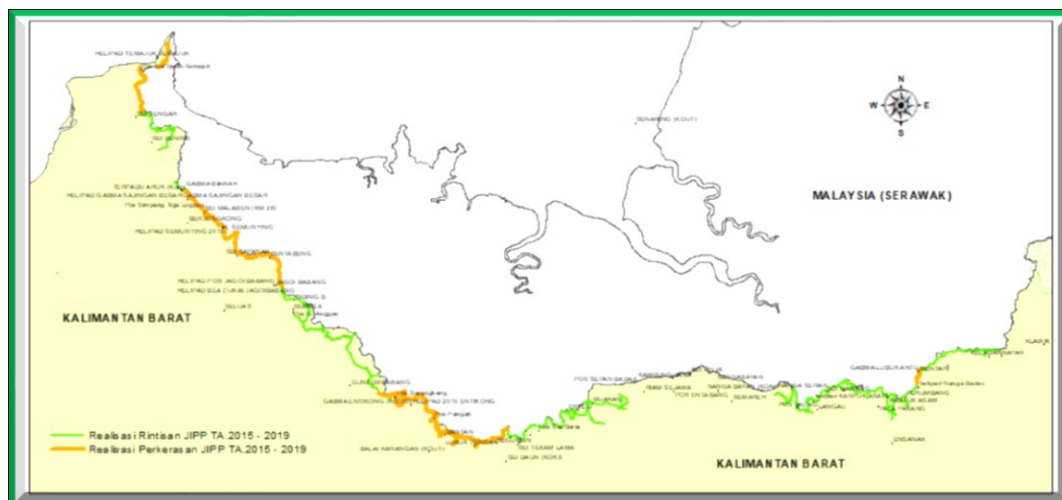
### Penemuan Barang Ilegal



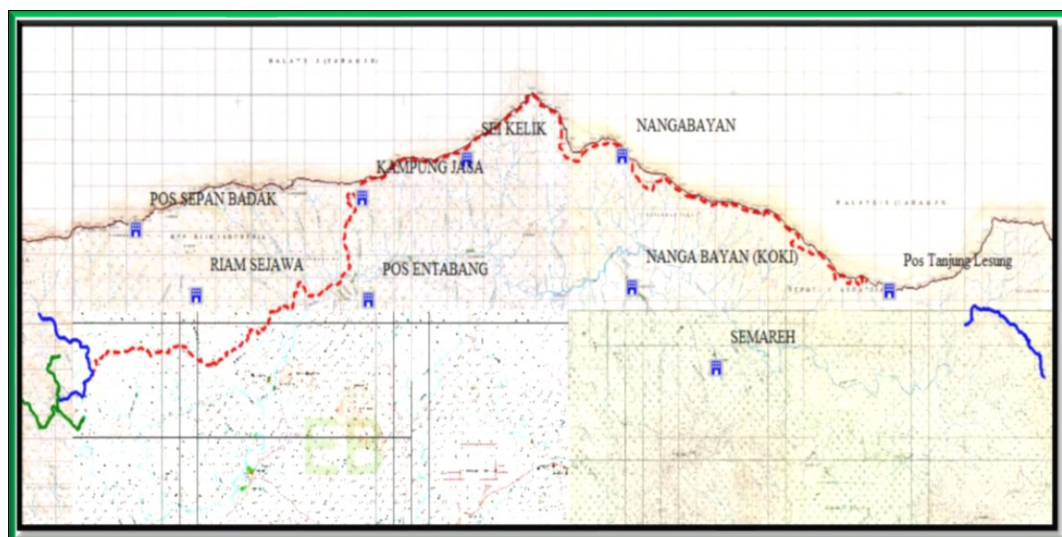
### Penyuluhan Protokol Kesehatan



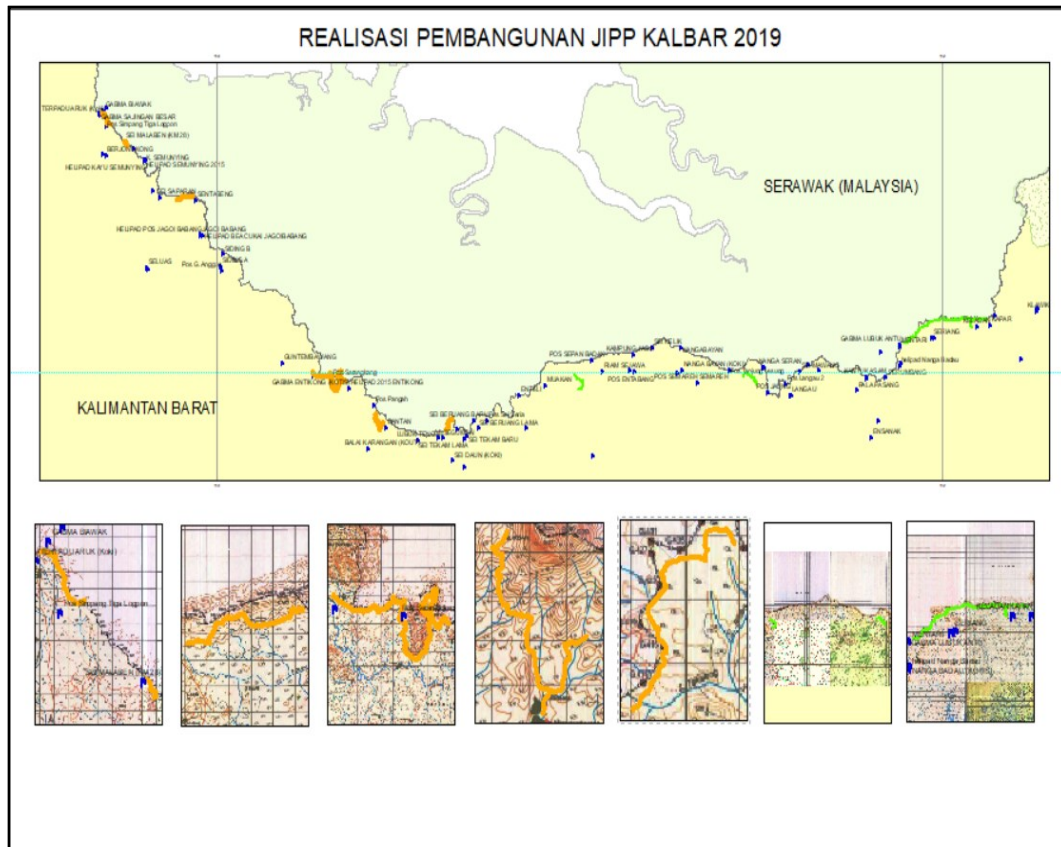
**Lampiran 9 :**  
**Pembukaan Lahan JIPP**



**Realisasi Pembangunan JIPP Kalbar 2015-2019**



**Rencana Jalur Perintis JIPP Kalbar 2020**  
**Muakan – Tanjung Lesung 60 KM**



### Tebing Berbatu

